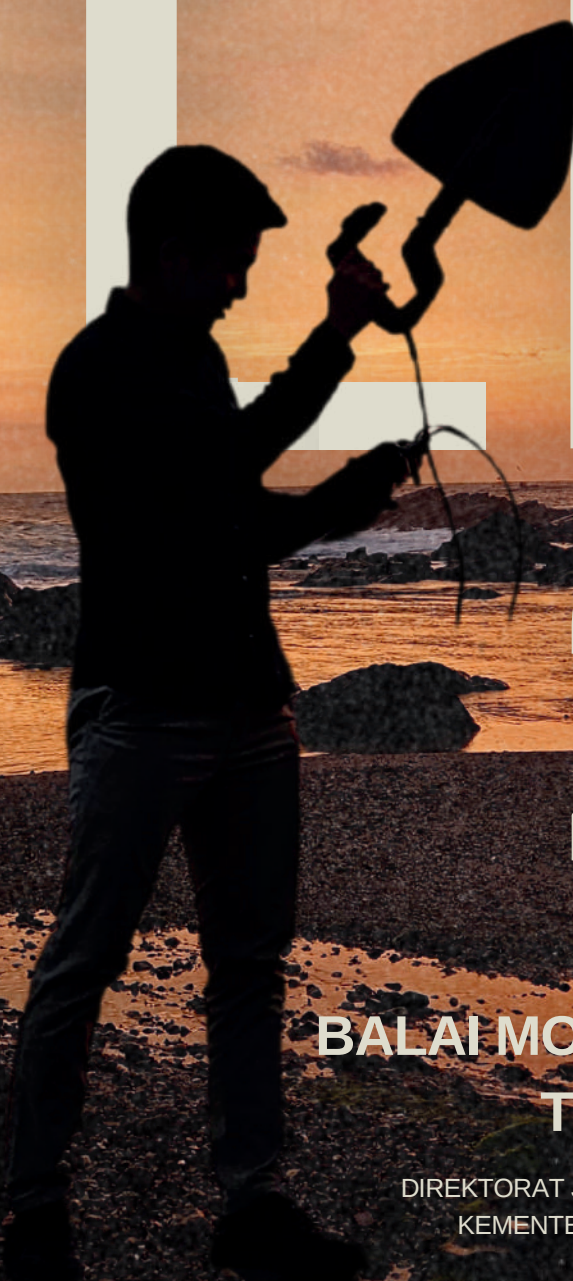


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# LKIP 2025



**BALAI MONITOR SFR KELAS I  
TANGERANG**

DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR DIGITAL  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL



# LKIP

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



# 2025

## LAPORAN KINERJA 2025

UPT. BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I TANGERANG  
DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR DIGITAL  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

JL. RAYA SERANG KM. 32 NO. 212  
SUMUR BANDUNG, KEC. JAYANTI, KABUPATEN TANGERANG, BANTEN 15610



@balmontangerang



Balmon Tangerang

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kominfo, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.



Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang berkaitan erat dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang telekomunikasi, khususnya penggunaan frekuensi radio di wilayah provinsi Banten.

Peran utama Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah mengelola sumber daya frekuensi radio dan orbit satelit serta pengaturan sertifikasi perangkat informatika guna mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi berkualitas serta memberikan manfaat ekonomis yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Sebagai pengawas dan pengendali penggunaan frekuensi radio di wilayah Provinsi Banten, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang (selanjutnya disebut Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang) mempunyai tugas antara lain



melakukan monitoring dan mengukur parameter teknis, mendeteksi sumber pancaran frekuensi radio, serta melakukan penertiban terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi radio. Hal ini dilaksanakan sebagai upaya pembinaan terhadap pengguna spektrum frekuensi radio agar pemanfaatannya tertib, efektif, efisien, sesuai dengan peruntukannya, serta tidak menimbulkan gangguan antar pengguna frekuensi radio.

**P**enilaian pada kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang dapat dilihat dari pencapaian sejumlah indikator kinerja yang menjadi target pencapaian kinerja di tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

### SASARAN KEGIATAN I

#### Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi

| Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan                                                                        | Target       | Capaian       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1.1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio                                         | 80% Kab/Kota | 100% Kab/Kota |
| 1.2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio                                                              | 100%         | 100%          |
| 1.3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio                                           | 95%          | 100%          |
| 1.4 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital    | 75%          | 100%          |
| 1.5 Persentase % Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio        | 85%          | 100%          |
| 1.6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif                                                  | 80%          | 100%          |
| 1.7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan                                     | 100%         | 100%          |
| 1.8 Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)                  | 100%         | 100%          |
| 1.9 Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio                                     | 100%         | 100%          |
| 1.10 Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik                                                          | 100%         | 100%          |
| 1.11 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)                               | 100%         | 100%          |
| 1.12 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)                            | 100%         | 100%          |
| 1.13 Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR <i>Microwave Link</i> yang tidak sesuai (PrimaAksi) | 100%         | 100%          |

### SASARAN KEGIATAN II

#### Meningkatnya kualitas tata kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien

|                                                                                                |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 2.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang Tahun 2025 | Nilai 86,95 | Nilai 84,41 |
| 2.2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)           | Nilai 97 %  | Nilai 100%  |

**P**ada Sasaran Kinerja pertama “Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi” terdapat 13 indikator kinerja yaitu :

#### **IK. 1.1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio**

Berdasarkan indikator kinerja Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang berhasil melampaui target yang ditetapkan. Dengan target 80% dan capaian 100%, persentase keberhasilan mencapai 100%, menunjukkan kinerja yang sangat optimal dalam peningkatan kualitas pengendalian spektrum, perangkat telekomunikasi, dan infrastruktur digital.

#### **IK. 1.2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio**

Indikator Kinerja Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio yang terdiri dari Pemeriksaan Microwave Link melalui remote site dan open shelter, Pengukuran Parapeter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Radio FM dan TV Digital menetapkan target realisasi sebesar 100% pada tahun 2025. Berdasarkan data capaian hingga akhir Desember 2025, diketahui bahwa realisasi indikator tersebut telah mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

#### **IK. 1.3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio**

Indikator Kinerja Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio memiliki target 95%. Hingga akhir Desember 2025, realisasi mencapai 100%, yang menunjukkan seluruh gangguan yang dilaporkan berhasil ditangani dan capaian kinerja melampaui target yang telah ditetapkan.

#### **IK. 1.4 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital**

Indikator Kinerja “Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital” pada tahun 2025 ditetapkan dengan target realisasi sebesar 75%. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan hingga akhir Desember 2025, indikator tersebut telah mencapai 100%, melampaui target yang ditetapkan.

#### **IK. 1.5 Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT**

Pada Tahun 2025 Indikator Kinerja Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang memiliki target realisasi sebesar 85%. Berdasarkan data capaian diketahui bahwa Persentase (%) nilai dari realisasi Capaian Kinerja sampai akhir Desember 2025 sebesar 100%.

#### **IK. 1.6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif**

Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif” telah tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang ditetapkan. Capaian ini dibuktikan dengan berhasil diselesaikannya seluruh 30 kasus pelanggaran yang telah ditetapkan melalui Surat Pemberitahuan Penetapan Denda, di mana seluruhnya telah terbayar. Dengan terselesaikannya seluruh kasus tersebut, indikator kinerja Penanganan Sanksi Denda Administratif tahun 2025 dinyatakan tercapai secara penuh (100%). Hasil ini menunjukkan efektivitas proses penanganan, ketepatan langkah tindak lanjut, serta meningkatnya kepatuhan para pengguna spektrum frekuensi radio terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **IK. 1.7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan**

Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan Infrastruktur Digital” telah tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) dan dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah mencapai target secara menyeluruh. Seluruh proses pengukuran, baik melalui Static Test maupun Drive Test, berhasil dilaksanakan 125% sesuai rencana dan memenuhi standar Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa data kualitas layanan yang dihasilkan telah lengkap, valid, dan siap digunakan sebagai dasar analisis serta pengambilan kebijakan peningkatan kualitas layanan infrastruktur digital.

### **IK. 1.8 Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)**

Pada Tahun 2025, Capaian kinerja penyelenggaraan layanan sertifikasi operator radio (UNAR dan MOTS-IKRAN) pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang berhasil mencapai 100 dari target 100 atau sebesar 100%. Target dan capaian kinerja terpenuhi secara optimal, menunjukkan efektivitas pelaksanaan layanan berbasis Computer Assisted Test (CAT).

### **IK. 1.9 Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio**

Indikator Kinerja Pelaksanaan pencegahan dan penanganan piutang BHP frekuensi radio umumnya ditargetkan 100% yaitu jumlah penyampaian tagihan/invoice ke klien atau wajib bayar (100%) dan kegiatan koordinasi penanganan piutang setiap triwulan atau empat kali dalam satu tahun (100%).

### **IK. 1.10 Persentase (%) Sosialisasi Perizinan Frekuensi Radio**

Indikator Kinerja Persentase (%) Sosialisasi Perizinan Frekuensi Radio memiliki target realisasi sebesar 100%. Berdasarkan data pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun 2025, diketahui bahwa capaian indikator tersebut mencapai 100%, sehingga persentase realisasi kinerja terpenuhi sepenuhnya sesuai target PK yang telah ditetapkan.

### **IK. 1.11 Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)**

Persentase (%) Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) merupakan indikator yang menunjukkan tingkat realisasi kegiatan survei dibandingkan dengan rencana pelaksanaan dalam periode tertentu. Pengukuran ini dilakukan untuk memastikan bahwa survei kepuasan masyarakat dan persepsi kualitas pelayanan publik dilaksanakan secara konsisten sebagai bagian dari evaluasi dan peningkatan mutu layanan. Persentase dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah survei yang telah dilaksanakan dengan jumlah survei yang direncanakan, kemudian dikalikan 100%. Capaian ini mencerminkan komitmen unit kerja dalam melaksanakan pengukuran kinerja pelayanan publik secara berkala, terstruktur, dan akuntabel. Persentase (%) Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) itu dihitung dari perbandingan antara survei yang sudah dilaksanakan dengan yang direncanakan.

### **IK. 1.12 Persentase (%) Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)**

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan hingga akhir Tahun 2025, diketahui bahwa indikator kinerja Persentase Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat direalisasikan secara optimal dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.

### **IK. 1.13 Persentase (%) Verifikasi Site Microwave Link yang tidak sesuai (Prima Aksi)**

Indikator Kinerja Pelaksanaan pencegahan dan penanganan piutang BHP frekuensi radio umumnya ditargetkan 100% yaitu jumlah penyampaian tagihan/invoice ke klien atau wajib bayar (100%) dan kegiatan koordinasi penanganan piutang setiap triwulan atau empat kali dalam satu tahun (100%).



Pada Sasaran Kinerja pertama “Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi” terdapat 13 indikator kinerja yaitu :



#### **IK. 2.1 Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang Tahun 2025**

Pada tahun 2025, target capaian Perjanjian Kinerja (PK) untuk Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Efektif Dan Efisien dengan indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang Tahun 2025 yaitu 86,95% dengan realisasi sebesar 84,41%. Secara umum, capaian kinerja anggaran menggambarkan keselarasan antara perencanaan, penyerapan, efisiensi, serta kualitas pelaporan anggaran meskipun target pada tahun pelaporan tidak tercapai dikarenakan adanya restrukturisasi Kementerian yang menyebabkan nilai efisiensi tidak maksimal.



#### **IK. 2.2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)**

Pada tahun 2022 indikator kinerja Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) belum tersedia, indikator ini baru menjadi target kinerja di tahun 2023. Indikator kualitas pelaporan keuangan UAKPA menekankan pada ketepatan waktu, kelengkapan, akurasi, kepatuhan terhadap SAP, rekonsiliasi, dan tindak lanjut audit. Capaian kinerja Pada tahun 2023 - 2024 Balmon Tangerang telah memenuhi target yaitu 88%, begitu pula dengan tahun 2025 dari target 97% telah tercapai 100%.



# KATA PENGANTAR



## DANANG, S.T., M.M.

Plt. Kepala Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025 ini merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam menjalankan program kegiatan sesuai dengan visi misi yang telah dirumuskan dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Sebagai salah satu fungsi pelayanan dan pengawasan penggunaan frekuensi radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang telah menjalankan serangkaian kegiatan yang diharapkan dapat lebih berperan untuk keberlangsungan penggunaan frekuensi yang aman, tertib dan tidak ada gangguan khususnya di Wilayah Provinsi Banten.

Dengan tersusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap pegawai Balmon SFR Kelas I Tangerang untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Tangerang, Maret 2026

Plt. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio  
Kelas I Tangerang



Danang

# DAFTAR ISI

|                     |      |
|---------------------|------|
| Ringkasan Eksekutif | ii   |
| Kata Pengantar      | vii  |
| Daftar Isi          | viii |
| Daftar Tabel        | ix   |
| Daftar Gambar       | xii  |

## **PENDAHULUAN**

**1**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Latar Belakang                         | 02 |
| Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi | 03 |
| Potensi dan Permasalahan Strategis     | 04 |
| Sistematika Pelaporan                  | 05 |

## **PERJANJIAN KINERJA**

**2**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Sasaran Program               | 07 |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2025 | 07 |

## **PERJANJIAN KINERJA**

**3**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Sasaran Kinerja 1      | 11 |
| Sasaran Kinerja 2      | 87 |
| Akuntabilitas Keuangan | 94 |
| Kinerja Lainnya        | 95 |

**4**

## **PENUTUP**

|         |    |
|---------|----|
| Penutup | 99 |
|---------|----|

# DAFTAR TABEL

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang                                                      | 7  |
| Tabel 3.1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio                                               | 11 |
| Tabel 3.2 Hasil Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota                       | 12 |
| Tabel 3.3 Capaian PK Monitoring                                                                                       | 13 |
| Tabel 3.4 Capaian Pemantauan ISR                                                                                      | 14 |
| Tabel 3.5 Benchmarking Capaian Kinerja Balmon Tangerang dengan Balmon Medan                                           | 16 |
| Tabel 3.6 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio                                                                    | 19 |
| Tabel 3.7 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio dan Pengenaan Sanksi Pelanggaran                                   | 20 |
| Tabel 3.8 Sebaran Radio Siaran FM di Prov. Banten                                                                     | 22 |
| Tabel 3.9 Hasil Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Televisi Digital.                      | 22 |
| Tabel 3.10 Benchmarking Capaian Kinerja dengan UPT lainnya.                                                           | 23 |
| Tabel 3.11 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio                                                | 25 |
| Tabel 3.12 Hasil Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio                         | 27 |
| Tabel 3.13 Data layanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio                                                  | 28 |
| Tabel 3.14 Benchmarking Capaian Kinerja Dengan UPT Lainnya                                                            | 29 |
| Tabel 3.15 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital         | 32 |
| Tabel 3.16 Hasil Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio                         | 33 |
| Tabel 3.17 Benchmarking Capaian Kinerja Balmon Tangerang dengan Balmon Surabaya                                       | 35 |
| Tabel 3.18 Hasil Pelaksanaan Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT | 38 |

# DAFTAR TABEL

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.19 Rincian Stasiun SMFR Tetap/Transportable                                                | 38 |
| Tabel 3.20 Rincian Stasiun SMFR Bergerak                                                           | 39 |
| Tabel 3.21 Status Kondisi Perangkat Stasiun SMFR                                                   | 39 |
| Tabel 3.22 Hasil Pelaksanaan Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring Frekuensi Radio UPT      | 40 |
| Tabel 3.23 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif                                    | 44 |
| Tabel 3.24 Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Sanksi Denda Administratif                        | 45 |
| Tabel 3.25 Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Sanksi Denda Administratif Tahun 2025             | 46 |
| Tabel 3.26 Benchmarking Capaian Kinerja Penanganan Sanksi Denda Administratif                      | 48 |
| Tabel 3.27 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan Infrastruktur Digital | 50 |
| Tabel 3.28 Capaian Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan Infrastruktur Digital        | 51 |
| Tabel 3.29 Benchmarking Capaian Kinerja Dengan UPT Lainnya.                                        | 52 |
| Tabel 3.30 Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)    | 57 |
| Tabel 3.31 Jumlah Pelaksanaan UNAR pada Tahun 2025                                                 | 57 |
| Tabel 3.32 Rekap Data Penyelenggaraan UNAR pada Tahun 2025                                         | 58 |
| Tabel 3.34 Hasil Pelaksanaan Kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)                             | 58 |
| Tabel 3.35 Benchmarking Capaian Kinerja Dengan UPT Lainnya                                         | 59 |
| Tabel 3.36 Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)                   | 61 |
| Tabel 3.37 Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)                   | 61 |
| Tabel 3.38 Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)    | 62 |
| Tabel 3.39 Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)                   | 63 |

# DAFTAR TABEL

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.40 Penyelenggaraan Layanan Perizinan ISR dan IKRAN                                                 | 64 |
| Tabel 3.42 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Penanganan Piutang                                    | 68 |
| Tabel 3.43 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Penanganan Piutang                                    | 68 |
| Tabel 3.44 Benchmarking Capaian Kinerja Balmon Tangerang dengan Balmon Yogyakarta                          | 69 |
| Tabel 3.45 Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan Frekuensi Radio                                    | 72 |
| Tabel 3.46 Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan Frekuensi Radio                                    | 73 |
| Tabel 3.47 Benchmarking Capaian Kinerja Dengan UPT Lainnya                                                 | 74 |
| Tabel 3.48 Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)                                         | 76 |
| Tabel 3.49 Persentase Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik                                         | 76 |
| Tabel 3.50 Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) UPT Semarang                            | 78 |
| Tabel 3.51 Nilai Skala dan Interval Konversi Pelayanan Publik                                              | 78 |
| Tabel 3.52 Persentase (%) Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)                       | 80 |
| Tabel 3.53 Persentase Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik                                         | 80 |
| Tabel 3.54 Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) UPT Semarang                         | 82 |
| Tabel 3.55 Nilai Skala dan Interval Konversi Pelayanan Publik                                              | 82 |
| Tabel 3.56 Persentase Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)      | 84 |
| Tabel 3.57 Persentase Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik                                         | 84 |
| Tabel 3.58 Pelaksanaan Kegiatan Tindak Lanjut Verifikasi Data Koordinat Site ISR (Prima Aksi)              | 85 |
| Tabel 3.59 Persentase (%) Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai Monitor Kelas I Tangerang Tahun 2025            | 87 |
| Tabel 3.60 Persentase Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang Tahun 2025            | 88 |
| Tabel 3.61 Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang                                  | 88 |
| Tabel 3.62 Benchmarking Capaian Kinerja Balmon Tangerang dengan Balmon Jakarta                             | 89 |
| Tabel 3.63 Persentase (%) Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) | 91 |
| Tabel 3.64 Persentase Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang Tahun 2025            | 92 |
| Tabel 3.67 Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang                                  | 92 |

# DAFTAR GAMBAR

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 Kegiatan Pengukuran SFR .....                            | 1  |
| Gambar 1.2 Kegiatan Monitoring SFR .....                            | 2  |
| Gambar 1.3 Struktur Organisasi Balai Monitor Kelas I .....          | 3  |
| Gambar 1.4 Kegiatan Penanganan Gangguan SFR .....                   | 4  |
| Gambar 1.5 Kegiatan Pengukuran Kualitas Layanan Telekomunikasi .... | 5  |
| Gambar 2.1 Kegiatan Monitoring SFR .....                            | 6  |
| Gambar 2.2 Kegiatan Penanganan Gangguan SFR .....                   | 8  |
| Gambar 3.1 Kegiatan Monitoring SFR Wilayah Banten .....             | 11 |
| Gambar 3.2 Kegiatan Monitoring Site SMFR .....                      | 12 |
| Gambar 3.3 Kegiatan Monitoring Pita Frekuensi Radio .....           | 13 |
| Gambar 3.4 Dashboard Identifikasi Hasil Monitoring SFR .....        | 15 |
| Gambar 3.5 Dokumentasi Monitoring Spektrum Frekuensi Radio .....    | 18 |
| Gambar 3.6 Kegiatan Pengukuran SFR .....                            | 19 |
| Gambar 3.7 Dokumentasi Pemeriksaan Stasiun Radio .....              | 25 |
| Gambar 3.8 Kegiatan Penanganan Gangguan SFR .....                   | 26 |
| Gambar 3.9 Dokumentasi Monitoring Spektrum Frekuensi Radio .....    | 31 |
| Gambar 3.10 Penertiban Alat Perangkat Telekomunikasi .....          | 32 |
| Gambar 3.11 Dokumentasi Kepatuhan Standar Teknis .....              | 37 |
| Gambar 3.12 Kegiatan Pemeliharaan SMFR .....                        | 43 |
| Gambar 3.13 Penanganan Sanksi Denda Administratif .....             | 44 |
| Gambar 3.14 Penanganan Sanksi Denda Administratif .....             | 45 |
| Gambar 3.15 Dokumentasi Penanganan Sanksi Denda .....               | 50 |

# DAFTAR GAMBAR

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3.16 Pengukuran Kualitas Layanan .....                   | 51 |
| Gambar 3.17 Dokumentasi Hasil Pengukuran Kualitas Layanan ..... | 56 |
| Gambar 3.18 Kegiatan UNAR Reguler .....                         | 57 |
| Gambar 3.19 Bimbingan Teknis IKRAN .....                        | 62 |
| Gambar 3.20 Bimtek Sertifikasi Operator Radio Maritim .....     | 63 |
| Gambar 3.21 Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio .....        | 71 |
| Gambar 3.22 Penghargaan DJID Choice Award .....                 | 72 |
| Gambar 3.23 Sosialisasi Perizinan Frekuensi .....               | 75 |
| Gambar 3.24 Survey Kepuasan Masyarakat .....                    | 77 |
| Gambar 3.25 Dokumentasi Survei Kepuasan Masyarakat .....        | 79 |
| Gambar 3.26 Dokumentasi Survei Kepuasan Masyarakat .....        | 83 |
| Gambar 3.27 Verifikasi Data Koordinat Site ISR .....            | 86 |
| Gambar 3.28 Realisasi Belanja Satker 654251 .....               | 94 |
| Gambar 3.29 Realisasi Belanja Satker 654251 .....               | 94 |
| Gambar 3.30 Piagam Pelayanan Prima Balmon Tangerang .....       | 95 |
| Gambar 3.31 Piagam Juara I Penyelesaian Piutang .....           | 95 |
| Gambar 3.32 Piagam Penghargaan KPPN .....                       | 96 |
| Gambar 3.33 Cek Kesehatan Gratis Komdigi .....                  | 96 |
| Gambar 3.34 Penertiban Nasional Tahap II .....                  | 97 |
| Gambar 3.35 Pemusnahan Alat Telekomunikasi .....                | 97 |
| Gambar 3.36 Sosialisasi Perizinan Frekuensi .....               | 98 |
| Gambar 3.37 Posko Nataru 2025 .....                             | 98 |

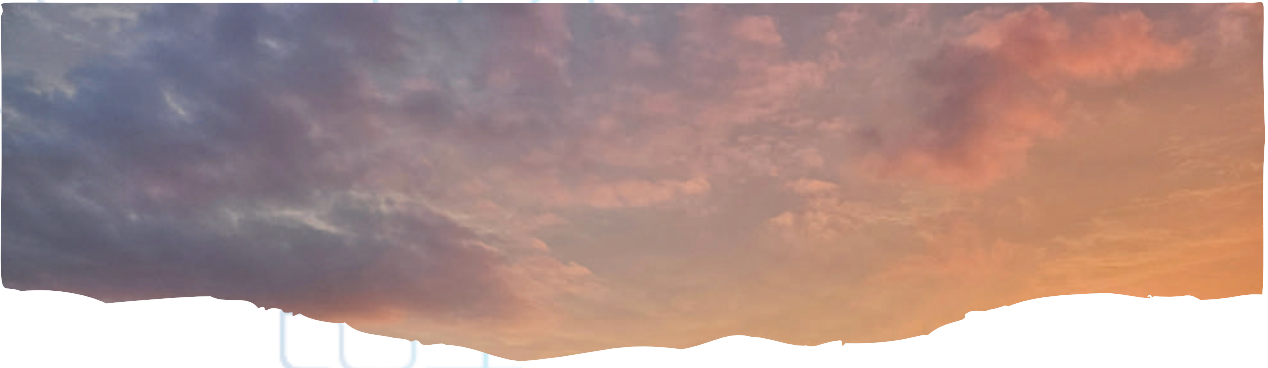
# I. PENDAHULUAN

- 1.1** Latar Belakang
- 1.2** Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 1.3** Potensi dan Permasalahan Strategis
- 1.4** Sistematika Pelaporan



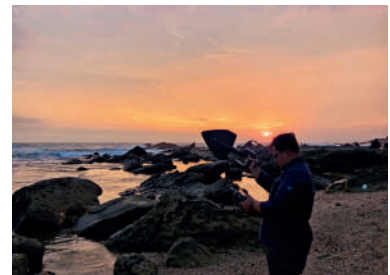
Gambar 1.1 Kegiatan Pengukuran SFR



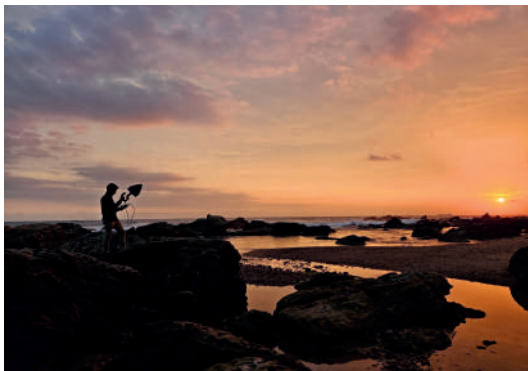


## 1.1 LATAR BELAKANG

Penggunaan spektrum frekuensi radio perlu mendapat ijin baik data untuk lokal maupun internasional radio siaran, komunikasi radio, seluler dan keselamatan jiwa manusia karena merupakan sumber daya milik negara yang merambat tanpa mengenal batas. Pengaturan frekuensi diperlukan untuk mencegah terjadinya penggunaan spektrum frekuensi radio yang ilegal dan saling mengganggu antar spektrum frekuensi radio.



Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital selaku penanggung jawab untuk menangani masalah-masalah pokok yang diperlukan dalam menjamin pengalokasian dan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk jasa telekomunikasi di Indonesia. Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sejumlah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang tersebar diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Gambar 1.2 Kegiatan Monitoring SFR

Dengan seiring perkembangan teknologi informatika, spektrum frekuensi radio semakin banyak dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Agar pemanfaatan frekuensi radio tertib, teratur, efisien dan untuk mencegah timbulnya gangguan (interferensi), maka pemanfaatan frekuensi radio perlu diatur.

Dalam hal pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio, Pemerintah mendelegasikan kepada Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai lembaga negara yang

melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Ditjen Infradigi) di daerah mengemban tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengawasan dan pengendalian frekuensi di wilayah Provinsi Banten.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang adalah untuk mengukur kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil.

Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.

## 1.2 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

**P**eraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan Rencana Dan Program;
- Pelaksanaan Pengamatan, Deteksi Lokasi Sumber Pancaran, Dan Pemantauan Spektrum Frekuensi Radio;
- Penertiban Dan Penyidikan Pelanggaran Terhadap Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Standard Perangkat Pos Dan Informatika;
- Pelaksanaan Pengukuran Dan Validasi Data Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- Penyampaian Izin Stasiun Radio Dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi Serta Pendampingan Penyelesaian Piutang Biaya Hak Pengguna Frekuensi Radio;
- Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Gangguan Spektrum Frekuensi Radio;
- Pelaksanaan, Perbaikan, Dan Pemeliharaan Perangkat Monitor Frekuensi Radio;
- Pelaksanaan Ujian Amatir Radio; Dan
- Pelaksanaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Dan Hubungan Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

**S**truktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang terdiri dari :

### 1. Kepala Balai Monitor

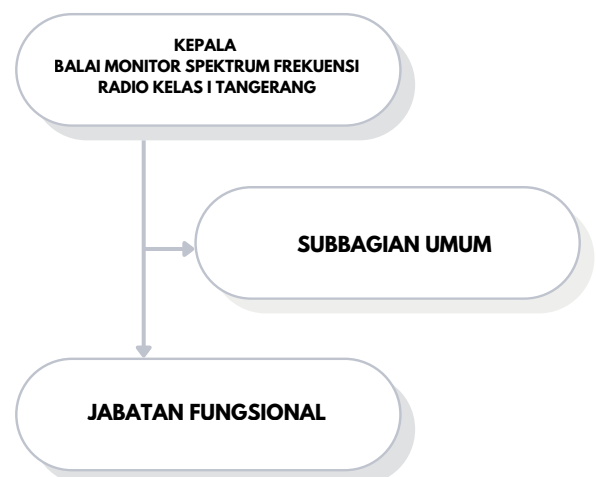
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio.

### 2. Subbagian Umum

Mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

### 3. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Monitor Bidang Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Balai Monitor Kelas I

Sumber: Permen Kominfo No 1 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja UPT Bidang FrekRad



## 1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

**B**alai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas I Tangerang adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, dibawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas I Tangerang berkedudukan di Provinsi Banten.



Gambar 1.4 Kegiatan Penanganan Gangguan SFR

Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas I Tangerang berkedudukan tepatnya yaitu di Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang berbatasan dengan sebelah Utara Laut Jawa, Sebelah Timur Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang, sebelah selatan Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang Selatan, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak.

Tugas dan Fungsi utama Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang yaitu dibidang pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban frekuensi radio di seluruh Kabupaten maupun Kota yang ada di wilayah Provinsi Banten yang terdiri dari 4 (empat) Kota dan 4 (empat) Kabupaten yaitu Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang.

Seiring dengan pertumbuhan pembangunan, infrastruktur telekomunikasi mengalami pertumbuhan begitu pesat yang sebarannya tidak bertumpu pada 1 lokasi perkotaan saja, namun juga di beberapa lokasi di wilayah lain yang berada di Provinsi Banten.

Tugas dan fungsi Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang disamping melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap frekuensi radio juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perangkat telekomunikasi, sehubungan dengan hal tersebut, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang dihadapkan dengan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Penguatan dalam hal perencanaan anggaran dan kegiatan yang masih perlu ditingkatkan agar seluruh kegiatan program kerja dapat berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.
- Anggaran dalam rangka peningkatan kompetensi/kemampuan di bidang teknis dan administrasi perlu ditingkatkan.
- Peningkatan Sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan tugas dan fungsi agar sejalan dengan perkembangan teknologi.



## 1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN



Gambar 1.5 Kegiatan Pengukuran Kualitas layanan telekomunikasi

**P**enyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang meliputi :

1



Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;

2



Perencanaan kinerja berisi ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;

3



Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;

4



Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



## II. PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 Sasaran Program

### 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025



Gambar 2.1 Kegiatan Monitoring SFR

## 2.1 SASARAN PROGRAM

Sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Digital, maka Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja dan mendukung sepenuhnya program Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang telah disusun.

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja disusun untuk menciptakan tolak ukur penilaian atas kinerja UPT sehingga dapat dilakukan evaluasi atas keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Ditjen Infrastruktur Digital tahun 2025 dapat disajikan pada tabel berikut:

### Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi

| Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan                                                                        | Target                        | Capaian                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1.1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio                                         | 80%<br>Kab/Kota<br>Termonitor | 100%<br>Kab/Kota<br>Termonitor |
| 1.2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio                                                              | 100%<br>Target<br>Diperiksa   | 100%                           |
| 1.3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio                                           | 95%                           | 100%                           |
| 1.4 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital    | 75%                           | 100%                           |
| 1.5 Persentase % Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT | 85%                           | 100%                           |
| 1.6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif                                                  | 80%                           | 100%                           |
| 1.7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan                                     | 100%                          | 100%                           |
| 1.8 Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)                  | 100%                          | 100%                           |
| 1.9 Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio                                     | 100%                          | 100%                           |
| 1.10 Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik                                                          | 100%                          | 100%                           |
| 1.11 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)                               | 100%                          | 100%                           |
| 1.12 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)                            | 100%                          | 100%                           |
| 1.13 Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)        | 100%                          | 100%                           |

**Meningkatnya kualitas tata kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien**

|     |                                                                                            |             |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 2.1 | Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang Tahun 2025 | Nilai 86,95 | Nilai 84,41% |
| 2.2 | Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)           | Nilai 97%   | Nilai 100%   |

*Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang*

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang telah mencapai target sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2025. Pencapaian ini mencerminkan komitmen dan kinerja optimal seluruh jajaran dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio secara efektif dan akuntabel, sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.


*Gambar 2.2 Kegiatan Penanganan Gangguan SFR*

# III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1** Sasaran Kinerja 1
- 3.2** Sasaran Kinerja 2
- 3.3** Akuntabilitas Keuangan
- 3.4** Kinerja Lainnya

## CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

**B**alai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas I Tangerang sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen Infrastruktur Digital mendukung sepenuhnya program dan sasaran kinerja serta Indikator Kinerja Program (IKP) yang disusun oleh Ditjen Infrastruktur Digital, yaitu :

1

Tersedianya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia;

2

Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat poa dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

3

Terwujudnya tata kelola yang bersih, efisien dan efektif.

Dalam rangka mendukung program Ditjen Infrastruktur Digital, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang menetapkan sasaran program sebagai berikut:

**1. Meningkatnya pengawasan legalitas penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Alat/Perangkat Telekomunikasi (APT) di wilayah Provinsi Banten, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon.**

**2. Meningkatnya tingkat kesesuaian penggunaan SFR dan APT dengan ketentuan perizinan yang berlaku,** berdasarkan hasil monitoring dan pengukuran teknis di lapangan.

**3. Meningkatnya efektivitas penanganan gangguan Spektrum Frekuensi Radio,** sehingga setiap gangguan dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan secara cepat, tepat, dan akuntabel.

**4. Meningkatnya penertiban penggunaan SFR dan APT yang tidak sesuai ketentuan,** berdasarkan:

- Hasil pemantauan spektrum frekuensi radio;
- Pengukuran parameter teknis stasiun radio;
- Deteksi sumber pancaran frekuensi radio.

**5. Meningkatnya kesesuaian data frekuensi pada Izin Stasiun Radio (ISR) dengan frekuensi aktual di lapangan,** berdasarkan hasil observasi monitoring.

**6. Terjaganya kesiapan dan keandalan perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)**

yang meliputi:

- Stasiun Tetap;
- *Transportable*;
- Bergerak;
- Jinjing.

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital tahun 2025 adalah sebagai berikut :

### 3.1 Sasaran Kinerja I

Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi.

#### 1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

| Kinerja                                                                                                 | Indikator Kinerja                              | Target | Capaian | Persentase |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| Meningkatnya kualitas pengendalian frekuensi radio, perangkat telekomunikasi, dan infrastruktur digital | Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio | 80%    | 100%    | 125%       |

**Tabel 3.1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio**

Berdasarkan indikator kinerja Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang berhasil melampaui target yang ditetapkan. Dengan target 80% dan capaian 100%, persentase keberhasilan mencapai 100%, menunjukkan kinerja yang sangat optimal dalam peningkatan kualitas pengendalian spektrum, perangkat telekomunikasi, dan infrastruktur digital.

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan kegiatan sebagai berikut :

#### I. Latar Belakang, Maksud, dan Tujuan

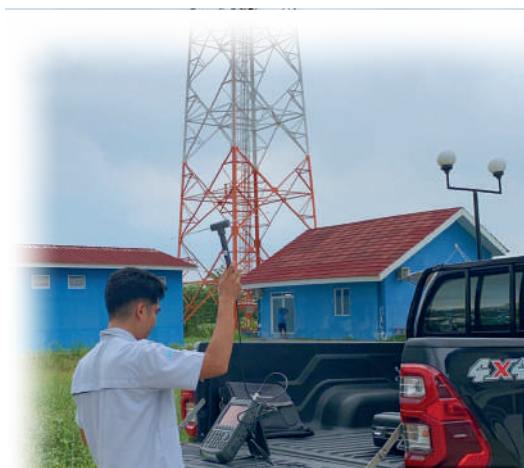
Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang memegang peranan penting dalam mendukung layanan komunikasi publik, pemerintah, pertahanan, transportasi, hingga telekomunikasi modern. Untuk memastikan penggunaan spektrum berjalan tertib, efisien, serta bebas dari interferensi, diperlukan pengawasan yang berkesinambungan.

Provinsi Banten merupakan provinsi paling barat di Pulau Jawa yang terdiri dari 8 (delapan) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, serta Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, dan Kota Cilegon.

Berdasarkan data SIM-S Ditjen Infrastruktur Digital, penggunaan spektrum frekuensi radio di Provinsi Banten menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025, jumlah pengguna spektrum frekuensi radio telah mencapai 22.956 pengguna, menunjukkan tingginya kebutuhan layanan komunikasi berbasis frekuensi di wilayah ini.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan spektrum frekuensi radio semakin meluas dan digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan spektrum frekuensi radio semakin meluas dan digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Agar pemanfaatan frekuensi tetap tertib, teratur, efisien, serta untuk mencegah terjadinya gangguan (interferensi) mengingat gelombang radio merambat tanpa mengenal batas wilayah maupun negara maka diperlukan sistem pengaturan, pengawasan, dan monitoring yang efektif. Pengendalian ini dilakukan dengan memanfaatkan perangkat SMFR serta alat monitoring dan ukur yang berfungsi dengan baik.



*Gambar 3.1 Kegiatan Monitoring SFR Wilayah Banten*

Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang, sesuai penugasannya, mengoperasikan 7 (tujuh) perangkat SMFR yang tersebar di Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Pandeglang. Perangkat SMFR tersebut digunakan untuk memantau pendudukan kanal frekuensi radio di wilayah Provinsi Banten secara berkesinambungan.

Selain monitoring berbasis SMFR, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang juga melaksanakan kegiatan Okupansi menggunakan perangkat jinjing (portable) untuk menjangkau wilayah yang tidak tercover oleh SMFR. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio, sekaligus memastikan bahwa pendudukan kanal pada pita frekuensi dapat dimonitor secara menyeluruh.



Gambar 3.2 Kegiatan Monitoring Sfte SMFR

Melalui kombinasi perangkat SMFR dan kegiatan okupansi portable, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang dapat menjalankan pengawasan yang lebih akurat, merata, dan responsif demi menjaga ketertiban pemanfaatan spektrum frekuensi radio di Provinsi Banten.

Kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dimaksudkan untuk memastikan keteraturan, keamanan, dan kepatuhan penggunaan frekuensi di wilayah pengawasan Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang, serta sebagai dasar evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pengendalian spektrum secara berkelanjutan dan bertujuan Mengidentifikasi penggunaan spektrum frekuensi radio yang aktif di lapangan, Mendeteksi dan mencegah potensi interferensi serta pelanggaran teknis dan administratif, Memastikan kesesuaian penggunaan frekuensi dengan izin yang diterbitkan, Menyediakan data dan laporan yang akurat sebagai bahan analisis, tindak lanjut, dan pelaksanaan pembinaan kepada pengguna frekuensi, Mendukung pencapaian IKU pengendalian spektrum frekuensi radio pada Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital Tahun 2025.

Sasaran kegiatan Monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di Kab/Kota di UPT selama Tahun 2025 dengan target capaian 80% dan realisasi capaian 100%, yakni Monitoring Pita Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota :

- 15 Pita Frekuensi Termonitor;
- 60% ISR termonitor;
- 80% Hasil monitor teridentifikasi;
- 100% melakukan tindak lanjut pengenaan sanksi terhadap seluruh pelanggaran dari hasil monitoring SFR teridentifikasi (jika ditemukan adanya temuan pelanggaran);
- Kabupaten/Kota yang memiliki stasiun tetap/transportable dilakukan observasi dan identifikasi minimal 1 (satu) kali setiap bulan per-stasiun tetap/transportable.

## II. Capaian Target

Pada Tahun 2025, indikator kinerja terkait Persentase Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota pada UPT memiliki target realisasi sebesar 80%. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir Desember 2025, diketahui bahwa capaian kinerja mencapai 100%, melampaui target yang telah ditetapkan.

| Sasaran Program                                                                                                 | Indikator Kinerja Sasaran Program                          | 2021   |           | 2022   |           | 2023   |           | 2024   |           | 2025   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                                                                                                                 |                                                            | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Meningkatnya kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio, perangkat telekomunikasi dan infrastruktur digital | Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota | 80%    | 100%      | 80%    | 100%      | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      | 80%    | 100%      |

Tabel 3.2 Hasil Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

Indikator Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota, target capaian kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 80%. Hingga akhir tahun 2025, hasil pelaksanaan monitoring menunjukkan tingkat realisasi sebesar 100%, melampaui target yang telah direncanakan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan dan monitoring spektrum frekuensi radio berjalan sangat efektif, dengan tingkat penyelesaian kegiatan yang tidak hanya memenuhi, tetapi juga melebihi standar kinerja yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan peningkatan kapasitas operasional, optimalisasi pemanfaatan perangkat monitoring, serta responsivitas tim dalam memastikan seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten terlayani sesuai kebutuhan pengendalian frekuensi radio.

Dengan demikian, kinerja tahun 2025 dapat dikategorikan sangat memuaskan, karena realisasi pencapaian berhasil melampaui target dan menunjukkan konsistensi kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio dari tahun ke tahun.

Monitoring pita frekuensi radio di Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan observasi dan identifikasi spektrum frekuensi radio dengan memanfaatkan perangkat Stasiun Tetap/Transportable serta Stasiun Jinjing/Bergerak. Seluruh hasil pemantauan kemudian dihimpun dan dilaporkan secara sistematis melalui Aplikasi *Report Online (ROL)* sebagai basis data evaluasi dan pengendalian spektrum.

Pelaksanaan monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Kabupaten/Kota berada dalam kondisi tertib, sesuai peruntukan, serta bebas dari potensi gangguan (interferensi). Adapun perhitungan capaian monitoring pita frekuensi radio mengacu pada parameter penilaian yang ditetapkan melalui indikator kinerja yang relevan, sehingga hasil yang diperoleh dapat menggambarkan tingkat efektivitas pengawasan yang telah dilaksanakan selama periode berjalan yaitu:

1. Selama Tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang telah melaksanakan kegiatan monitoring pita frekuensi radio di Kabupaten/Kota secara terstruktur dan berkesinambungan. Kegiatan ini dilakukan melalui proses observasi dan identifikasi spektrum frekuensi radio dengan memanfaatkan berbagai perangkat pemantauan, yaitu Stasiun Tetap/*Transportable* serta Stasiun Jinjing/Bergerak yang memungkinkan pengawasan dilakukan baik di wilayah terjangkau maupun wilayah yang tidak dilayani oleh perangkat tetap.

Seluruh hasil monitoring kemudian dicatat dan dilaporkan secara sistematis melalui Aplikasi *Report Online (ROL)* sehingga data yang tersaji bersifat real-time, akurat, dan dapat digunakan sebagai dasar analisis lebih lanjut. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan monitoring pita frekuensi radio selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



Gambar 3.3 Kegiatan monitoring pita frekuensi radio

| Capaian PK Monitoring  |                    | 0%                 | 10%         | 20%      | 30%         | 40%                  | 50%                 | 60%                 | 70%            | 80% |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----|
| Kabupaten/Kota         | ISR MON Jumlah ISR | ISR MON Termonitor | Target PITA | OCC PITA | OCC Capaian | IDEN Teridentifikasi | Perlu Tindak Lanjut | Sudah Tindak Lanjut | Capaian PK Obs |     |
| Kota Cilegon           | 958                | 215                | 15          | 1        | 1           | 1947                 | 1                   | 1                   | 1              |     |
| Kota Serang            | 36                 | 22                 | 15          | 1        | 1           | 824                  | 186                 | 0                   | 1              |     |
| Kota Tangerang         | 230                | 138                | 191         | 1        | 1           | 2574                 | 2059                | 1                   | 1              |     |
| Kota Tangerang Selatan | 105                | 69                 | 85          | 1        | 1           | 1942                 | 1132                | 2                   | 1              |     |
| Lebak                  | 45                 | 27                 | 15          | 1        | 1           | 497                  | 148                 | 1                   | 1              |     |
| Pandeglang             | 70                 | 42                 | 57          | 1        | 1           | 888                  | 714                 | 1                   | 1              |     |
| Serang                 | 90                 | 127                | 15          | 1        | 1           | 322                  | 184                 | 2                   | 1              |     |
| Tangerang              | 212                | 127                | 15          | 1        | 1           | 3005                 | 9374                | 1                   | 1              |     |

Tabel 3.3 Capaian PK Monitoring

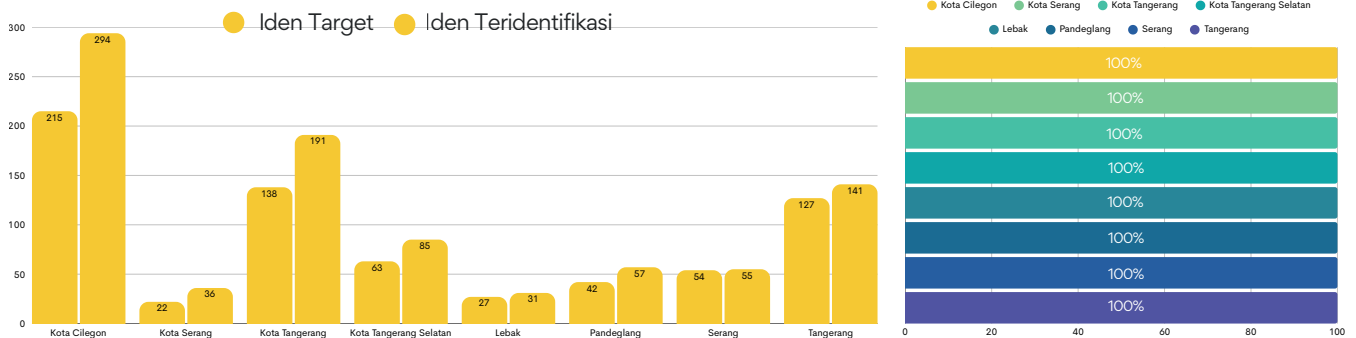
Sumber Data : <https://rol.postel.go.id/dashboard>

| Kabupaten / Kota       | Status     |
|------------------------|------------|
| Kota Cilegon           | Termonitor |
| Kota Serang            | Termonitor |
| Kota Tangerang         | Termonitor |
| Kota Tangerang Selatan | Termonitor |
| Lebak                  | Termonitor |
| Pandeglang             | Termonitor |
| Serang                 | Termonitor |
| Tangerang              | Termonitor |

Tabel 3.4 Capaian Pemantauan ISR

Dari tabel di samping dapat dilihat bahwa Hasil capaian untuk PK Monitoring Pita Frekuensi Radio di 8 Kab/Kota sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatan monitoring pada 15 pita frekuensi radio di 8 (delapan) Kabupaten/Kota Provinsi Banten telah Termonitor, ini menunjukkan bahwa seluruh proses pemantauan di Kabupaten/Kota dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan. Kegiatan ini menjadi dasar penting dalam memastikan tertib frekuensi, mencegah munculnya interferensi, serta mendukung optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Banten.

2. Dari hasil kegiatan monitoring sepanjang tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang telah berhasil melaksanakan proses pemantauan terhadap 60% ISR (Izin Stasiun Radio) yang ditetapkan sebagai target tahunan. Pelaksanaan monitoring ini mengacu pada data dan pelaporan melalui Aplikasi *Report Online* (ROL) adapun hasilnya sebagai berikut :

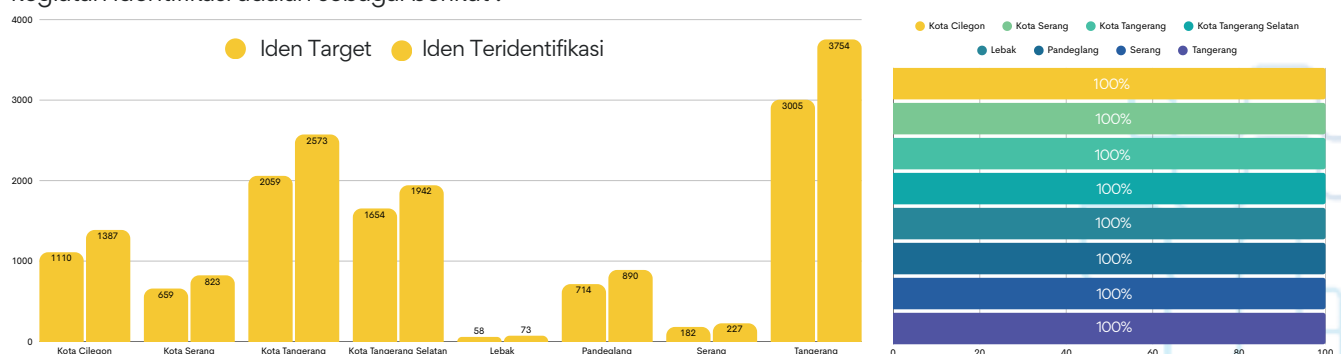


Sumber Data : <https://rol.postel.go.id/dashboard>

Dari tabel diatas Pelaksanaan 60% ISR (Izin Stasiun Radio) termonitor di 8 (delapan) Kabupaten/Kota Provinsi Banten ini mencerminkan bahwa kegiatan monitoring telah dilakukan secara terarah dan terukur melalui proses observasi, pendataan, serta verifikasi lapangan untuk memastikan penggunaan spektrum frekuensi radio berjalan sesuai ketentuan. Hasil monitoring yang diperoleh kemudian menjadi dasar penting dalam menjaga ketertiban pemanfaatan spektrum, mencegah potensi gangguan, dan memastikan optimalisasi layanan komunikasi di wilayah Provinsi Banten.

Dengan demikian, kinerja monitoring pada tahun 2025 menunjukkan komitmen Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang dalam menjalankan fungsi pengawasan spektrum radio secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

3. Berdasarkan hasil monitoring Spektrum Frekuensi Radio (SFR) selama tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang telah berhasil mencapai tingkat identifikasi sebesar 80% dari total hasil monitoring yang dilakukan. Capaian ini merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa setiap penggunaan spektrum frekuensi radio yang terobservasi dapat diverifikasi, dicatat, serta dipastikan kesesuaiannya dengan ketentuan perizinan dan parameter teknis yang berlaku. Kegiatan identifikasi dilakukan secara bertahap melalui proses observasi lapangan, verifikasi data teknis, serta pencocokan dengan basis data perizinan. Dari keseluruhan hasil observasi di berbagai pita frekuensi, proporsi terbesar telah teridentifikasi dengan baik, menunjukkan bahwa proses monitoring berjalan efektif dan mampu memberikan gambaran nyata terkait kondisi penggunaan spektrum di wilayah pengawasan. Adapun hasil kegiatan identifikasi adalah sebagai berikut :



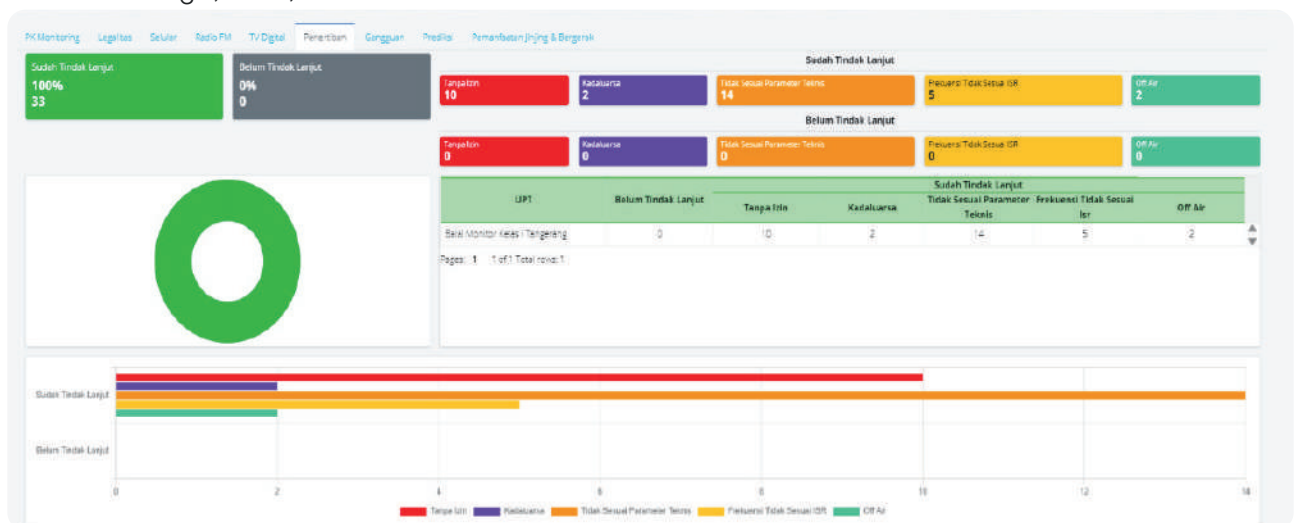
Dapat disimpulkan bahwa Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang telah melaksanakan kegiatan Identifikasi Hasil Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebesar 80%, sesuai dengan target yang ditetapkan melalui Aplikasi *Report Online* (ROL). Pelaksanaan identifikasi ini merupakan bagian dari indikator kinerja yang ditetapkan oleh Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital, yang mensyaratkan bahwa hasil monitoring harus teridentifikasi secara optimal.

Berdasarkan data capaian, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang berhasil mencapai 100% realisasi, menunjukkan bahwa seluruh proses identifikasi hasil monitor telah dilaksanakan secara lengkap, tepat waktu, dan sesuai ketentuan. Capaian ini menggambarkan komitmen UPT dalam menjaga ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta mendukung kualitas pengendalian infrastruktur digital di wilayah Provinsi Banten.

4. Berdasarkan hasil monitoring Spektrum Frekuensi Radio yang teridentifikasi selama tahun berjalan, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang telah melaksanakan tindak lanjut peneraan sanksi sebesar 100% terhadap seluruh temuan pelanggaran yang tercatat. Setiap pelanggaran yang ditemukan melalui proses observasi, identifikasi, dan verifikasi teknis ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses tindak lanjut dilakukan melalui pemberian peringatan, klarifikasi kepada pengguna frekuensi, penyusunan berita acara, hingga rekomendasi penegakan hukum apabila diperlukan. Seluruh langkah tindak lanjut ini tercatat dan diadministrasikan melalui Aplikasi *Report Online* (ROL), sehingga memastikan transparansi, akuntabilitas, serta ketepatan waktu dalam penanganan setiap temuan.

Capaian 100% tersebut menunjukkan komitmen Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang dalam menjaga ketertiban spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Banten, sekaligus mendukung sasaran program Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan penegakan kepatuhan terhadap penggunaan spektrum secara legal, aman, dan efisien.



**Gambar 3.4 Dashboard Identifikasi Hasil Monitoring SFR di Kabupaten/Kota Tahun 2025**

Sumber Data : <https://rol.postel.go.id/dashboard>

Berdasarkan hasil monitoring Spektrum Frekuensi Radio yang telah dilaksanakan selama tahun berjalan, seluruh temuan pelanggaran yang teridentifikasi telah ditindaklanjuti secara optimal. Dari total 33 temuan, 100% telah diberikan tindakan sesuai ketentuan, dan temuan tersebut semuanya sudah ditindaklanjuti.

Capaian ini menunjukkan bahwa Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang telah melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan regulasi dengan sangat efektif, responsif, serta selaras dengan target kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan penyelesaian seluruh pelanggaran tersebut menjadi indikator bahwa proses monitoring, verifikasi, dan tindak lanjut telah berjalan secara terukur, cepat, dan tepat sasaran.

5. Dalam rangka memastikan kualitas pengawasan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja Provinsi Banten, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang secara konsisten melaksanakan observasi dan identifikasi terhadap seluruh stasiun tetap/*transportable* yang beroperasi di setiap Kabupaten/Kota.

Sebagai bentuk pemenuhan indikator kinerja, setiap stasiun tetap/*transportable* wajib diobservasi dan diidentifikasi minimal 1 (satu) kali setiap bulan. Pelaksanaan monitoring ini dilakukan melalui pemanfaatan perangkat monitoring berbasis *fixed station* maupun *transportable* unit, serta didukung oleh pencatatan dan pelaporan melalui Aplikasi *Report Online* (ROL).

Perhitungan capaian Monitoring Pita Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota dilakukan dengan mengacu pada formula berikut :

$$\text{Formula} : \frac{\text{Jumlah Kabupaten Kota Termonitor}}{\text{Jumlah Kabupaten Kota Wil. Kerja UPT}}$$

Syarat Kab/Kota Termonitor:

- 15 Pita Frekuensi Termonitor;
- ISR Termonitor;
- Hasil Monitor Teridentifikasi; dan
- Pengenaan Sanksi Terhadap Temuan Pelanggaran dari Hasil Monitor Teridentifikasi.

Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang pada tahun berjalan telah melaksanakan kegiatan monitoring secara menyeluruh di 8 (delapan) Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Banten, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon. Seluruh wilayah tersebut telah memenuhi kriteria sebagai Kabupaten/Kota Termonitor, yang mencakup pemenuhan monitoring 15 pita frekuensi, monitoring terhadap ISR, identifikasi hasil monitoring melalui Aplikasi ROL, serta pelaksanaan tindak lanjut atas seluruh temuan pelanggaran.

Formula perhitungan capaian Monitoring Pita Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota :

- Capaian = (Jumlah Kabupaten / Kota Termonitor / Jumlah Kabupaten / Kota Wilayah Kerja UPT)
- Capaian =  $(8 \div 8) = 100\%$

Dengan terpenuhinya seluruh indikator di seluruh Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Banten, maka capaian monitoring untuk indikator ini mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang telah menjalankan fungsi pengawasan spektrum secara optimal, komprehensif, dan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital. Capaian penuh tersebut sekaligus menggambarkan keberhasilan dalam menjaga ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Banten secara konsisten dan berkelanjutan.

### III. Analisa terkait Indikator Kinerja secara Umum dan Holistik

Pelaksanaan monitoring telah berperan penting dalam menjaga ketertiban, efisiensi, dan kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja. Secara umum, indikator kinerja tercermin dari kemampuan balai dalam melaksanakan pemantauan spektrum secara berkelanjutan, mendeteksi penggunaan frekuensi aktif, mengidentifikasi potensi serta kejadian interferensi, dan menindaklanjuti temuan penggunaan frekuensi yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan. Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan spektrum telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan.

Secara holistik, kinerja monitoring tidak hanya dinilai dari jumlah kegiatan atau temuan, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kepatuhan pengguna frekuensi dan terjaganya kualitas layanan komunikasi radio, khususnya pada layanan strategis dan prioritas.

Kegiatan monitoring di Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang turut mendukung stabilitas komunikasi radio, meminimalkan gangguan layanan, serta meningkatkan kesadaran pengguna terhadap pemanfaatan spektrum yang tertib dan bertanggung jawab. Selain itu, efisiensi operasional tercermin dari optimalisasi penggunaan perangkat monitoring, sinergi antara monitoring rutin, tematik, dan berbasis aduan, serta pemanfaatan hasil monitoring sebagai bahan pembinaan dan pengambilan keputusan.

### IV. Benchmarking Capaian Kinerja Dengan UPT Lainnya

Berdasarkan pendekatan *benchmarking*, persentase capaian Sasaran kinerja monitoring Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang dapat dibandingkan dengan Balai Monitor SFR Kelas I Medan sama-sama tercapai sebesar 125%.

| Nama IKU                                                      | UPT DJID         | Target | Capaian | Keterangan                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio | Balmon Tangerang | 80%    | 100%    | Persentase Capaian Balmon Tangerang dan Balmon Medan sama-sama mencapai 125% dan melampaui target. |
| Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio | Balmon Medan     | 80%    | 100%    | Persentase Capaian Balmon Tangerang dan Balmon Medan sama-sama mencapai 125% dan melampaui target. |

**Tabel 3.5 Benchmarking Capaian Kinerja Balmon Tangerang dengan Balmon Medan**

## V. Faktor Kendala / Hambatan pada Pencapaian Target

Dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang dihadapkan pada beberapa kendala struktural dan operasional yang mempengaruhi efektivitas pencapaian target kinerja. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan jangkauan perangkat monitoring terhadap wilayah dengan karakteristik geografis tertentu, meningkatnya kepadatan pemanfaatan spektrum seiring pertumbuhan layanan telekomunikasi, serta kebutuhan alokasi sumber daya yang lebih besar pada periode intensif.

Untuk memastikan target kinerja tetap tercapai, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang melakukan berbagai langkah percepatan, antara lain optimalisasi peran stasiun tetap/transportable dan stasiun jinjing, pelaksanaan monitoring berbasis prioritas pita frekuensi, serta penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan guna mempercepat proses identifikasi dan tindak lanjut temuan.

Implementasi langkah perbaikan tersebut memberikan dampak signifikan berupa meningkatnya efektivitas pemantauan, kecepatan respons terhadap temuan interferensi, serta meningkatnya kepatuhan pengguna spektrum sehingga capaian indikator dapat diraih secara maksimal dan konsisten.

## VI. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja pada kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pengendalian spektrum di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang. Melalui analisis data capaian, kecenderungan temuan, dan tingkat pemenuhan target indikator, laporan ini menjadi acuan untuk memperkuat strategi pengawasan, meningkatkan akurasi perencanaan monitoring, serta memastikan optimalisasi pemanfaatan perangkat SMFR dan stasiun jinjing di lapangan. Selain itu, hasil laporan kinerja digunakan sebagai bahan penyusunan rekomendasi teknis bagi Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital, penyempurnaan metode pemantauan berbasis digital, serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan daerah. Dengan adanya tindak lanjut ini, pelaksanaan monitoring di tahun berikutnya diharapkan semakin adaptif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio secara berkelanjutan.

## VII. Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya

Berdasarkan hasil evaluasi capaian tahun berjalan, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk peningkatan kinerja pada tahun mendatang.

- Meningkatkan akurasi dan kecepatan pelaporan melalui optimalisasi penggunaan Aplikasi Report Online (ROL) serta pemutakhiran data ISR secara berkala;
- Memperkuat kapasitas teknis SDM melalui pelatihan terkait pengoperasian perangkat monitoring, analisis spektrum, serta pemrosesan data pengawasan;
- Melakukan modernisasi perangkat monitoring, termasuk peningkatan keandalan stasiun tetap/transportable dan perangkat jinjing untuk menjangkau wilayah yang tidak terliput;
- Memperluas koordinasi lintas instansi guna mempercepat proses tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran. Implementasi rekomendasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengendalian spektrum, memperkecil potensi interferensi, serta memastikan tercapainya seluruh target kinerja secara lebih optimal di tahun berikutnya.

## VIII. Efisiensi

Pelaksanaan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota selama tahun berjalan mampu mencapai tingkat efisiensi yang baik melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia. Efisiensi dicapai dengan pemanfaatan perangkat monitoring (SMFR dan stasiun jinjing) secara terjadwal dan berbasis prioritas wilayah, pengaturan ulang pola kerja tim monitoring agar lebih terfokus, serta integrasi pelaporan melalui Aplikasi *Report Online* (ROL) yang mempercepat proses dokumentasi tanpa menambah beban operasional. Pemanfaatan anggaran dilakukan secara tepat sasaran, terutama pada kebutuhan operasional lapangan, sehingga kegiatan monitoring tetap berjalan efektif meskipun dengan keterbatasan sumber daya.

## IX. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang menerapkan nilai-nilai Budaya Kerja **BerAKHLAK** sebagai pedoman perilaku kerja sehari-hari guna memastikan tercapainya target indikator kinerja secara optimal.

Nilai **Berorientasi** Pelayanan diwujudkan melalui pemberian layanan pengawasan spektrum yang responsif, akurat, dan berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan. Nilai Akuntabel tercermin melalui pendokumentasian hasil monitoring secara lengkap dan pelaporan yang tepat waktu melalui aplikasi *Report Online* (ROL).

Penerapan nilai **Kompeten** dilakukan dengan meningkatkan keahlian petugas monitoring, pemanfaatan perangkat SMFR secara optimal, serta penguatan analisis terhadap temuan di lapangan. Nilai **Harmonis** dibangun melalui koordinasi yang efektif dengan pemerintah daerah, instansi pengguna frekuensi, serta pelaku industri, sehingga kegiatan monitoring dapat berjalan kondusif dan kolaboratif.

Nilai **Loyal** tampak dalam komitmen petugas untuk menjalankan penugasan monitoring di seluruh wilayah Kabupaten/Kota, meskipun menghadapi tantangan geografis dan teknis.

Nilai **Adaptif** diwujudkan melalui kemampuan petugas dalam menyesuaikan metode kerja dengan perkembangan teknologi serta dinamika penggunaan spektrum. Terakhir, nilai **Kolaboratif** diimplementasikan melalui sinergi antarunit, baik internal Ditjen Infrastruktur Digital maupun antar-UPT, dalam pemutakhiran data okupansi dan identifikasi frekuensi.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai **BerAKHLAK** dalam setiap tahapan kegiatan, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang mampu menjaga kualitas pengendalian spektrum frekuensi secara konsisten, mendukung pencapaian target kinerja, serta memperkuat tata kelola penyelenggaraan pengawasan spektrum secara efektif, profesional, dan berintegritas.

Berdasarkan uraian capaian di atas, indikator “**Persentase Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di UPT**” dinyatakan tercapai 100% sesuai Penetapan Kinerja. Hal ini ditunjukkan melalui keberhasilan Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang dalam menuntaskan monitoring pada 15 pita frekuensi, melaksanakan 60% ISR termonitor, memastikan 80% hasil monitoring teridentifikasi, serta menyelesaikan 100% tindak lanjut pengenaan sanksi terhadap temuan pelanggaran. Selain itu, seluruh stasiun tetap/transportable di Kabupaten/Kota telah diobservasi dan diidentifikasi secara rutin minimal satu kali setiap bulan. Capaian tersebut mencerminkan kinerja pengawasan spektrum yang efektif dan konsisten, sehingga indikator ini dapat disimpulkan terpenuhi sepenuhnya.



Gambar 3.5 Dokumentasi Kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

## 2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

| Kinerja                                                                                                          | Indikator Kinerja         | Target | Capaian | Persentase |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------|------------|
| Meningkatnya kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio, perangkat telekomunikasi, dan infrastruktur digital | Pemeriksaan Stasiun Radio | 100%   | 100%    | 100%       |

**Tabel 3.6 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio**

Indikator Kinerja Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio menetapkan target realisasi sebesar 100% pada tahun 2025. Berdasarkan data capaian hingga akhir Desember 2025, diketahui bahwa realisasi indikator tersebut telah mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Indikator ini mampu menyerap anggaran sebesar Rp.190.719.400,- (100%) dari pagu anggaran non-blokir sebesar Rp.190.720.000,- Tingkat serapan yang sangat optimal dengan capaian kinerja melampaui target menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan efisien, dengan pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

### I. Latar Belakang, Maksud, dan Tujuan

Pemeriksaan stasiun radio yang terdiri dari Pemeriksaan *Microwave Link* melalui *remote site* dan *open shelter*, Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Radio FM dan Televisi Digital merupakan bagian penting dari kegiatan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh penggunaan frekuensi radio mempunyai dan beroperasi sesuai dengan ISR (Izin Stasiun Radio), menggunakan alat/perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat, tertib, serta bebas dari potensi gangguan (*interference*) yang dapat merugikan pengguna lainnya.



Gambar 3.6 Kegiatan Pengukuran SFR

Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang mendapatkan target kinerja sebesar 100% dari total beban kerja yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, yaitu sebanyak 2.547 sampling pemeriksaan *microwave link*. Sampling target tersebut terdiri dari 2.247 *remote site* dan 419 *open shelter*. Selain itu ada juga 62 Stasiun Radio FM dan 11 Stasiun TV Digital yang harus dilakukan inspeksi serta verifikasi.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pemeriksaan dan pengukuran parameter teknis dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian untuk melakukan audit pada pengguna spektrum frekuensi radio, sehingga dapat dipastikan bahwa setiap pengguna frekuensi radio telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) dan memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

### II. Sasaran Kegiatan

Berikut merupakan rangkaian sasaran kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio Stasiun Radio yang dilaksanakan oleh UPT selama Tahun 2025. Kegiatan ini ditetapkan dengan target capaian 100%, dan seluruh target tersebut berhasil tercapai 100%. Adapun sasaran kegiatannya adalah sebagai berikut :

#### 1. Pemeriksaan *Microwave link* melalui *Remote Site*

Direktur Pengendalian DJID menetapkan sebanyak 2.247 target sampling *remote site* yang terdapat pada aplikasi <https://apstard.postel.go.id/>. Target tersebut terdiri dari penggunaan *microwave link* seluler dan non seluler yang menjadi objek pengawasan yang

harus dilakukan pemeriksaan minimal 80% dari total target *remote site*.

#### 2. Pemeriksaan *Microwave link* melalui *Open Shelter*

Direktur Pengendalian DJID menetapkan sebanyak 419 target sampling *open shelter* yang terdapat pada aplikasi <https://apstard.postel.go.id/>. Target tersebut terdiri dari penggunaan *microwave link* seluler dan non seluler yang menjadi objek pengawasan yang harus dilakukan pemeriksaan minimal 60% dari total target *open shelter*.

### 3. Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Radio FM

Sebanyak 62 Izin Stasiun Radio (ISR) di wilayah Provinsi Banten menjadi objek kegiatan pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar untuk layanan radio siaran FM. Pada Perjanjian Kinerja 2025 ditetapkan sekurang-kurangnya 50 Stasiun Radio Siaran FM untuk UPT yang mempunyai ISR stasiun Radio FM lebih dari 50.

### 4. Pengukuran parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Radio TV Digital

Sebanyak 11 stasiun televisi digital di wilayah Provinsi Banten menjadi objek pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar untuk memastikan bahwa seluruh layanan siaran digital beroperasi sesuai standar yang telah ditetapkan. Pengukuran ini meliputi verifikasi kesesuaian antara parameter teknis pemancaran dan data perizinan, serta pengecekan potensi gangguan terhadap layanan lainnya. Melalui kegiatan ini, Balai Monitor memastikan bahwa pemanfaatan frekuensi untuk siaran televisi digital di Banten berjalan dengan tertib, efisien, dan sesuai ketentuan, sehingga kualitas layanan siaran bagi masyarakat dapat terjaga dengan baik.

## III. Capaian Target

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio dan Pengenaan Sanksi Pelanggaran Terhadap Pemeriksaan Stasiun Radio di UPT ditetapkan dengan target realisasi sebesar 100%. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan hingga akhir Desember 2025, seluruh target tersebut berhasil dicapai secara 100%, sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian ini menunjukkan bahwa proses pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan ketentuan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio telah dilaksanakan secara optimal dan konsisten di seluruh wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang.

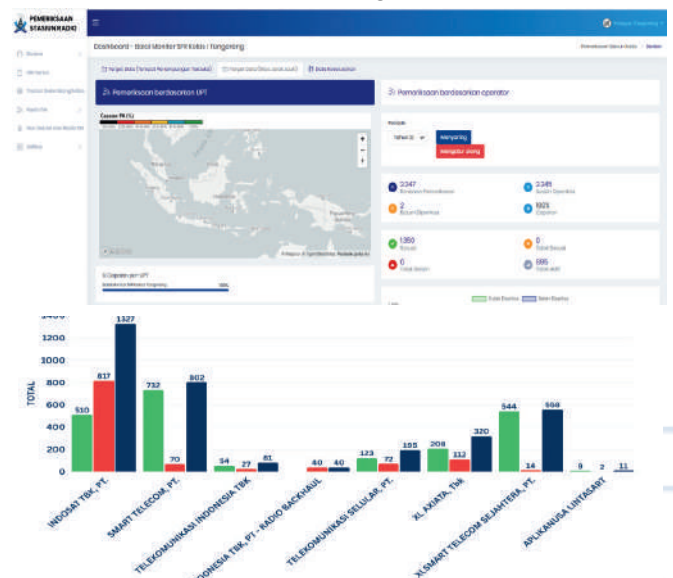
| Sasaran Program                                                                                                 | Indikator Kinerja Sasaran Program                                                             | 2021   |           | 2022   |           | 2023   |           | 2024   |           | 2025   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                                                                                                                 |                                                                                               | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Meningkatnya kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio, perangkat telekomunikasi dan infrastruktur digital | Pemeriksaan Stasiun Radio dan Pengenaan Sanksi Pelanggaran Terhadap Pemeriksaan Stasiun Radio | 50%    | 100%      | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      |

**Tabel 3.7 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio dan Pengenaan Sanksi Pelanggaran**

Pelaksanaan kegiatan selama periode 2021–2025, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Pemeriksaan Stasiun Radio telah mencapai hasil yang sangat optimal. Seluruh target kinerja, baik yang ditetapkan sebesar 50% pada tahun 2021 maupun 100% pada tahun 2022 hingga 2025, berhasil direalisasikan sepenuhnya dengan capaian 100% setiap tahunnya.

Capaian ini menunjukkan bahwa UPT secara konsisten mampu melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dengan baik, termasuk pemeriksaan legalitas, verifikasi parameter teknis, dan penegakan sanksi atas pelanggaran yang ditemukan. Konsistensi tersebut menjadi indikator bahwa kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio, perangkat telekomunikasi, serta infrastruktur digital terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan demikian, kinerja UPT dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dinyatakan sangat efektif, akuntabel, dan mendukung terwujudnya tertib penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja.

Adapun hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



Sumber data : <https://apstard.postel.go.id/dashboard>

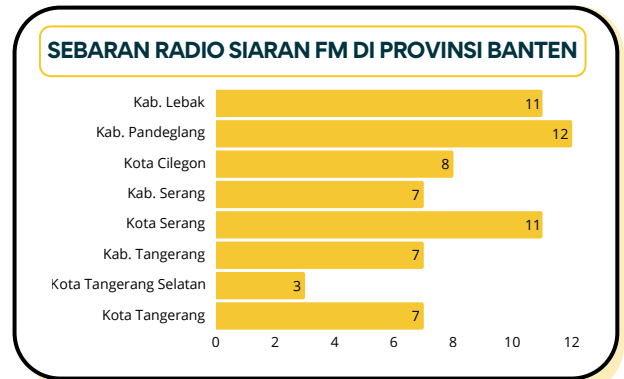
1. Dari hasil pelaksanaan kegiatan *remote site* di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2025, diketahui bahwa dari total 2.247 yang menjadi target pemeriksaan, seluruhnya telah dilakukan proses pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, diperoleh data bahwa sebanyak 1.352 lokasi (seribu tiga ratus lima puluh dua) berada dalam kondisi sesuai dengan ISR dan beroperasi sesuai perizinan yang berlaku. Sementara itu, sebanyak 895 lokasi (delapan ratus sembilan puluh lima) tercatat dalam kondisi tidak aktif (*off air*). Data ini memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat kepatuhan serta kondisi aktual penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Banten, sekaligus menjadi dasar penting untuk analisis, evaluasi, serta langkah tindak lanjut pengawasan pada periode berikutnya.
2. Dari hasil pelaksanaan kegiatan *open shelter* di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2025, diketahui bahwa dari total 419 yang menjadi target pemeriksaan, seluruhnya telah berhasil dilakukan pemantauan dan verifikasi kondisi penggunaan spektrum frekuensi radio. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) tercatat sesuai dengan ISR, yaitu beroperasi sesuai ketentuan perizinan yang berlaku. Sementara itu, sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) ditemukan dalam kondisi tidak aktif (*off air*), sehingga tidak terdeteksi adanya aktivitas pemancaran pada frekuensi yang telah terdaftar. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan pemeriksaan open shelter telah berjalan efektif dan memberikan gambaran nyata mengenai kondisi infrastruktur serta tingkat kepatuhan pengguna spektrum di wilayah Provinsi Banten. Data tersebut juga menjadi dasar penting bagi penyusunan rekomendasi dan langkah tindak lanjut pengawasan pada periode selanjutnya. Adapun hasil *open shelter* adalah sebagai berikut:



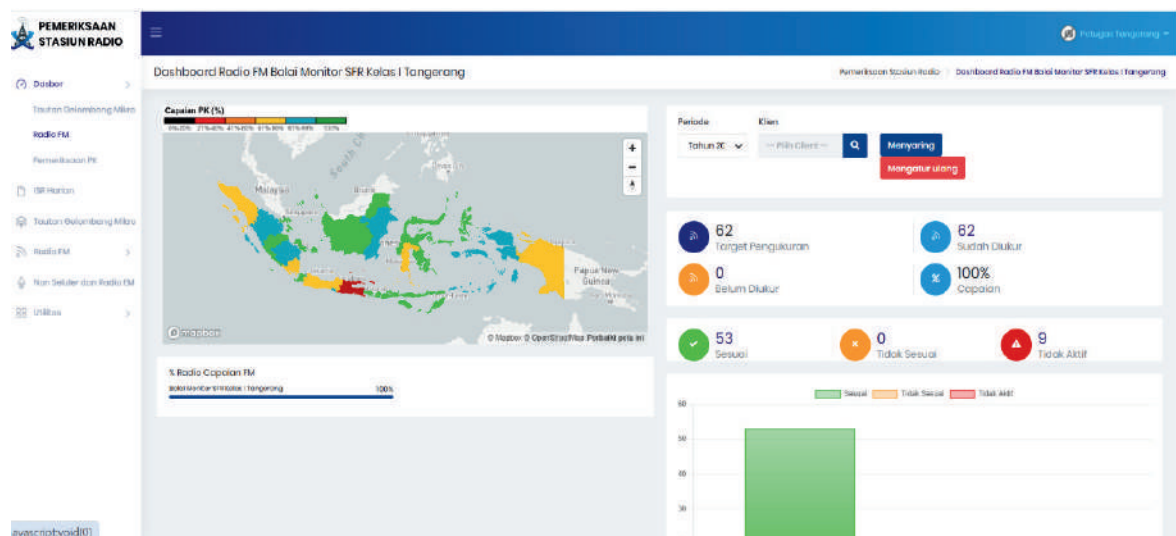
Sumber data : <https://apstard.postel.go.id/dashboard>

3. Dari hasil kegiatan pengukuran stasiun radio siaran FM di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2025, diketahui bahwa berdasarkan target pada Aplikasi Pemeriksaan Stasiun Radio (APSTARD), terdapat 62 (enam puluh dua) Izin Stasiun Radio (ISR), radio siaran FM yang harus dilakukan pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar. Seluruh objek pemeriksaan tersebut telah dilakukan proses pengukuran secara menyeluruh, meliputi verifikasi kesesuaian frekuensi, daya pancar, deviasi, *bandwidth*, serta parameter teknis lainnya yang menjadi acuan dalam penilaian kepatuhan terhadap izin yang diterbitkan.

Hasil pengukuran tersebut tersaji sebagai berikut :



**Tabel 3.8 Sebaran Radio Siaran FM di Prov. Banten**



Sumber data : <https://apstard.postel.go.id/dashboard>

4. Dari hasil kegiatan Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Televisi Digital di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2025, diketahui bahwa terdapat 11 (sebelas) Izin Stasiun Radio (ISR) TV Digital yang menjadi target pemeriksaan sesuai data pada sistem perizinan. Seluruh stasiun TV Digital tersebut telah dilakukan proses pengukuran meliputi parameter teknis utama, seperti kekuatan daya pancar, ketepatan frekuensi, kualitas modulasi, lebar pita, serta stabilitas sinyal. Pengukuran ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pemancar TV Digital beroperasi sesuai dengan izin yang berlaku dan memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan. Adapun hasil pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

| No. | Tanggal Pelaksanaan | Wilayah Layanan | Nama Penyelenggara Layanan Multipleksing             | Kanal | Status |
|-----|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1   | 20/05/2025          | Banten - 1      | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | 38    | ON AIR |
| 2   | 21/05/2025          | Banten - 1      | SURYA CITRA TELEVISI, PT                             | 29    | ON AIR |
| 3   | 20/05/2025          | Banten - 1      | TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA, PT                  | 44    | ON AIR |
| 4   | 20/05/2025          | Banten - 1      | LATIVI MEDIA KARYA, PT                               | 41    | ON AIR |
| 5   | 20/04/2025          | Banten - 1      | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | 38    | ON AIR |
| 6   | 20/05/2025          | Banten - 2      | LATIVI MEDIA KARYA, PT                               | 39    | ON AIR |
| 7   | 21/05/2025          | Banten - 2      | TVRI SAKETI                                          | 28    | ON AIR |
| 8   | 21/05/2025          | Banten - 2      | SURYA CITRA TELEVISI, PT                             | 34    | ON AIR |
| 9   | 20/05/2025          | Banten - 2      | TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA, PT                  | 42    | ON AIR |
| 10  | 21/05/2025          | Banten - 3      | TVRI BAYAH                                           | 30    | ON AIR |
| 11  | 20/05/2025          | Banten - 3      | SURYA CITRA TELEVISI, PT                             | 39    | ON AIR |

**Tabel 3.9 Hasil Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Televisi Digital**

4. Berdasarkan hasil monitoring dan pemeriksaan yang telah dilaksanakan, seluruh temuan pelanggaran berhasil ditindaklanjuti secara menyeluruh. Dari total 17 pelanggaran yang teridentifikasi, seluruhnya telah ditangani 100% melalui proses klarifikasi, peneguran, serta langkah administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Capaian ini menunjukkan komitmen Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang dalam memastikan kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio, sekaligus menjadi indikator bahwa mekanisme pengawasan dan penindakan telah berjalan efektif, responsif, dan sesuai standar operasional yang ditetapkan. Dengan terselesaikannya seluruh tindak lanjut tersebut, diharapkan potensi gangguan dan penyalahgunaan frekuensi dapat diminimalkan sehingga kualitas layanan komunikasi tetap terjaga optimal.



Sumber data : <https://apstard.postel.go.id/dashboard>

Perhitungan capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio dan Pengenaan Sanksi Pelanggaran Terhadap Pemeriksaan Stasiun Radio dilakukan dengan mengacu pada formula berikut :

#### Formula

$$\frac{\text{Jumlah yang dilakukan pemeriksaan stasiun radio} + \text{data tindak lanjut temuan pelanggaran hasil pemeriksaan stasiun radio yang dikenakan sanksi}}{\text{Total data target pemeriksaan stasiun radio sesuai perhitungan data sampling} + \text{total data pelanggaran pemeriksaan stasiun radio}} \times 100\%$$

$$\text{Perhitungan} = (419+2115+11+62+17) : (251)+(1797)+11+62+17 \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan tabel di atas, hingga bulan Desember 2025, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang telah menyelesaikan seluruh kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio dan Pengenaan Sanksi Pelanggaran Terhadap Pemeriksaan Stasiun Radio dengan capaian 100,00%.

Capaian penuh ini menunjukkan bahwa seluruh target pemeriksaan, verifikasi data teknis, hingga tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran telah dilaksanakan secara optimal, sesuai standar operasional, dan memenuhi indikator kinerja yang ditetapkan. Hal ini sekaligus menjadi bukti komitmen UPT dalam memastikan ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Banten.

#### IV. Analisa yang terkait Indikator Kinerja Secara Umum dan Holistik

Secara umum menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan telah berfungsi sebagai instrumen pengawasan untuk memastikan kepatuhan pengguna frekuensi radio terhadap ketentuan perizinan dan parameter teknis yang ditetapkan. Indikator kinerja utama tercermin dari kemampuan balai dalam melaksanakan pemeriksaan stasiun radio secara terencana dan berkelanjutan, mencakup kesesuaian penggunaan frekuensi, kelengkapan perizinan, serta kepatuhan terhadap aspek teknis seperti daya pancar, kanal frekuensi, dan lokasi stasiun. Hasil pemeriksaan menjadi dasar penting dalam menilai tingkat kepatuhan pengguna dan efektivitas pengawasan spektrum di wilayah kerja.

Secara holistik, kinerja pemeriksaan stasiun radio tidak hanya diukur dari jumlah pemeriksaan atau temuan, tetapi dari dampaknya terhadap peningkatan ketertiban spektrum dan kualitas layanan komunikasi. Kegiatan di Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang berperan dalam mencegah interferensi, menekan pelanggaran berulang, serta meningkatkan kepatuhan pengguna. Sinergi antara pemeriksaan, monitoring, dan tindak lanjut pembinaan maupun penegakan hukum menunjukkan pengawasan yang terpadu dan efektif dalam pengelolaan spektrum.

#### V. Benchmarking Capaian Kinerja Dengan UPT Lainnya

Berdasarkan pendekatan benchmarking, persentase capaian Sasaran kinerja pemeriksaan stasiun radio Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang dapat dibandingkan dengan Balai Monitor SFR Kelas I Medan sama-sama tercapai sebesar 100% sehingga menunjukkan kinerja yang optimal dan sesuai target.

| UPT              | Target | Capaian |
|------------------|--------|---------|
| Balmon Tangerang | 100%   | 100%    |
| Balmon Jakarta   | 100%   | 100%    |
| Balmon Mataram   | 100%   | 100%    |

Tabel 3.10 Benchmarking Capaian Kinerja dengan UPT lainnya

## VI. Faktor Kendala/Hambatan pada Pencapaian Target

Pelaksanaan Pemeriksaan Stasiun Radio dan Pengenaan Sanksi Tahun 2025 secara umum berjalan baik meskipun terdapat kendala, seperti akses ke lokasi terpencil, stasiun dalam kondisi off air, keterbatasan petugas di lokasi, serta perbedaan data lapangan dengan SIMS/ISR.

Meski demikian, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang tetap berhasil mencapai target kinerja 100% melalui perencanaan yang terstruktur, optimalisasi perangkat monitoring, dan koordinasi yang baik dengan pemegang ISR.

Ke depan, dilakukan perbaikan melalui perencanaan rute yang lebih efektif, pemutakhiran data, peningkatan koordinasi, optimalisasi perangkat portable, serta penegakan sanksi yang tegas guna mendukung pengelolaan spektrum yang tertib dan efisien di Provinsi Banten.

## VII. Tindak Lanjut

Tindak lanjut atas hasil kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio dan Pengenaan Sanksi Pelanggaran dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa seluruh temuan dapat ditangani dengan tepat dan sesuai ketentuan. Setiap pelanggaran yang teridentifikasi melalui proses pemeriksaan, baik terkait ketidaksesuaian parameter teknis, penggunaan perangkat tanpa ISR, maupun operasional yang tidak sesuai izin, ditindaklanjuti melalui pemberian peringatan tertulis, permintaan klarifikasi kepada penyelenggara, serta penyusunan berita acara pemeriksaan. Untuk pelanggaran yang bersifat berat atau berulang, rekomendasi penerapan sanksi administratif hingga penegakan hukum disampaikan kepada Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital. Seluruh proses tindak lanjut terdokumentasi dalam sistem pelaporan elektronik sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga. Upaya tindak lanjut ini menjadi bagian penting dalam memastikan kepatuhan pengguna frekuensi serta menjaga ketertiban spektrum di wilayah Provinsi Banten.

## VIII. Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemeriksaan pada tahun-tahun berikutnya, beberapa rekomendasi perbaikan perlu diterapkan.

- Diperlukan pemutakhiran data perizinan ISR dan SIMS secara berkala agar proses verifikasi di lapangan lebih efektif dan mengurangi perbedaan data teknis;
- Peningkatan koordinasi dengan penyelenggara layanan radio dan televisi sebelum pemeriksaan sangat penting untuk memastikan perangkat dalam kondisi aktif sehingga pengukuran parameter teknis dapat dilakukan secara optimal;
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan pengetahuan regulasi akan memperkuat kemampuan petugas dalam melakukan analisis serta penanganan pelanggaran. Selain itu, optimalisasi perangkat monitoring portable dan peninjauan ulang rute pemeriksaan dapat mempercepat proses pengawasan pada lokasi yang sulit dijangkau. Implementasi rekomendasi ini diharapkan meningkatkan efektivitas pengendalian spektrum frekuensi radio pada tahun berikutnya.

## IX. Efisiensi

Upaya efisiensi dalam pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio terus dilakukan guna memastikan penggunaan sumber daya secara optimal tanpa mengurangi kualitas pengawasan. Kegiatan pemeriksaan dirancang menggunakan pendekatan *prioritization based on risk*, di mana lokasi dengan potensi pelanggaran lebih tinggi diprioritaskan untuk diperiksa terlebih dahulu. Penggunaan perangkat monitoring yang lebih responsif dan portable memungkinkan proses pemeriksaan berlangsung lebih cepat dan fleksibel, terutama pada wilayah dengan akses yang sulit. Selain itu, integrasi data pemeriksaan ke dalam sistem digital seperti SIMS, APSTARD, dan ROL turut mempercepat proses pelaporan, mengurangi administrasi manual, dan meningkatkan akurasi data. Koordinasi tim yang efektif serta pengaturan rute pemeriksaan yang efisien juga berkontribusi pada penghematan waktu dan biaya operasional. Dengan langkah-langkah ini, kegiatan pemeriksaan dapat terlaksana secara maksimal dengan sumber daya yang tetap terjaga efisiensinya.

## X. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Stasiun Radio dan Pengenaan Sanksi Pelanggaran, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang mengimplementasikan nilai-nilai **BerAKHLAK** sebagai pedoman etika dan budaya kerja. Nilai Berorientasi **Pelayanan** diwujudkan melalui pelayanan yang responsif dan informatif kepada penyelenggara saat proses pemeriksaan berlangsung. Akuntabel ditunjukkan melalui pencatatan setiap hasil pemeriksaan secara transparan dalam sistem pelaporan resmi. Nilai Kompeten tercermin melalui peningkatan kapasitas petugas dalam memahami

aspek teknis dan regulasi. Harmonis diwujudkan dengan menjaga komunikasi yang baik dengan para pemilik ISR maupun instansi terkait. Loyal terlihat dalam komitmen petugas menjalankan mandat pengawasan secara konsisten. Nilai **Adaptif** ditunjukkan melalui pemanfaatan teknologi digital dan metode pemeriksaan yang fleksibel. Terakhir, nilai Kolaboratif diwujudkan melalui kerja sama yang solid antarunit, baik di internal Balai Monitor maupun dengan Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital. Implementasi nilai-nilai **BerAKHLAK** ini menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas, integritas, dan profesionalitas kegiatan pengawasan spektrum frekuensi radio.

Berdasarkan uraian serta hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja **“Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio”** telah tercapai sepenuhnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang ditetapkan.

Pencapaian ini terlihat dari terlaksananya pemeriksaan pada seluruh sasaran secara menyeluruh, mulai dari remote site, open shelter, stasiun radio siaran FM, hingga stasiun televisi digital. Setiap temuan pelanggaran juga telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan, memastikan tidak ada pelanggaran yang dibiarkan tanpa penyelesaian.

Dengan demikian, indikator ini dinyatakan mencapai **100%**, yang menunjukkan komitmen kuat Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang dalam menjaga ketertiban penggunaan spektrum frekuensi, meningkatkan efektivitas pengendalian, serta menjamin kepatuhan terhadap ketentuan perizinan di wilayah kerja Provinsi Banten.



Gambar 3.7 Dokumentasi Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio dan Pengenaan Sanksi Pelanggaran Terhadap Pemeriksaan Stasiun Radio

### 3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

| Kinerja                                                                                                          | Indikator Kinerja                            | Target | Capaian | Persentase |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------|------------|
| Meningkatnya kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio, perangkat telekomunikasi, dan infrastruktur digital | Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio | 95%    | 100%    | 105.26%    |

Tabel 3.11 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Indikator Kinerja Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio memiliki target 95%. Hingga akhir Desember 2025, realisasi mencapai 100%, yang menunjukkan seluruh gangguan yang dilaporkan berhasil ditangani dan capaian kinerja melampaui target yang telah ditetapkan.

Indikator ini mampu menyerap anggaran sebesar Rp.77.832.600,- (100%) dari pagu anggaran non-blokir sebesar Rp.77.833.000,- Tingkat serapan yang sangat optimal dengan capaian kinerja melampaui target menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan efisien, dengan pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

### I. Latar Belakang, Maksud, dan Tujuan

Salah satu bentuk pelayanan prima terhadap pengguna spektrum frekuensi radio adalah pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan oleh Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang. Kegiatan ini merupakan fungsi strategis yang dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keteraturan penggunaan frekuensi serta melindungi masyarakat dari berbagai potensi interferensi yang dapat mengganggu operasional stasiun radio berizin.

Gambar 3.8 Kegiatan Penanganan Gangguan SFR



Penanganan gangguan frekuensi radio dilakukan melalui serangkaian langkah yang terstruktur, mulai dari penerimaan laporan, identifikasi sumber gangguan, pelaksanaan monitoring lapangan, hingga penindakan atau penertiban terhadap perangkat yang terbukti menimbulkan interferensi. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap laporan gangguan dapat terselesaikan secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur teknis maupun regulasi yang berlaku.

Maksud dari kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio ini adalah untuk menjaga kualitas layanan komunikasi dan memastikan pemanfaatan spektrum frekuensi radio berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuannya yaitu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan interferensi terhadap stasiun radio berizin, memastikan pelayanan publik memenuhi standar *Key Performance Indicator* (KPI), serta menghentikan atau menertibkan sumber-sumber interferensi yang berasal dari perangkat ilegal atau perangkat yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta lingkungan spektrum yang aman, tertib, dan bebas dari gangguan sehingga seluruh pengguna frekuensi radio dapat beroperasi secara optimal dan tidak saling merugikan, sekaligus mendukung efisiensi pemanfaatan spektrum sebagai sumber daya terbatas yang bernilai strategis.

Melalui upaya penanganan gangguan yang konsisten, profesional, dan berbasis teknologi, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik serta menciptakan ekosistem komunikasi yang tertib, efisien, dan reliabel bagi seluruh pengguna spektrum frekuensi radio.

Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio adalah terwujudnya kondisi spektrum frekuensi yang tertib, aman, dan bebas dari interferensi yang dapat menghambat penyelenggaraan layanan komunikasi. Kegiatan ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap laporan gangguan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Selain itu, sasaran kegiatan mencakup peningkatan efektivitas pengawasan terhadap perangkat pemancar yang berpotensi menimbulkan interferensi, baik akibat penggunaan perangkat tanpa izin, ketidaksesuaian parameter teknis, maupun pelanggaran terhadap ketentuan perizinan. Dengan tercapainya sasaran tersebut, pemanfaatan spektrum frekuensi radio diharapkan dapat berlangsung secara optimal, efisien, serta memberikan kepastian dan perlindungan bagi seluruh pengguna yang telah memperoleh hak penggunaan spektrum dari pemerintah.



## II. Capaian Target

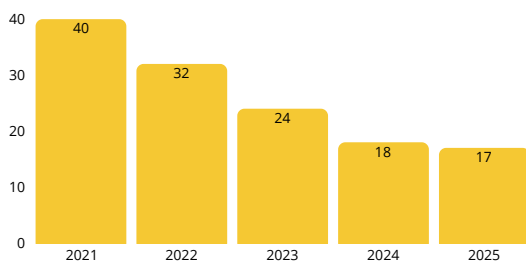
Indikator Kinerja Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio menetapkan target realisasi sebesar 95% pada tahun 2025. Berdasarkan hasil pelaksanaan sampai dengan akhir Desember 2025, diketahui bahwa capaian penanganan gangguan telah mencapai 100%.

| Sasaran Program                                                                                                 | Indikator Kinerja Sasaran Program            | 2021   |           | 2022   |           | 2023   |           | 2024   |           | 2025   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                                                                                                                 |                                              | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Meningkatnya kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio, perangkat telekomunikasi dan infrastruktur digital | Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio | 97%    | 100%      | 98%    | 100%      | 99%    | 100%      | 100%   | 100%      | 95%    | 100%      |

**Tabel 3.12 Hasil Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio**

Berdasarkan data kinerja tahun 2021–2025, indikator Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio menunjukkan capaian yang sangat baik. Seluruh target tahunan berhasil dipenuhi bahkan melampaui, dengan realisasi 100% setiap tahun. Pada 2025, meskipun target ditetapkan sebesar 95%, realisasi tetap mencapai 100%. Hal ini mencerminkan konsistensi dan efektivitas pengendalian spektrum frekuensi radio serta komitmen dalam memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat.

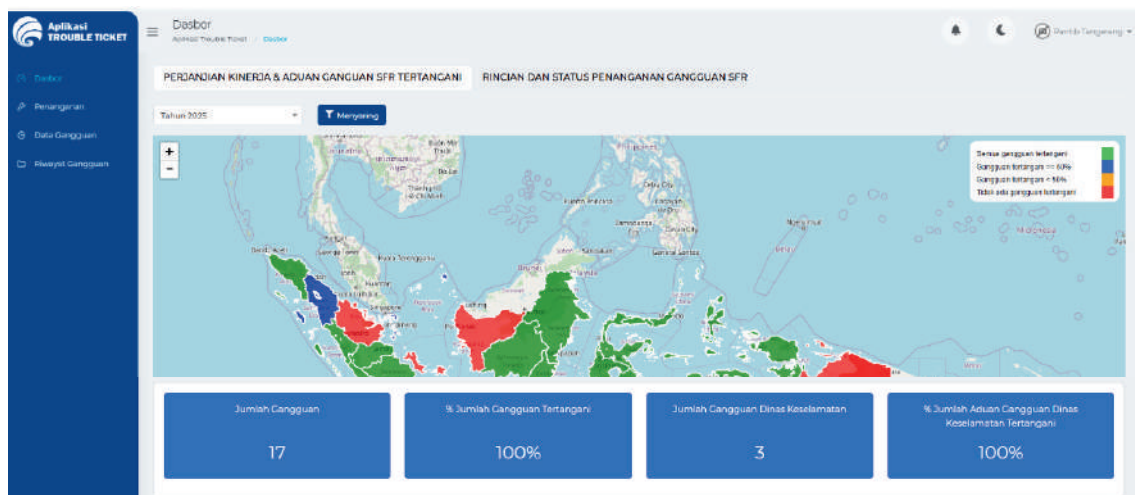
### Total Jumlah Laporan Gangguan Per Tahun



Berdasarkan grafik Total Jumlah Laporan per Tahun, terlihat adanya tren penurunan jumlah laporan gangguan spektrum frekuensi radio dari tahun 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 40 laporan, kemudian menurun menjadi 32 laporan pada tahun 2022. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan 24 laporan, serta kembali turun menjadi 18 laporan pada tahun 2024. Pada tahun 2025, jumlah laporan tercatat sebanyak 17 laporan, yang menjadi angka terendah dalam lima tahun terakhir.

Sumber data : <https://laporgangguansfr.postel.go.id>

Penurunan jumlah laporan ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dalam pengawasan spektrum, peningkatan kepatuhan pengguna frekuensi, serta keberhasilan upaya preventif dalam meminimalkan potensi interferensi. Selain itu, hal ini juga mencerminkan kualitas layanan monitoring dan pengendalian spektrum yang semakin baik dari tahun ke tahun.



Sumber data : <https://laporgangguansfr.postel.go.id>

| No. | Nomor Tiket  | Data Terganggu                                           |                 |                |                        | Status Aduan |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------|
|     |              | Nama <i>Client</i>                                       | Frekuensi (MHz) | Jenis Gangguan | Kab/Kota               |              |
| 1.  | 17202511-760 | SINAR MASANDA INDUSTRI, PT.                              | 167,55          | Lainnya        | Kabupaten Tangerang    | Clear        |
| 2.  | 17202511-389 | INDOSAT TBK, PT.                                         | 900             | Lainnya        | Kabupaten Tangerang    | Clear        |
| 3.  | 10202511-309 | TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT.                              | 880             | Noise          | Kabupaten Tangerang    | Clear        |
| 4.  | 06202511-890 | SHINKO PLANTECH, PT.                                     | 431,75          | Suara          | Kota Cilegon           | Clear        |
| 5.  | 22202509-380 | PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk                         | 130,31          | Lainnya        | Kota Cilegon           | Clear        |
| 6.  | 21202509-718 | PERUM LPPNPI CABANG HALIM                                | 122,1           | Suara          | Kota Tangerang Selatan | Clear        |
| 7.  | 04202509-678 | Cathy Salfera Paais                                      | 172             | Noise          | Kota Tangerang Selatan | Clear        |
| 8.  | 04202507-208 | Cathy Salfera Paais                                      | 107,7           | Noise          | Kota Tangerang Selatan | Clear        |
| 9.  | 24202506-572 | ROHM AND HAAS INDONESIA, PT.                             | 144,73          | Suara          | Kota Cilegon           | Clear        |
| 10. | 11202506-493 | Cathy Salfera Paais                                      | 430,65          | Suara          | Kota Tangerang Selatan | Clear        |
| 11. | 10202504-348 | Airnav Indonesia cabang JATSC                            | 121,75          | Suara          | Kota Tangerang         | Clear        |
| 12. | 20202503-662 | Airnav Indonesia cabang JATSC                            | 132,7           | Suara          | Kota Tangerang         | Clear        |
| 13. | 10202503-426 | INDONESIA NIPPON SEIKI, PT.                              | 172             | Suara          | Kabupaten Serang       | Clear        |
| 14. | 25202502-179 | PERKUMPULAN PENYIARAN RADIO KOMUNITAS ANAK MUDA BALARAJA | 107,7           | Suara          | Kabupaten Tangerang    | Clear        |
| 15. | 15202501-126 | PT. SMART TELECOM                                        | 144,73          | Suara          | Kota Tangerang Selatan | Clear        |
| 16. | 10202501-418 | RAKSHA AIDAN NALADHIPA, PT.                              | 161,275         | Suara          | Kota Tangerang Selatan | Clear        |
| 17. | 09202512-855 | AGGIOMULTIMEX INTERNATIONAL GROUP, PT.                   | 173,05          | Suara          | Kabupaten Tangerang    | Clear        |

Tabel 3.13 Data layanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio

Sumber data : <https://laporgangguansfr.postel.go.id>

Data layanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada Aplikasi *Trouble Ticket* <https://laporgangguansfr.postel.go.id>, tercatat sebanyak 17 (tujuh belas) aduan gangguan yang masuk sepanjang periode pelaporan. Seluruh aduan tersebut telah berhasil ditangani sehingga menghasilkan tingkat penyelesaian sebesar 100%, yang menunjukkan responsivitas dan efektivitas pelaksanaan penanganan gangguan oleh Balai Monitor.

Selain itu, terdapat 3 aduan gangguan yang berasal dari Dinas Keselamatan, yang merupakan layanan dengan prioritas tinggi karena berkaitan dengan aspek keselamatan publik. Seluruh aduan pada kategori ini juga telah tertangani secara tuntas dengan tingkat penyelesaian 100%, menegaskan komitmen untuk memberikan layanan cepat, tepat, dan berkualitas bagi pengguna frekuensi radio yang bersifat kritikal.

Capaian ini mencerminkan kinerja yang optimal dalam memastikan lingkungan spektrum frekuensi radio tetap aman, bersih dari interferensi, serta mendukung kelancaran komunikasi bagi seluruh pengguna yang berizin.

Perhitungan capaian Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio dilakukan dengan mengacu pada formula berikut :

$$\text{Formula} = \frac{\text{Jumlah Gangguan SFR yang Ditangani}}{\text{Jumlah Total Gangguan SFR}} \\ = \frac{\text{Jumlah Gangguan SFR yang Ditangani}}{\text{Jumlah Total Gangguan SFR}} \\ = 17/17 \text{ Capaian } 100\%.$$

Berdasarkan perhitungan rasio Jumlah Gangguan SFR yang Ditangani terhadap Jumlah Total Gangguan SFR, diperoleh nilai 17/17, yang berarti seluruh laporan gangguan yang masuk selama periode pelaporan berhasil ditindaklanjuti dan diselesaikan secara tuntas. Capaian 100% ini menunjukkan bahwa proses penanganan gangguan berlangsung sangat efektif, responsif, dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

### III. Analisa yang terkait Indikator Kinerja Secara Umum dan Holistik

Indikator Kinerja Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio menetapkan target realisasi sebesar 95% pada tahun 2025. BePenanganan gangguan merupakan fungsi inti dalam menjaga keberlangsungan dan kualitas layanan komunikasi radio. Indikator kinerja utama tercermin dari kemampuan balai dalam menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan gangguan, serta mengidentifikasi sumber gangguan secara tepat sesuai dengan ketentuan teknis dan prosedur yang berlaku. Kecepatan respons dan tingkat keberhasilan penyelesaian gangguan menjadi ukuran penting dalam menilai efektivitas kegiatan ini.

Bdasarkan hasil pelaksanaan sampai dengan akhir Desember 2025, diketahui bahwa capaian penanganan gangguan telah mencapai 100%.

Secara holistik, kinerja penanganan gangguan tidak hanya diukur dari jumlah laporan yang ditangani, tetapi juga dari dampaknya terhadap terjaganya stabilitas layanan komunikasi, khususnya pada layanan prioritas dan kritis. Penanganan gangguan yang efektif berkontribusi dalam meminimalkan durasi gangguan, mencegah gangguan berulang, serta meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap pengelolaan spektrum frekuensi radio. Selain itu, keterpaduan antara kegiatan monitoring, pemeriksaan stasiun radio, dan tindak lanjut hasil penanganan gangguan mencerminkan pengelolaan spektrum yang komprehensif dan berkelanjutan.

### IV. Benchmarking Capaian Kinerja Dengan UPT Lainnya

Berdasarkan pendekatan benchmarking, kinerja penanganan gangguan spektrum frekuensi radio di Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang dapat dibandingkan dengan Balai Monitor SFR Kelas I Medan bahwa sama-sama tercapai sebesar 100% sehingga menunjukkan kinerja yang optimal dan sesuai target

| Nama IKU                                                          | UPT DJID         | Target | Capaian | Keterangan                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase (%)<br>Penanganan Gangguan<br>Spektrum Frekuensi Radio | Balmon Tangerang | 95%    | 100%    | Persentase Capaian Balmon<br>Tangerang dan Balmon Medan<br>sama-sama mencapai 105,26% dan<br>telah melampaui target. |
| Persentase (%)<br>Penanganan Gangguan<br>Spektrum Frekuensi Radio | Balmon Medan     | 95%    | 100%    |                                                                                                                      |

**Tabel 3.14 Benchmarking Capaian Kinerja Dengan UPT Lainnya**

Hasil menunjukkan bahwa unit kerja dengan kinerja unggul mampu menangani gangguan secara cepat, tepat, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mendukung penguatan tata kelola spektrum frekuensi radio yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

## V. Faktor Kendala/Hambatan pada Pencapaian Target

Pelaksanaan kegiatan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio di lapangan masih menghadapi beberapa kendala, antara lain karakter gangguan yang bersifat dinamis dan muncul pada waktu tertentu, keterbatasan akses menuju lokasi sumber interferensi, serta masih ditemukannya perangkat ilegal atau perangkat yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Selain itu, kurangnya pemahaman sebagian pengguna frekuensi terhadap ketentuan perizinan dan pengaturan teknis juga turut memicu terjadinya gangguan.

Meskipun demikian, kegiatan ini tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian penanganan 100% dari seluruh laporan yang masuk. Untuk meningkatkan kualitas layanan ke depan, beberapa langkah perbaikan yang diperlukan meliputi peningkatan monitoring preventif di area rawan gangguan, optimalisasi perangkat monitoring modern, penyuluhan kepada pengguna frekuensi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kompetensi teknis petugas guna mempercepat proses identifikasi dan penyelesaian interferensi.

## VI. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Tindak lanjut pada kegiatan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio dilakukan melalui rangkaian langkah sistematis untuk memastikan setiap sumber interferensi dapat ditangani secara tuntas dan tidak menimbulkan gangguan berulang. Setelah proses identifikasi dan verifikasi di lapangan, petugas melakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemilik perangkat, operator layanan, maupun instansi pengguna frekuensi, untuk memberikan penjelasan teknis serta arahan perbaikan. Apabila ditemukan penggunaan perangkat ilegal, tidak bersertifikat, atau pengoperasian yang tidak sesuai dengan parameter izin, dilakukan tindakan penertiban mulai dari penghentian operasi perangkat, penyesuaian pengaturan teknis, hingga pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, tindak lanjut juga mencakup pencatatan hasil penanganan, penyusunan laporan evaluasi, serta pemantauan lanjutan untuk memastikan bahwa gangguan telah benar-benar teratasi dan tidak terjadi kembali. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban spektrum frekuensi serta menjamin kualitas layanan bagi seluruh pengguna.

## VII. Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya

Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio mencakup peningkatan efektivitas monitoring melalui penguatan kegiatan pengawasan preventif di wilayah rawan gangguan serta optimalisasi pemanfaatan perangkat monitoring yang lebih modern dan akurat. Selain itu, diperlukan peningkatan kompetensi teknis petugas melalui pelatihan berkelanjutan agar proses identifikasi dan analisis gangguan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Sosialisasi kepada pengguna frekuensi juga perlu diperluas, khususnya terkait kewajiban perizinan, penggunaan perangkat bersertifikat, serta kepatuhan terhadap parameter teknis. Koordinasi lintas sektor dengan operator telekomunikasi, instansi pemerintah, dan pelaku usaha harus terus diperkuat guna mempercepat penanganan apabila terjadi gangguan. Di samping itu, perlu dikembangkan sistem pelaporan gangguan yang lebih responsif, terintegrasi, dan berbasis digital untuk meningkatkan kecepatan respon. Melalui langkah-langkah tersebut, kualitas pengendalian spektrum diharapkan semakin optimal serta mampu meminimalkan potensi gangguan di tahun-tahun berikutnya.

## VIII. Efisiensi

Salah satu bentuk efisiensi dalam kegiatan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio adalah pemanfaatan Aplikasi Trouble Ticket melalui laman <https://laporgangguan.sfr.postel.go.id/>. Aplikasi ini berfungsi sebagai sarana pelaporan aduan gangguan spektrum frekuensi radio secara cepat, terstruktur, dan terdokumentasi. Dengan adanya aplikasi tersebut, proses penerimaan laporan, verifikasi awal, hingga penugasan tim penanganan dapat berlangsung lebih cepat dan akurat. Sistem ini terbukti meningkatkan efisiensi waktu penanganan dan kualitas informasi laporan, sehingga respon terhadap gangguan yang dilaporkan masyarakat menjadi lebih optimal serta mendukung kelancaran pengelolaan spektrum frekuensi radio secara keseluruhan.

## IX. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Implementasi budaya nilai BerAKHLAK tercermin dalam setiap tahapan kegiatan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio. Nilai Berorientasi Pelayanan diwujudkan melalui respons cepat terhadap laporan masyarakat dan penyedia layanan, memastikan setiap aduan ditangani secara profesional dan tepat waktu. Akuntabel terlihat dari pencatatan hasil monitoring, dokumentasi temuan, serta pelaporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai **Kompeten** diterapkan melalui peningkatan kemampuan petugas dalam

mengoperasikan perangkat monitoring, menganalisis sumber gangguan, dan memberikan rekomendasi teknis yang akurat.

Harmonis tercermin dalam kerja sama tim saat turun ke lapangan serta komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan, termasuk pengguna frekuensi dan instansi terkait. Loyal diwujudkan melalui komitmen petugas dalam menjaga kualitas pengendalian spektrum sebagai amanah pelayanan publik. Nilai Adaptif terlihat dari pemanfaatan teknologi seperti sistem pelaporan digital dan perangkat monitoring modern untuk mempercepat proses penanganan. Sementara itu, Kolaboratif diwujudkan dalam koordinasi dengan pihak internal dan eksternal, termasuk operator telekomunikasi serta instansi pengawas lainnya, guna memastikan penanganan gangguan berjalan efektif dan menyeluruh.

Melalui penerapan nilai-nilai BerAKHLAK tersebut, kegiatan penanganan gangguan spektrum dapat dilaksanakan secara profesional, responsif, dan memberikan dampak pelayanan publik yang optimal.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa capaian indikator “Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio di UPT” telah memenuhi target sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK). Hal ini ditunjukkan melalui kesesuaian antara jumlah aduan gangguan yang diterima dengan jumlah aduan yang berhasil ditangani secara tuntas. Dengan tertanganinya seluruh laporan gangguan, indikator kinerja tersebut dinyatakan tercapai 100%, sehingga menunjukkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio di UPT.



Gambar 3.9 Dokumentasi Kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

#### 4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

| Kinerja                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                   | Target | Capaian | Persentase |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| Meningkatnya kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio, perangkat telekomunikasi, dan infrastruktur digital | Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital | 75%    | 100%    | 133,33%    |

**Tabel 3.15 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital**

Indikator Kinerja “Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital” pada tahun 2025 ditetapkan dengan target realisasi sebesar 75%. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan hingga akhir Desember 2025, indikator tersebut telah mencapai 100%, melampaui target yang ditetapkan.

#### I. Latar Belakang, Maksud, dan Tujuan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat telah mendorong peningkatan penggunaan berbagai alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital di masyarakat. Pertumbuhan ini perlu diimbangi dengan penerapan standar teknis yang ketat guna memastikan keamanan, kualitas, serta kesesuaian perangkat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Balai Monitor SFR, sebagai instansi teknis yang memiliki mandat dalam pengawasan penggunaan spektrum frekuensi dan perangkat telekomunikasi, berperan penting dalam menjaga agar seluruh perangkat yang beroperasi tidak menimbulkan gangguan, interferensi, maupun risiko keselamatan bagi pengguna. Oleh karena itu, kegiatan pemantauan, pemeriksaan, serta penilaian tingkat kepatuhan standar teknis oleh Balai Monitor menjadi bagian strategis dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan mutu layanan telekomunikasi secara nasional.



*Gambar 3.10 Kegiatan Penertiban Alat Perangkat Telekomunikasi*

Kegiatan pengawasan tingkat kepatuhan standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat yang digunakan masyarakat, pelaku usaha, maupun instansi telah memenuhi persyaratan teknis sesuai regulasi. Melalui pelaksanaan pengawasan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio, kegiatan ini memberikan kepastian bahwa perangkat yang beroperasi aman, legal, dan tidak menimbulkan potensi gangguan atau interferensi, sehingga tercipta lingkungan penggunaan perangkat yang tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan perangkat telekomunikasi terhadap standar teknis melalui pemeriksaan dan verifikasi langsung di lapangan yang dilakukan oleh Balai Monitor SFR. Selain itu, kegiatan ini ditujukan untuk mencegah peredaran dan penggunaan perangkat yang tidak bersertifikat, menjaga kualitas layanan telekomunikasi, serta melindungi masyarakat dari risiko penggunaan perangkat ilegal. Pelaksanaan kegiatan oleh Balai Monitor juga memperkuat penegakan regulasi di bidang telekomunikasi dan menyediakan data akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan pada periode berikutnya.

Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang melaksanakan kegiatan monitoring alat dan/atau perangkat telekomunikasi sebagai bagian dari pengawasan terpadu terhadap kepatuhan standar teknis perangkat yang beredar dan digunakan di masyarakat. Dari total 8 (delapan) kabupaten/kota di Provinsi Banten yang menjadi wilayah kerja, pada periode pelaksanaan ini Balai Monitor telah melakukan monitoring pada 6 (enam) kabupaten/kota sesuai prioritas pengawasan yang ditetapkan.

Monitoring dilakukan terhadap berbagai jenis perangkat telekomunikasi yang wajib dipastikan kesesuaiannya dengan standar teknis, meliputi:

- Handy Talky (HT)* sebagai perangkat komunikasi radio dua arah;
- Perangkat *Low Power*, seperti *Wireless Keyboard* termasuk *Keyboard Aksara Daerah*, *True Wireless Sound (TWS)*, *Wireless Microphone*, *Bluetooth Speaker*, dan *Smart Watch*;
- Wireless Access Point*, terdiri dari *WiFi Extender*, *Wireless Repeater*, dan *Router* yang berfungsi memperluas jangkauan jaringan nirkabel.

Dalam pelaksanaannya, monitoring tidak hanya difokuskan pada perangkat, tetapi juga pada pihak-pihak yang terkait dengan peredaran, pengoperasian, maupun penyelenggaraan perangkat telekomunikasi. Sasaran pengawasan mencakup:

- Pelaku Usaha (Pabrikan/Perakit)* sebagai pihak yang memproduksi atau merakit perangkat;
- Vendor, Distributor, dan Pedagang* yang melakukan pemasaran dan penjualan perangkat;
- Pengguna atau Penyelenggara Telekomunikasi yang memanfaatkan perangkat dalam kegiatan operasional;
- Instansi Pemerintah, Lembaga Pendidikan, atau Badan Hukum, yang menggunakan perangkat untuk mendukung pelayanan publik dan penyelenggaraan kegiatan;
- Orang (Pribadi Hukum) sebagai pengguna perorangan yang memanfaatkan perangkat telekomunikasi dalam aktivitas sehari-hari.

Melalui monitoring langsung di lapangan, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang memastikan bahwa perangkat memiliki sertifikasi resmi dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID), memenuhi standar teknis, serta tidak menimbulkan potensi gangguan terhadap layanan telekomunikasi lainnya. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang dalam menjaga ketertiban penggunaan perangkat telekomunikasi, melindungi masyarakat dari penggunaan perangkat tidak bersertifikat, dan memastikan kualitas layanan telekomunikasi tetap aman dan optimal di wilayah Provinsi Banten.

## II. Capaian Target

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital di UPT ditetapkan dengan target realisasi sebesar 75%. Berdasarkan data capaian hingga akhir Desember 2025, indikator tersebut berhasil mencapai 100%, melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan dan monitoring perangkat telekomunikasi di UPT telah dilaksanakan secara optimal dan seluruh perangkat yang diperiksa menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat baik terhadap standar teknis yang berlaku.

| Sasaran Program                                                                                                 | Indikator Kinerja Sasaran Program                                                   | 2021   |           | 2022   |           | 2023   |           | 2024   |           | 2025   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                                                                                                                 |                                                                                     | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Meningkatnya kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio, perangkat telekomunikasi dan infrastruktur digital | Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital | -      | -         | 20%    | 100%      | 20%    | 100%      | 20%    | 100%      | 75%    | 100%      |

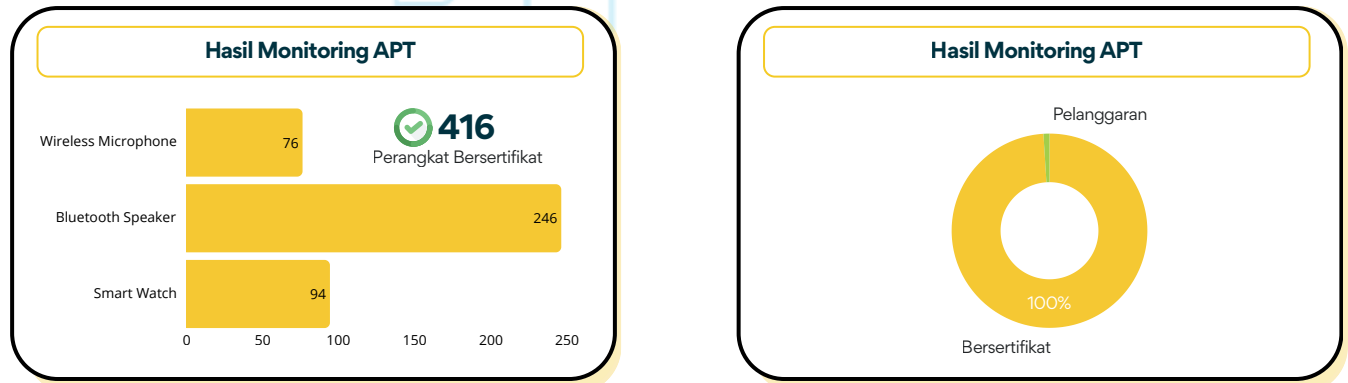
**Tabel 3.16 Hasil Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio**

Indikator Kinerja Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital merupakan bagian dari sasaran program “Meningkatnya kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio, perangkat telekomunikasi, dan infrastruktur digital.” Sejak tahun 2021 hingga 2025, indikator ini menunjukkan tren capaian yang konsisten dan sangat baik.

Pada tahun 2021 belum ditetapkan target maupun realisasi. Memasuki tahun 2022 hingga 2024, indikator diberikan target sebesar 20% setiap tahun, dan seluruhnya tercapai secara optimal dengan realisasi 100%. Untuk tahun 2025, target meningkat menjadi 75%, dan hingga akhir tahun, realisasi telah mencapai 100%, melampaui target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan dan pengendalian kepatuhan standar teknis perangkat telekomunikasi di UPT mampu dilaksanakan secara efektif dan konsisten. Capaian 100% selama empat tahun berturut-turut mencerminkan efektivitas pelaksanaan monitoring, koordinasi, serta penegakan ketentuan standar teknis yang berlaku dalam rangka menjaga kualitas layanan dan ketertiban pemanfaatan perangkat telekomunikasi.

Adapun Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



Sumber data : <https://smart.postel.go.id/>

Kegiatan pemeriksaan dan monitoring perangkat telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang mencakup tiga jenis perangkat utama, yaitu *Handy Talkie* (HT), Perangkat *Low Power*, serta *Wireless Access Point*. Dari keseluruhan kegiatan, tercatat jumlah perangkat yang berhasil diperiksa sebanyak 416 (Empat Ratus Enam Belas) unit. Dengan rinciannya :

- 94 (sembilan puluh empat) unit *Handy Talkie* (HT);
- 246 (dua ratus empat puluh enam) unit Perangkat *Low Power*, terdiri dari *Wireless Keyboard* (termasuk keyboard aksara daerah), *True Wireless Sound* (TWS), *Wireless Microphone*, *Bluetooth Speaker*, dan *Smart Watch*;
- 76 (tujuh puluh enam) unit *Wireless Access Point*, seperti *WiFi Extender*, *Wireless Repeater*, dan *Router*.

Seluruh perangkat tersebut telah melalui proses pemeriksaan administratif dan teknis, termasuk verifikasi sertifikasi, label, QR Code, serta kesesuaian parameter teknis dan sudah dilaporkan pada aplikasi SMART atau <https://smart.postel.go.id/>.

Berdasarkan formula perhitungan capaian Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital :

**Formula :**

$$\frac{\sum \text{Perangkat bersertifikat termonitor} + \sum \text{Pelanggaran perangkat ditindaklanjuti}}{\sum \text{Perangkat termonitor}} \times 100\%$$

$$(416 + 0) / 416 \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap total 416 (Empat Ratus Enam Belas) perangkat, seluruhnya dinyatakan memenuhi standar teknis dan taat terhadap ketentuan sertifikasi yang berlaku. Tidak ditemukan perangkat yang tidak bersertifikat ataupun tidak berlabel, maka capaian Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital untuk indikator ini mencapai 100%.

Capaian ini mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan perangkat telekomunikasi berada pada level sangat baik, serta menunjukkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang dalam memastikan legalitas dan keamanan penggunaan perangkat telekomunikasi di wilayah kerjanya.

### III. Analisa yang terkait Indikator Kinerja Secara Umum dan Holistik

Pengawasan kepatuhan standar teknis merupakan elemen penting dalam menjamin keamanan, kualitas, dan keteraturan penggunaan perangkat telekomunikasi dan digital. Indikator kinerja utama tercermin dari kemampuan balai dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kesesuaian alat dan/atau perangkat dengan standar teknis yang ditetapkan, baik melalui kegiatan pengujian, verifikasi, maupun pengawasan di lapangan.

Secara holistik, kinerja kepatuhan standar teknis tidak hanya diukur dari jumlah perangkat yang diperiksa atau tingkat kesesuaian administratif, tetapi juga dari dampaknya terhadap penurunan potensi gangguan frekuensi, perlindungan pengguna, serta terjaganya kualitas layanan telekomunikasi. Kegiatan ini berkontribusi dalam mencegah peredaran dan penggunaan perangkat yang tidak memenuhi standar, meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan pengguna, serta mendukung ekosistem telekomunikasi dan digital yang aman dan andal di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang.

#### IV. Benchmarking Capaian Kinerja Dengan UPT Lainnya

Berdasarkan pendekatan benchmarking, kinerja pengawasan Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital di Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang dibandingkan Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya bahwa sama-sama tercapai sebesar 133.33 % sehingga menunjukkan kinerja yang optimal, sesuai target dan melebihi target.

| Nama IKU                                                                                           | UPT DJID         | Target | Capaian | Keterangan                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital | Balmon Tangerang | 75%    | 100%    | Persentase Capaian Balmon Tangerang dan Balmon Surabaya sama-sama mencapai 133,33% dan telah melampaui target. |
| Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital | Balmon Surabaya  | 75%    | 100%    |                                                                                                                |

**Tabel 3.17 Benchmarking Capaian Kinerja Balmon Tangerang dengan Balmon Surabaya**

Hasil ini menunjukkan bahwa unit kerja dengan kinerja unggul mampu meningkatkan tingkat kepatuhan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap tertibnya penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital, sehingga memperkuat tata kelola pengawasan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

#### V. Faktor Kendala/Hambatan pada Pencapaian Target

Dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satu hambatan utama adalah variasi jenis perangkat yang semakin beragam, sehingga memerlukan ketelitian lebih dalam proses identifikasi dan verifikasi standar teknis. Selain itu, ketersediaan sumber daya pemeriksa yang harus menjangkau beberapa kabupaten/kota dalam waktu terbatas juga menjadi tantangan tersendiri. Masih ditemukannya pelaku usaha yang belum memahami kewajiban sertifikasi dan pelabelan perangkat turut memperlambat proses sosialisasi dan pemeriksaan di lapangan. Meskipun terdapat beberapa hambatan, kegiatan monitoring dan pemeriksaan tetap berjalan dengan baik. Pada tahun berjalan, indikator Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital berhasil mencapai 100%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 75%.

Hal ini menunjukkan bahwa perangkat yang beredar dan digunakan oleh masyarakat maupun instansi telah memenuhi standar teknis, serta adanya peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi, label, dan QR Code resmi. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan ke depan, beberapa langkah perbaikan telah disusun. Pertama, meningkatkan intensitas sosialisasi kepada pelaku usaha, distributor, dan pengguna perangkat terkait kewajiban sertifikasi dan pelabelan resmi. Kedua, memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar-instansi, termasuk pemerintah daerah dan lembaga pendidikan, untuk memperluas jangkauan monitoring secara lebih efektif. Ketiga, optimalisasi penggunaan perangkat monitoring digital, sehingga proses verifikasi dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien.

Selain itu, peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan berkala juga menjadi langkah strategis untuk memastikan pemeriksaan perangkat dapat mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi yang terus berubah.

## VI. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pengawasan, kegiatan Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital dilanjutkan dengan beberapa langkah strategis. Pertama, dilakukan pemberitahuan resmi dan pembinaan langsung kepada pelaku usaha, distributor, serta pengguna perangkat yang ditemukan belum memenuhi standar teknis, khususnya terkait kewajiban sertifikasi, pelabelan, dan penggunaan *QR Code*. Pembinaan ini bertujuan agar seluruh pihak memahami proses dan manfaat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Selanjutnya, dilakukan pemutakhiran data perangkat yang telah diperiksa untuk memastikan seluruh informasi tercatat secara akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan pada periode berikutnya. Balai Monitor juga meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi secara berkala baik secara langsung maupun melalui media digital, agar pengetahuan masyarakat mengenai perangkat legal semakin meningkat.

Sebagai langkah lanjutan, dilakukan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk pemerintah daerah dan lembaga pendidikan, untuk memperkuat pengawasan dan memperluas jangkauan pemeriksaan pada wilayah prioritas. Selain itu, tim juga merencanakan peningkatan frekuensi monitoring dan penggunaan teknologi pemeriksaan yang lebih modern agar proses verifikasi standar teknis berjalan lebih cepat dan efektif.

Dengan tindak lanjut tersebut, diharapkan tingkat kepatuhan perangkat telekomunikasi dan digital dapat semakin meningkat, serta potensi peredaran perangkat ilegal dapat diminimalkan.

## VII. Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya

Untuk meningkatkan efektivitas kegiatan Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital pada tahun berikutnya, Balai Monitor perlu memperluas titik lokasi monitoring, terutama pada wilayah dengan aktivitas perdagangan perangkat yang tinggi. Sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi, pelabelan, dan penggunaan *QR Code* juga perlu diperkuat kepada pelaku usaha, distributor, instansi pemerintah, dan pengguna perangkat. Selain itu, peningkatan sarana pemeriksaan seperti alat uji dan aplikasi verifikasi digital menjadi penting untuk mempercepat dan memastikan akurasi pemeriksaan di lapangan. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan teknis berkala serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum juga menjadi langkah strategis agar proses penanganan temuan dan penegakan aturan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

## VIII. Efisiensi

Pemanfaatan situs web *www.sertifikasi.postel.go.id* dan aplikasi *mobile SIRANI* telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi kegiatan Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital. Melalui kedua platform tersebut, Pelaku Usaha (Pabrikan/Perakit), Vendor atau Distributor, Pedagang, Pengguna/Penyelenggara Telekomunikasi, Instansi Pemerintah, Lembaga Pendidikan, Badan Hukum, serta masyarakat luas dapat dengan mudah mengetahui status sertifikasi suatu perangkat telekomunikasi. Kemudahan akses informasi ini mempercepat proses verifikasi, meminimalkan kebutuhan pemeriksaan manual di lapangan, serta membantu mengurangi potensi peredaran perangkat yang tidak bersertifikat. Dengan demikian, penggunaan platform digital tersebut terbukti meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

## IX. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Pelaksanaan kegiatan Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital telah menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK sebagai pedoman kerja aparatur Balai Monitor. Nilai Berorientasi Pelayanan diterapkan melalui pemberian informasi, pembinaan, serta bimbingan teknis kepada pelaku usaha, distributor, instansi, dan masyarakat terkait kewajiban sertifikasi dan pelabelan perangkat. Nilai Akuntabel tercermin dari proses pemeriksaan yang dilakukan secara transparan, berdasarkan data teknis yang valid, serta terdokumentasi dengan baik.

Nilai **Kompeten** diwujudkan melalui peningkatan kemampuan petugas dalam menggunakan perangkat uji, aplikasi verifikasi digital, dan pemahaman regulasi terbaru. **Harmonis** ditunjukkan dengan kerja sama yang baik antar tim monitoring, instansi terkait, serta para pemangku kepentingan di lapangan.

Nilai **Loyal** tampak dari komitmen petugas dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap fungsi pengawasan.

Nilai Adaptif diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi, seperti website sertifikasi dan aplikasi SIRANI, guna mempercepat proses verifikasi perangkat. Sementara itu, nilai Kolaboratif diterapkan dengan menjalin sinergi bersama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan standar teknis dapat terwujud secara berkelanjutan. Melalui implementasi nilai-nilai BerAKHLAK tersebut, kegiatan pengawasan berjalan lebih profesional, efektif, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian serta hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja **“Persentase (%) Kegiatan Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital”** telah berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang optimal. Seluruh rangkaian pemeriksaan menunjukkan bahwa perangkat yang diuji mayoritas telah memenuhi standar teknis dan persyaratan sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Proses monitoring, verifikasi, dan pembinaan berlangsung efektif berkat pemanfaatan teknologi digital seperti website sertifikasi dan aplikasi SIRANI, sehingga mempercepat identifikasi perangkat bersertifikat maupun yang belum bersertifikat.

Capaian kinerja yang menunjukkan realisasi **100%** mencerminkan tingginya tingkat kepatuhan pelaku usaha, distributor, instansi, serta masyarakat terhadap regulasi teknis perangkat telekomunikasi. Selain itu, koordinasi yang baik antar tim dan dukungan berbagai pihak turut membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Dengan hasil tersebut, kegiatan ini memberikan kontribusi positif terhadap upaya pengendalian perangkat telekomunikasi ilegal, peningkatan kualitas layanan, serta perlindungan masyarakat. Pengawasan yang berkelanjutan, peningkatan edukasi, dan penguatan kolaborasi diharapkan dapat terus meningkatkan kepatuhan dan keamanan perangkat telekomunikasi pada tahun-tahun berikutnya.



Gambar 3.11 Dokumentasi Kegiatan Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

## 5. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

### I. Latar Belakang, Maksud, dan Tujuan

Indikator “Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio (SMFR) di UPT” ditetapkan karena perangkat monitoring radio merupakan instrumen utama dalam menjaga ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio.

Provinsi Banten sebagai wilayah dengan 8 kabupaten/kota memiliki pertumbuhan pemanfaatan frekuensi radio yang sangat padat dari tahun ke tahun. Seiring berkembangnya teknologi telekomunikasi, kebutuhan monitoring yang akurat sangat penting untuk mencegah interferensi, memastikan penggunaan spektrum yang efisien, serta menjaga keberlangsungan layanan komunikasi.

Penerima manfaat indikator ini meliputi seluruh pengguna layanan telekomunikasi, instansi pemerintah, sektor keselamatan publik, pelaku usaha, serta masyarakat umum yang membutuhkan konektivitas stabil dan bebas interferensi.

## II. Capaian Target

### 5. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

| Kinerja                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                        | Target | Capaian | Persentase |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi | Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT | 85%    | 93%     | 100%       |

**Tabel 3.18 Hasil Pelaksanaan Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT**

Pada Tahun 2025 Indikator Kinerja Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio UPT Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang memiliki target realisasi sebesar 85%. Berdasarkan data capaian diketahui bahwa Persentase (%) nilai dari realisasi Capaian Kinerja sampai akhir Desember 2025 sebesar 100%.

Capaian Kinerja Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio pada Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang selama Tahun 2025 diperoleh melalui analisis kondisi perangkat Stasiun SMFR yang aktif serta hasil pengambilan data okupansi yang diunggah secara berkala melalui aplikasi smsn.postel.go.id dan rol.postel.go.id. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum perangkat Stasiun SMFR dalam kondisi berfungsi dengan baik dan mendukung pelaksanaan monitoring secara optimal.

Capaian kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang tahun berjalan menunjukkan tingkat operasional perangkat monitoring yang tinggi. Mayoritas stasiun berfungsi optimal, dengan satu stasiun yang tidak aktif karena kendala teknis dan membutuhkan pemeliharaan lanjutan.

Berikut daftar perangkat stasiun monitor SMFR Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang :

#### 1. Stasiun SMFR Tetap dan Transportable

Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang mengoperasikan 7 (tujuh) Stasiun SMFR tetap dan *transportable* yang tersebar di wilayah Provinsi Banten dan sebagian wilayah Tangerang Raya. Perangkat-perangkat ini digunakan untuk melaksanakan fungsi pemantauan, pengukuran, dan identifikasi spektrum frekuensi radio secara berkelanjutan.

Rincian Stasiun SMFR Tetap/*Transportable*:

| No. | Lokasi Site       | Perangkat Utama                  | Jenis Perangkat | Status      | Keterangan                                   |
|-----|-------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| 1   | Cangkudu          | Radio Direction Finder (DDF 255) | RDF             | Aktif       | Berfungsi Optimal                            |
| 2   | Binong            | Radio Direction Finder (DDF 255) | RDF             | Aktif       | Berfungsi Optimal                            |
| 3   | Kota Tangerang    | Radio Direction Finder (DDF 255) | RDF             | Aktif       | Berfungsi Optimal                            |
| 4   | Serang            | All Band Receiver (Eb 500)       | Receiver        | Aktif       | Berfungsi Optimal                            |
| 5   | Cilegon           | All Band Receiver (Eb 500)       | Receiver        | Aktif       | Berfungsi Optimal                            |
| 6   | Tangerang Selatan | All Band Receiver (TC 709 CSMS)  | Receiver        | Aktif       | Berfungsi Optimal                            |
| 7   | Pandeglang        | All Band Receiver (TC 709 CSMS)  | Receiver        | Tidak Aktif | Mengalami kendala teknis sehingga memerlukan |

**Tabel 3.19 Rincian Stasiun SMFR Tetap/*Transportable***

Stasiun SMFR pada *Site* Pandeglang saat ini belum dapat dioperasikan dikarenakan adanya kendala teknis yang memerlukan penanganan pemeliharaan lebih lanjut. Hal ini menyebabkan fungsi monitoring belum dapat berjalan optimal di wilayah tersebut.

### 2. Stasiun SMFR Bergerak (*Mobile Station*)

Selain stasiun Tetap dan *Transportable*, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang juga mengoperasikan 1 (satu) unit Stasiun SMFR bergerak, yang digunakan untuk mendukung kegiatan monitoring lapangan, penelusuran sumber gangguan, serta operasi khusus.

Rincian Stasiun SMFR Bergerak:

| No. | Unit Kendaraan      | Perangkat Utama                  | Jenis Perangkat | Status | Keterangan        |
|-----|---------------------|----------------------------------|-----------------|--------|-------------------|
| 1   | Land Rover Defender | Radio Direction Finder (DDF 205) | RDF             | Aktif  | Berfungsi Optimal |

**Tabel 3.20 Rincian Stasiun SMFR Bergerak**

### 3. Stasiun Monitoring HF

Selain stasiun-stasiun di atas, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang juga memiliki dan mengoperasikan Stasiun Monitoring *High Frequency* (HF).

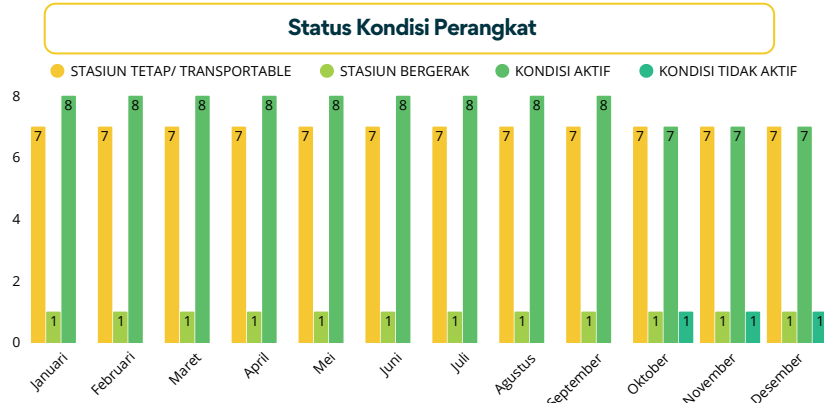
Stasiun ini berfungsi dengan baik dan digunakan untuk melakukan:

1. Pemantauan penggunaan spektrum frekuensi HF
2. Pengawasan potensi gangguan lintas wilayah
3. Pelaporan hasil monitoring melalui aplikasi *mosfet.postel.go.id*

Berikut tabel status kondisi perangkat Stasiun SMFR dan Capaian Indikator Kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang dari bulan Januari s.d Desember 2025

| No. | Bulan     | Stasiun Tetap / Transportable | Stasiun Bergerak | Kondisi Aktif | Kondisi Tidak Aktif | Capaian PK (%) |
|-----|-----------|-------------------------------|------------------|---------------|---------------------|----------------|
| 1   | Januari   | 7                             | 1                | 8             | 0                   | 100%           |
| 2   | Februari  | 7                             | 1                | 8             | 0                   | 100%           |
| 3   | Maret     | 7                             | 1                | 8             | 0                   | 100%           |
| 4   | April     | 7                             | 1                | 8             | 0                   | 100%           |
| 5   | Mei       | 7                             | 1                | 8             | 0                   | 100%           |
| 6   | Juni      | 7                             | 1                | 8             | 0                   | 100%           |
| 7   | Juli      | 7                             | 1                | 8             | 0                   | 100%           |
| 8   | Agustus   | 7                             | 1                | 8             | 0                   | 100%           |
| 9   | September | 7                             | 1                | 8             | 0                   | 100%           |
| 10  | Oktober   | 7                             | 1                | 7             | 1                   | 93%            |
| 11  | November  | 7                             | 1                | 7             | 1                   | 93%            |
| 12  | Desember  | 7                             | 1                | 7             | 1                   | 93%            |

**Tabel 3.21 Status Kondisi Perangkat Stasiun SMFR**



Berdasarkan tabel dan grafik monitoring operasional Stasiun Monitor Frekuensi Radio (SMFR) dari bulan Januari hingga Desember 2025, dapat disimpulkan bahwa kinerja operasional perangkat SMFR secara umum berada pada kondisi sangat baik, dengan tingkat capaian PK (Perjanjian Kinerja) yang konsisten berada pada angka 100% selama sembilan bulan pertama.

**a) Capaian Kinerja Januari–September 2025 (Stabil dan Optimal – 100%)**

Pada periode Januari hingga September, seluruh perangkat stasiun SMFR baik 7 unit stasiun tetap/transportable maupun 1 unit stasiun bergerak beroperasi secara aktif dan tanpa kendala, dengan total 8 perangkat aktif dan 0 perangkat tidak aktif setiap bulan.

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perangkat dapat difungsikan secara optimal, tanpa hambatan operasional, serta didukung oleh pemeliharaan rutin dan monitoring terencana yang berjalan efektif.

**b) Kinerja Oktober–Desember 2025 (Penurunan Kinerja – 93%)**

Memasuki bulan Oktober hingga Desember, terjadi perubahan kondisi pada operasional perangkat SMFR.

Meskipun jumlah perangkat tetap dan bergerak tidak berubah (7 stasiun tetap/*transportable* dan 1 stasiun bergerak), terdapat 1 perangkat yang mengalami kondisi tidak aktif, sehingga komposisi menjadi:

- 7 perangkat aktif
- 1 perangkat tidak aktif

Pada Triwulan IV, terjadi penurunan capaian Perjanjian Kinerja (PK) menjadi 93%. Penurunan ini disebabkan oleh adanya satu perangkat Stasiun Monitor Frekuensi Radio (SMFR) yang mengalami gangguan teknis dan tidak dapat beroperasi secara optimal selama periode tersebut. Kondisi ini berdampak langsung pada tingkat operasional sistem monitoring, khususnya pada wilayah layanan yang dicakup oleh perangkat tersebut.

Meskipun capaian PK pada triwulan IV mengalami penurunan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang secara keseluruhan tetap berada dalam kategori sangat baik, karena tingkat capaian masih melampaui target PK yang telah ditetapkan sebesar **85%**. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat SMFR tetap berfungsi dengan baik dan kegiatan pemantauan spektrum frekuensi radio dapat dilaksanakan secara efektif.

Namun demikian, gangguan yang muncul pada triwulan akhir menunjukkan adanya komponen atau perangkat tertentu yang memerlukan perhatian lebih serius. Apabila tidak segera ditangani, potensi gangguan serupa dapat meningkat pada tahun berikutnya dan berpotensi memengaruhi efektivitas kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang.

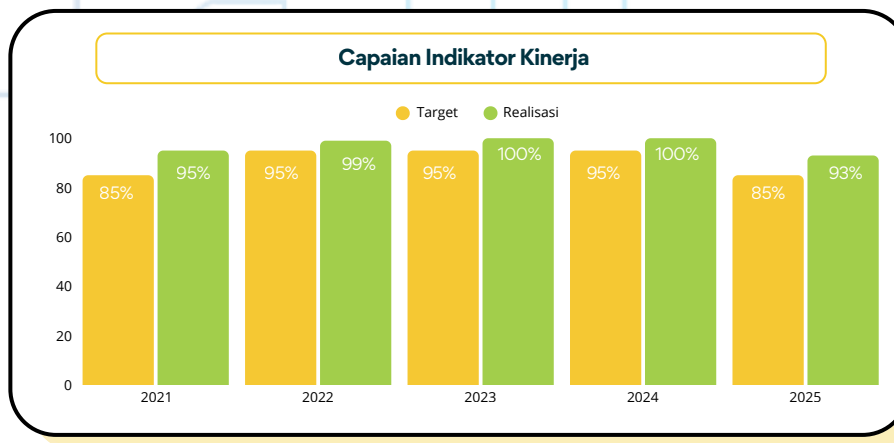
Secara umum, kondisi perangkat Stasiun SMFR sepanjang periode **Januari hingga Desember 2025** berada dalam keadaan **berfungsi baik** dan mampu mendukung kegiatan pengawasan frekuensi secara optimal. Namun, mulai **Oktober hingga Desember 2025**, satu perangkat Stasiun SMFR mengalami **kerusakan teknis** yang menyebabkan perangkat tersebut tidak dapat beroperasi secara optimal.

Kerusakan ini berdampak pada *penurunan nilai Service Level Agreement (SLA)* pada periode tersebut, karena salah satu titik monitoring tidak mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap sistem pengawasan. Meskipun demikian, seluruh perangkat SMFR lainnya tetap berfungsi normal, sehingga kegiatan monitoring secara keseluruhan masih dapat berjalan dengan baik dan capaian kinerja tetap berada di atas target yang telah ditetapkan.

Berikut capaian indikator kinerja Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio pada Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang dari tahun 2021- 2025

| Sasaran Program                                                                                                                                | Indikator Kinerja Sasaran Program                                | 2021   |           | 2022   |           | 2023   |           | 2024   |           | 2025   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                                                                                                                                                |                                                                  | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi | Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring Frekuensi Radio UPT | 85%    | 95%       | 95%    | 99%       | 95%    | 100%      | 95%    | 100%      | 85%    | 93%       |

**Tabel 3.22 Hasil Pelaksanaan Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring Frekuensi Radio UPT**



Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa capaian target Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio (SMFR) pada UPT Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang selama periode tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan kinerja yang konsisten dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pencapaian ini tercermin dari kondisi perangkat SMFR yang berada dalam keadaan baik serta tingkat pemanfaatannya yang optimal. Seluruh perangkat termonitor secara realtime melalui aplikasi website yang disediakan, sehingga proses pengawasan, pemantauan, dan identifikasi kondisi perangkat dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien.

Dengan dukungan sistem monitoring berbasis web tersebut, potensi gangguan dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti, sehingga operasional dan fungsi monitoring tetap terjaga dengan baik setiap tahunnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator “Persentase Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio UPT” telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Hal ini terlihat dari jumlah perangkat yang beroperasi dan dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung kegiatan monitoring, pengukuran, serta identifikasi spektrum frekuensi radio. Selain perangkat utama, tersedia pula perangkat pendukung yang mampu menjalankan fungsi monitoring secara mandiri, sehingga kontinuitas operasional tetap terjaga.

Dengan kondisi tersebut, indikator kinerja ini dinyatakan tercapai dengan nilai 93%.

### III. Analisa yang terkait Indikator Kinerja Secara Umum dan Holistik

Capaian indikator kinerja pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan realisasi mencapai 100%, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 85%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari optimalisasi program pemeliharaan perangkat Stasiun Monitor Frekuensi Radio (SMFR) serta pelaksanaan inspeksi berkala yang memastikan setiap perangkat beroperasi sesuai standar.

Pemanfaatan aplikasi *smsn.postel.go.id*, *smfr.postel.go.id*, dan *rol.postel.go.id* turut menjadi faktor pendukung utama. Melalui *platform* tersebut, kondisi perangkat dapat dipantau secara *realtime*, sehingga setiap potensi gangguan atau penurunan performa dapat segera teridentifikasi dan ditangani sebelum berdampak pada layanan. Selain itu, sinergi dalam tim, peningkatan kompetensi teknis petugas, serta penerapan prosedur pemeliharaan dan kalibrasi yang terstandarisasi memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian indikator secara keseluruhan. Kombinasi faktor-faktor tersebut memastikan layanan monitoring frekuensi radio berjalan optimal, andal, dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

Pengguna layanan spektrum frekuensi radio di Provinsi Banten menunjukkan tingkat kepadatan yang cukup tinggi, khususnya pada kawasan industri, pusat kegiatan pemerintahan, serta wilayah penyangga Ibukota seperti Tangerang Raya. Selain itu, keberadaan Bandara Internasional Soekarno–Hatta (Soetta) yang merupakan salah satu bandara tersibuk di Asia Tenggara menjadi faktor utama yang meningkatkan intensitas penggunaan spektrum di wilayah ini.

Aktivitas aviasi yang berlangsung di Soetta melibatkan berbagai sistem komunikasi vital seperti navigasi penerbangan, komunikasi udara–darat, radar, serta layanan keselamatan penerbangan (*aeronautical safety*), yang semuanya sangat bergantung pada penggunaan spektrum frekuensi radio yang stabil dan bebas gangguan. Kondisi tersebut menjadikan Banten sebagai salah satu provinsi dengan kebutuhan alokasi spektrum paling intensif secara nasional.

Sebagai perbandingan, Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu wilayah dengan tingkat penggunaan spektrum tertinggi di Indonesia, karena tingginya aktivitas pemerintahan, bisnis, penyiaran, serta jaringan telekomunikasi nasional. Pengelolaan spektrum di Jakarta—yang lebih terotomatisasi, didukung integrasi sistem pengawasan *real-time*, serta koordinasi spektrum lintas-lembaga—dapat menjadi acuan dalam peningkatan kualitas pengawasan di Banten.

Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, tingkat penggunaan frekuensi di Provinsi Banten berada pada kategori menengah. Namun demikian, Banten memiliki karakteristik unik sebagai wilayah penyangga Jakarta serta sebagai pusat industri dan transportasi udara nasional. Mobilitas penduduk, keberadaan kawasan industri besar, serta tingginya intensitas penggunaan perangkat komunikasi bergerak dan tetap menambah kompleksitas pengelolaan spektrum di wilayah ini. Dengan demikian, benchmarking dengan provinsi-provinsi besar tersebut menegaskan bahwa Banten memerlukan pendekatan pengelolaan spektrum yang setara dengan provinsi metropolitan, namun tetap mempertimbangkan kondisi geografis dan sebaran wilayah pesisirnya.

Dalam menghadapi tingginya tingkat kepadatan penggunaan spektrum frekuensi radio di Provinsi Banten terutama di sekitar Bandara Internasional Soekarno–Hatta diperlukan strategi pengelolaan yang terencana, terukur, dan responsif untuk memastikan layanan komunikasi tetap andal, aman, dan bebas dari interferensi.

### 1. Penguatan Monitoring pada Kawasan Kritis

Pengawasan spektrum di area berisiko tinggi seperti Bandara Soekarno Hatta harus menjadi prioritas utama. Intensitas monitoring perlu ditingkatkan melalui:

- Pengawasan aktif dan pasif berbasis sistem *real-time*,
- Patroli monitoring terjadwal menggunakan stasiun bergerak (*mobile monitoring*), serta
- Integrasi data gangguan untuk deteksi dini potensi interferensi.

### 2. Peningkatan Kapasitas dan Modernisasi SMFR

Peningkatan kapasitas perangkat SMFR menjadi kebutuhan strategis melalui:

- Optimalisasi perangkat dengan platform digital berbasis aplikasi,
- Modernisasi perangkat monitoring untuk menghasilkan data kualitas spektrum yang cepat, akurat, dan berkelanjutan,
- Integrasi dashboard analisis gangguan untuk memperkuat pengambilan keputusan.

### 3. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dan Antarwilayah

Koordinasi antarinstansi sangat penting, terutama dengan:

- AirNav Indonesia,
- Otoritas bandara,
- Balai Monitor SFR Kelas I DKI Jakarta,
- Instansi pengelola jaringan telekomunikasi.

Koordinasi ini diperlukan untuk mitigasi interferensi lintas batas serta harmonisasi kanal frekuensi pada wilayah kerja yang saling berdekatan.

### 4. Pemetaan Spektrum Padat (*Spectrum Hotspot Mapping*)

Pemetaan berkala terhadap area dengan densitas spektrum tinggi diperlukan untuk:

- Identifikasi pola kepadatan spektrum,
- Perencanaan mitigasi gangguan,
- Prediksi kebutuhan alokasi frekuensi di masa depan.

### 5. Optimalisasi Penataan dan Refarming Pita Frekuensi

Penataan ulang (*refarming*) pada pita frekuensi yang mengalami kepadatan tinggi harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan, memastikan kepatuhan pengguna, serta menjamin keamanan operasional terutama di wilayah kritis seperti bandara.

### 6. Peningkatan Edukasi dan Kepatuhan Pengguna Spektrum

Program sosialisasi regulasi, bimbingan teknis, dan kampanye kesadaran spektrum perlu diperkuat untuk mengurangi potensi pelanggaran, sekaligus mendorong penggunaan frekuensi yang lebih bertanggung jawab.

### 7. Penguatan Kompetensi SDM Teknis

SDM teknis yang kompeten merupakan faktor kunci keberhasilan pengawasan spektrum. Pelatihan lanjutan, sertifikasi kompetensi, dan peningkatan kemampuan analisis gangguan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menghadapi perkembangan teknologi komunikasi yang sangat dinamis.

## IV. Faktor Kendala/Hambatan pada Pencapaian Target

Dalam pelaksanaan operasional monitoring, terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian. Salah satu tantangan utama adalah potensi penurunan kinerja perangkat akibat penggunaan yang berlangsung secara terus-menerus. Kondisi ini menuntut adanya pemeliharaan berkala agar performa perangkat tetap optimal. Selain itu, pada bulan Oktober 2025, perangkat Stasiun Transportable di Pandeglang mengalami kerusakan yang berdampak pada penurunan *Service Level Agreement* (SLA) dan mengganggu kelancaran kegiatan monitoring di wilayah tersebut.

Sebagai respons terhadap kendala tersebut, dilakukan sejumlah upaya percepatan untuk memastikan layanan monitoring tetap berjalan efektif. Langkah-langkah tersebut meliputi inspeksi rutin pada seluruh perangkat, pemeliharaan oleh vendor lokal yang memiliki kompetensi teknis, serta pemanfaatan sistem pemantauan secara *realtime* untuk mendeteksi anomali sejak dini sehingga *downtime* dapat diminimalisir.

Penerapan upaya percepatan ini memberikan dampak positif yang signifikan. Efektivitas kegiatan monitoring meningkat, risiko terjadinya interferensi dapat ditekan, serta kepastian layanan spektrum bagi masyarakat menjadi lebih terjamin. Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian target ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pengawasan spektrum frekuensi radio dan mendukung tercapainya layanan yang lebih andal dan responsif.



Gambar 3.12 Kegiatan Pemeliharaan SMFR

## V. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Untuk memastikan kondisi dan fungsi operasional perangkat Stasiun Monitor Frekuensi Radio (SMFR), dilakukan serangkaian upaya peningkatan pengawasan dan pemeliharaan. Langkah pertama adalah melakukan inspeksi perangkat secara berkala sehingga potensi kerusakan atau penurunan kinerja dapat terdeteksi lebih dini. Selain itu, dilakukan monitoring rutin terhadap kondisi perangkat guna mengantisipasi terjadinya *downtime* yang dapat mengganggu kegiatan monitoring spektrum.

Upaya peningkatan ini juga diperkuat melalui integrasi sistem monitoring perangkat secara digital, yang memungkinkan pemantauan berlangsung lebih akurat, cepat, dan terkoordinasi. Di samping itu, sebagai bentuk penguatan kapasitas sumber daya manusia, dilakukan peningkatan kompetensi teknis dalam melakukan *troubleshooting* perangkat SMFR agar proses penanganan masalah dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, langkah-langkah tersebut menjadi dasar penting dalam menjaga kondisi serta fungsi perangkat stasiun monitor frekuensi radio (SMFR) serta meningkatkan kualitas layanan pengawasan spektrum secara berkelanjutan.

## VI. Efisiensi

Pemeliharaan perangkat Stasiun Monitor Frekuensi Radio (SMFR) dilaksanakan melalui kerja sama dengan vendor lokal yang memiliki kompetensi setara dengan vendor pabrikan, sehingga mampu memberikan layanan pemeliharaan yang berkualitas tanpa mengurangi standar teknis yang dipersyaratkan. Pendekatan ini terbukti menciptakan efisiensi biaya, sekaligus mendukung kemandirian layanan pemeliharaan dalam negeri.

Selain itu, efisiensi operasional turut meningkat melalui penerapan sistem pemantauan *real-time* yang memungkinkan deteksi kondisi perangkat secara cepat dan akurat. Penggunaan sistem ini secara signifikan mengurangi kebutuhan inspeksi fisik berulang, sehingga menekan biaya operasional dan memastikan kegiatan monitoring dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

## VII. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Pelaksanaan kegiatan ini mencerminkan nilai-nilai BerAKHLAK dengan:

- Berorientasi Pelayanan: Menjamin perangkat monitoring selalu berfungsi dengan baik;
- Akuntabel: Status Kondisi Perangkat dan pemanfaatannya tercatat dalam aplikasi berbasis digital.
- Kompeten: Peningkatan kemampuan teknis dalam pemeliharaan perangkat.
- Harmonis & Kolaboratif: Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
- Loyal: Konsistensi dalam mendukung tugas pengawasan frekuensi radio.
- Adaptif: Pemanfaatan teknologi pemantauan realtime.

### 6. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif

| Kinerja                                                                                                 | Indikator Kinerja                                    | Target | Capaian | Persentase |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| Meningkatnya kualitas pengendalian frekuensi radio, perangkat telekomunikasi, dan infrastruktur digital | Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif | 80%    | 100%    | 125%       |

**Tabel 3.23 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif**

Indikator Kinerja Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif memiliki target realisasi sebesar 80% pada tahun 2025. Berdasarkan data capaian hingga akhir Desember 2025, indikator tersebut berhasil mencapai 100%, melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat UPT dalam memastikan setiap pelanggaran yang dikenakan sanksi denda administratif ditangani secara tepat waktu, sesuai prosedur, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### I. Latar Belakang, Maksud, dan Tujuan

Kegiatan Penanganan Sanksi Denda Administratif merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas I Tangerang dalam menegakkan ketertiban penggunaan spektrum frekuensi dan perangkat telekomunikasi. Seiring meningkatnya intensitas pemanfaatan spektrum di wilayah Banten, potensi pelanggaran juga semakin beragam, seperti penggunaan perangkat tidak bersertifikat, penggunaan frekuensi tanpa izin, dan pelanggaran teknis lainnya. Untuk memperkuat penegakan hukum, diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Perditjen) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, yang menjadi pedoman resmi dalam memberikan sanksi denda administratif. Regulasi ini memastikan bahwa setiap tindakan penegakan dilakukan secara terukur, transparan, dan sesuai ketentuan.



*Gambar 3.13 Kegiatan Penanganan Sanksi Denda Administratif*

Kegiatan Penanganan Sanksi Denda Administratif pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang dimaksudkan untuk memastikan seluruh proses penegakan hukum administrasi di bidang spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi berjalan efektif, terstruktur, dan sesuai ketentuan Permen Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, serta Perdirjen SDPPI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi. Melalui kegiatan ini, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang bertujuan meningkatkan kepatuhan pengguna frekuensi terhadap regulasi teknis maupun administratif, mendorong tertib penggunaan spektrum sebagai sumber daya terbatas, serta meminimalkan potensi gangguan yang dapat menghambat layanan telekomunikasi.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses pemeriksaan, verifikasi pelanggaran, hingga pengenaan sanksi denda, sehingga menghasilkan pengelolaan spektrum frekuensi radio yang lebih tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Penanganan Sanksi Denda Administratif merupakan tahapan lanjutan yang hanya dapat dilaksanakan apabila kegiatan Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio serta Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi telah dilakukan. Pelanggaran yang ditemukan dari hasil monitoring dan penertiban tersebut menjadi dasar penetapan sanksi, termasuk sanksi denda administratif.

Jenis pelanggaran yang dapat dikenai denda administratif mencakup pelanggaran terkait Izin Stasiun Radio (ISR), Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR), serta pelanggaran penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan. Seluruh proses penanganan mengacu pada SOP Pengenaan Sanksi Denda Administratif, Permen Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, serta Perdirjen SDPPI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

Dengan dasar hukum yang jelas dan prosedur yang terstandarisasi, penanganan sanksi denda administratif dapat dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 3.14 Kegiatan Penanganan Sanksi Denda Administratif

## II. Capaian Target

Pada Tahun 2025 Indikator Kinerja Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif buatn narasi dan yang jelas dan rapi pada Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang di UPT selama Tahun 2025 memiliki target realisasi sebesar 80% dari Berdasarkan data capaian diketahui bahwa nilai dari realisasi sampai akhir Desember 2025 sebesar 100%.

| Sasaran Program                                                                                                 | Indikator Kinerja Sasaran Program                       | 2021   |           | 2022   |           | 2023   |           | 2024   |           | 2025   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                                                                                                                 |                                                         | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Meningkatnya kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio, perangkat telekomunikasi dan infrastruktur digital | Persentase (%)<br>Penanganan Sanksi Denda Administratif | 70%    | 100%      | 90%    | 100%      | 93%    | 100%      | 93%    | 100%      | 80%    | 100%      |

Tabel 3.24 Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Sanksi Denda Administratif

Berdasarkan data capaian selama periode 2021–2025, dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Persentase Penanganan Sanksi Denda Administratif telah tercapai secara optimal setiap tahun dengan realisasi 100%, selalu melampaui target yang ditetapkan. Hasil ini menggambarkan kinerja yang sangat efektif, responsif, dan konsisten dalam penegakan regulasi spektrum frekuensi radio serta perangkat telekomunikasi, sekaligus memperkuat ketertiban dan kepatuhan di sektor pos dan informatika.

Adapun Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Sanksi Denda Administratif Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

| No. | Nama Pengguna                | Frekuensi (MHz) | Jenis Pelanggaran             | No Surat Pemberitahuan Penetapan Denda | Verifikasi Penagihan |
|-----|------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 1   | PT. MAXINDO MITRA SOLUSI     | 5005            | FREKUENSI TIDAK SESUAI ISR    | 2001740/BALMON.36/KU.01.06/05/2025     | Terbayar             |
| 2   | PT. ABS MULTIMEDIA INDONESIA | 5010            | FREKUENSI TIDAK SESUAI ISR    | 2001737/BALMON.36/KU.01.06/05/2025     | Terbayar             |
| 3   | PT. PALAPA MEDIA INDONESIA   | 5005            | FREKUENSI TIDAK SESUAI ISR    | 2001739/BALMON.36/KU.01.06/05/2025     | Terbayar             |
| 4   | PT. GLOBAL MEDIA DATA PRIMA  | 5005            | FREKUENSI TIDAK SESUAI ISR    | 2000209/BALMON.36/KU.01.06/05/2025     | Terbayar             |
| 5   | PT. GLOBAL MEDIA DATA PRIMA  | 5010            | FREKUENSI TIDAK SESUAI ISR    | 2000209/BALMON.36/KU.01.06/05/2024     | Terbayar             |
| 6   | PT. DATA PRIMA SOLUSINDO     | 7674            | TIDAK SESUAI PARAMETER TEKNIS | 2001776/BALMON.36/KU.01.06/05/2025     | Terbayar             |
| 7   | PT. FIBER MEDIA INDONESIA    | 13159           | TANPA IZIN                    | 2000223/BALMON.36/KU.03.02/06/2025     | Terbayar             |
| 8   | PT. FIBER MEDIA INDONESIA    | 13105           | TANPA IZIN                    | 2000223/BALMON.36/KU.03.02/06/2025     | Terbayar             |
| 9   | PT. AMSL INDONESIA           | 368,8           | KADALUARSA                    | 2002139/BALMON.36/KU.03.02/09/2025     | Terbayar             |
| 10  | PT. INDOSAT TBK              | 23114           | TIDAK SESUAI PARAMETER TEKNIS | 2000243/DJSDPPI.4/KU.03.02/09/2025     | Terbayar             |
| 11  | PT. INDOSAT TBK              | 22106           | TIDAK SESUAI PARAMETER TEKNIS | 2000243/DJSDPPI.4/KU.03.02/09/2025     | Terbayar             |
| 12  | PT. INDOSAT TBK              | 23107           | TIDAK SESUAI PARAMETER TEKNIS | 2000243/DJSDPPI.4/KU.03.02/09/2025     | Terbayar             |
| 13  | PT. INDOSAT TBK              | 22249,5         | TIDAK SESUAI PARAMETER TEKNIS | 2000243/DJSDPPI.4/KU.03.02/09/2025     | Terbayar             |
| 14  | TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK | 22498           | TIDAK SESUAI PARAMETER TEKNIS | 2000245/DJSDPPI.4/KU.03.02/09/2025     | Terbayar             |
| 15  | PT. INDOSAT TBK              | 23257,5         | TIDAK SESUAI PARAMETER TEKNIS | 2000243/DJSDPPI.4/KU.03.02/09/2025     | Terbayar             |
| 16  | PT. INDOSAT TBK              | 13076,5         | TIDAK SESUAI PARAMETER TEKNIS | 2000243/DJSDPPI.4/KU.03.02/09/2025     | Terbayar             |
| 17  | PT. INDOSAT TBK              | 12810,5         | TIDAK SESUAI PARAMETER TEKNIS | 2000243/DJSDPPI.4/KU.03.02/09/2025     | Terbayar             |
| 18  | TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK | 22218           | TIDAK SESUAI PARAMETER TEKNIS | 2000245/DJSDPPI.4/KU.03.02/09/2025     | Terbayar             |
| 19  | TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK | 22386           | TIDAK SESUAI PARAMETER TEKNIS | 2000245/DJSDPPI.4/KU.03.02/09/2025     | Terbayar             |
| 20  | PT. SMART TELECOM            | 13059           | TANPA IZIN                    | 2000249/DJSDPPI.4/KU.03.02/09/2025     | Terbayar             |
| 21  | PT. SMART TELECOM            | 12793           | TANPA IZIN                    | 2000249/DJSDPPI.4/KU.03.02/09/2025     | Terbayar             |
| 22  | TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK | 22162           | TIDAK SESUAI PARAMETER TEKNIS | 2000245/DJSDPPI.4/KU.03.02/09/2025     | Terbayar             |
| 23  | TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK | 23030           | TIDAK SESUAI PARAMETER TEKNIS | 2000245/DJSDPPI.4/KU.03.02/09/2025     | Terbayar             |
| 24  | TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK | 23338           | TIDAK SESUAI PARAMETER TEKNIS | 2000245/DJSDPPI.4/KU.03.02/09/2025     | Terbayar             |
| 25  | PT. SMART TELECOM            | 14417           | TANPA IZIN                    | 2000249/DJSDPPI.4/KU.03.02/09/2025     | Terbayar             |

| No. | Nama Pengguna                                            | Frekuensi (MHz) | Jenis Pelanggaran | No Surat Pemberitahuan Penetapan Denda | Verifikasi Penagihan |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 26  | PT. XL AXIATA, TBK                                       | 11245           | TANPA IZIN        | 2000249/DJSDPPI.4/KU.03.02/09/2025     | Terbayar             |
| 27  | PT. AGGIOMULTIMEX INTERNATIONAL GROUP                    | 161,29          | TANPA IZIN        | 2002495/BALMON.36/KU.03.02/11/2025     | Terbayar             |
| 28  | PT. PRIMA INDAH LESTARI                                  | 156,4           | TANPA IZIN        | 2002488/BALMON.36/KU.03.02/11/2025     | Terbayar             |
| 29  | PT. TRIMITA MEBELINDO                                    | 141,75          | TANPA IZIN        | 2002509/BALMON.36/KU.03.02/11/2025     | Terbayar             |
| 30  | PT. MITRA GARDA MANDIRI                                  | 462,623         | TANPA IZIN        | 2002603/BALMON.36/KU.03.02/2025        | Terbayar             |
| 31  | PT. GARDA CIPTA SENTOSA / PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK | 151,775         | TANPA IZIN        | 2002799/BALMON.36/KU.03.02/12/2025     | Terbayar             |
| 32  | PT. KENCANA GEMILANG (MIYAKO)                            | 149,83          | TANPA IZIN        | 2002800/BALMON.36/KU.03.02/12/2025     | Terbayar             |
| 33  | PT. RIFQI GAYO PERKASA                                   | 462,928         | TANPA IZIN        | 2002137/BALMON.36/KU.03.02/09/2025     | Terbayar             |
| 34  | PT. RADIO JATI YASKI MANDIRI                             | 324,15          | KADALUARSA        | 2001983/DJSDPPI.4/KU.03.02/07/2025     | Terbayar             |
| 35  | PT. SAKATA INX INDONESIA                                 | 408,075         | TANPA IZIN        | 2002887/BALMON.36/KU.03.02/12/2025     | Terbayar             |
| 36  | PT. MEGA DHARMA YUDA                                     | 157,65          | TANPA IZIN        | 2002888/BALMON.36/KU.03.02/12/2025     | Terbayar             |
| 37  | PT. HARINDRA SUKSES BERSAMA                              | 418,7           | TANPA IZIN        | 2002877/BALMON.36/KU.03.02/12/2025     | Terbayar             |
| 38  | PT. BOGA MITRA USAHA / RM. MANG ENGKING                  | 145,15          | TANPA IZIN        | 2002863/BALMON.36/KU.03.02/12/2025     | Terbayar             |
| 39  | PT. LUTFI RIZKY ABADI / PT. LYRA                         | 170,725         | TANPA IZIN        | 2002866/BALMON.36/KU.03.02/12/2025     | Terbayar             |

**Tabel 3.25 Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Sanksi Denda Administratif Tahun 2025**

Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan sanksi denda administratif tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang telah berhasil menyelesaikan seluruh 39 kasus pelanggaran yang ditetapkan melalui Surat Pemberitahuan Penetapan Denda. Pelanggaran tersebut meliputi frekuensi tidak sesuai ISR, tidak sesuai parameter teknis, tanpa izin, serta kadaluwarsa. Seluruh kasus tersebut telah 100% diselesaikan dengan status “Terbayar”.

Berdasarkan formula perhitungan capaian Kegiatan Penanganan Sanksi Denda Administratif Tahun 2025 :

**Formula:**

$$\frac{\sum \text{Inv. Denda yang terbayar} + (\text{Bobot} \times \text{Tindak Lanjut Inv. Denda Belum terbayar}) + \text{Inv. Baru Belum Jatuh Tempo}}{\sum \text{Inv Denda Administratif}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian : } 39 + 0 + 0 = 39$$

$$: 39/39 \times 100\% = 100\%$$

Capaian penuh ini menunjukkan efektivitas proses monitoring, penertiban, dan pengenaan sanksi yang dilakukan secara konsisten sesuai ketentuan, termasuk Permen Kominfo No. 9 Tahun 2023 serta Perdirjen SDPPI No. 3 Tahun 2024. Tingginya tingkat kepatuhan pengguna frekuensi radio dalam menyelesaikan kewajiban dendanya mencerminkan keberhasilan Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum di wilayah Provinsi Banten.

Secara keseluruhan, pencapaian 100% ini menjadi indikator kuat bahwa mekanisme pengendalian spektrum frekuensi radio telah berjalan optimal, responsif, dan mampu mendorong tata kelola frekuensi yang lebih tertib, legal, dan sesuai regulasi yang berlaku.

### III. Analisa yang terkait Indikator Kinerja Secara Umum dan Holistik

Penanganan Sanksi Denda Administratif di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas I Tangerang secara umum menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi denda administratif merupakan instrumen penegakan hukum untuk mendorong kepatuhan pengguna spektrum frekuensi radio terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator kinerja utama tercermin dari ketepatan penerapan sanksi sesuai jenis pelanggaran, kejelasan proses administrasi, serta konsistensi dalam penetapan dan penagihan denda berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Secara holistik, kinerja penanganan sanksi denda administratif tidak hanya diukur dari jumlah sanksi yang dijatuhkan atau nilai denda yang ditetapkan, tetapi juga dari dampaknya terhadap perubahan perilaku pengguna frekuensi. Penanganan sanksi yang efektif berkontribusi pada peningkatan tingkat kepatuhan, penurunan pelanggaran berulang, serta penguatan kesadaran hukum pengguna spektrum. Selain itu, keterpaduan antara kegiatan monitoring, pemeriksaan, penanganan gangguan, dan penegakan sanksi mencerminkan pengelolaan spektrum yang komprehensif dan berkeadilan.

### IV. Benchmarking Capaian Kinerja Dengan UPT Lainnya

Berdasarkan pendekatan benchmarking, Persentase (%) kinerja Penanganan Sanksi Denda Administratif pada Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang dibandingkan Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya bahwa sama-sama tercapai sebesar 125% sehingga menunjukkan kinerja yang optimal, sesuai target dan melebihi target.

| Nama IKU                                                | UPT DJID            | Target | Capaian | Keterangan                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase (%)<br>Penanganan Sanksi Denda Administratif | Balmon<br>Tangerang | 80%    | 100%    | Persentase Capaian Balmon<br>Tangerang dan Balmon Surabaya<br>sama-sama mencapai 125% dan<br>telah melampaui target. |
| Persentase (%)<br>Penanganan Sanksi Denda Administratif | Balmon<br>Surabaya  | 80%    | 100%    |                                                                                                                      |

**Tabel 3.26 Benchmarking Capaian Kinerja Penanganan Sanksi Denda Administratif**

Hasil ini menunjukkan bahwa unit kerja dengan kinerja unggul mampu menerapkan sanksi secara tepat, konsisten, dan akuntabel, sehingga memberikan efek jera yang proporsional dan mendukung terciptanya tertib penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja.

### V. Faktor Kendala/Hambatan pada Pencapaian Target

Dalam pelaksanaan penanganan sanksi denda administratif, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain masih adanya pengguna frekuensi radio yang kurang memahami kewajiban teknis dan administrasi penggunaan spektrum, lambatnya respon pengguna terhadap proses klarifikasi pelanggaran, serta terbatasnya kemampuan sebagian pelaku usaha dalam menyiapkan dokumen pendukung saat verifikasi. Selain itu, disparitas kompetensi teknis di lapangan juga menjadi tantangan dalam mengidentifikasi kesesuaian parameter teknis pada beberapa jenis perangkat.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang berhasil mencapai target 80% yang ditetapkan untuk kegiatan Penanganan Sanksi Denda Administratif pada tahun 2025, bahkan melampauinya dengan capaian 100% penanganan dan penyelesaian pembayaran seluruh 30 kasus pelanggaran. Pencapaian ini menunjukkan bahwa proses monitoring, penertiban, penetapan denda, dan penagihan telah berjalan secara efektif, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan regulasi.

Untuk mengoptimalkan proses penanganan di tahun-tahun berikutnya, diperlukan beberapa langkah perbaikan, antara lain peningkatan kegiatan sosialisasi mengenai kewajiban ISR, kepatuhan parameter teknis, dan mekanisme pengenaan sanksi kepada pelaku usaha dan pengguna layanan. Koordinasi yang lebih intensif dengan penyelenggara telekomunikasi juga perlu diperkuat untuk mempercepat proses klarifikasi pelanggaran. Selain itu, optimalisasi penggunaan sistem digital pengawasan dan penagihan serta peningkatan kompetensi teknis personel akan menjadi solusi utama dalam meminimalkan hambatan dan meningkatkan efektivitas pengendalian.

## VI. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Sebagai bentuk penguatan pengawasan dan penegakan kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio, tindak lanjut pada kegiatan Penanganan Sanksi Denda Administratif dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang melakukan pemantauan ulang (follow-up monitoring) terhadap seluruh objek pelanggaran untuk memastikan bahwa frekuensi telah digunakan sesuai ketentuan ISR, parameter teknis telah diperbaiki, serta tidak ada lagi penggunaan perangkat atau frekuensi tanpa izin.

Selain itu, pihak pengguna yang telah dikenakan sanksi diberikan pembinaan teknis terkait prosedur perizinan ISR, pemenuhan standar perangkat, serta kewajiban administrasi agar tidak terjadi pelanggaran berulang. Balai Monitor juga melakukan koordinasi lanjutan dengan Dirjen Infrastruktur Digital dalam hal validasi pembayaran, pencatatan sanksi, dan penginputan pada sistem informasi resmi sehingga seluruh proses terselesaikan secara akuntabel.

Untuk kasus yang memerlukan pengawasan tambahan, dilakukan monitoring berkala guna memastikan kepatuhan berkelanjutan. Langkah-langkah tindak lanjut ini memastikan bahwa setiap sanksi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif, sehingga mendorong pengguna frekuensi radio untuk mematuhi regulasi dan menjaga ketertiban spektrum frekuensi di wilayah Provinsi Banten.

## VII. Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan sanksi denda administratif di tahun berikutnya, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang perlu melakukan beberapa perbaikan strategis.

1. Diperlukan penguatan integrasi sistem informasi penagihan dan verifikasi pembayaran agar proses penetapan hingga pelunasan denda dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan transparan. Peningkatan ini juga mencakup optimalisasi penggunaan aplikasi internal untuk meminimalkan keterlambatan dan kesalahan administrasi;
2. Perlu dilakukan peningkatan sosialisasi dan pembinaan teknis kepada pengguna frekuensi radio, khususnya terkait perubahan regulasi, ketentuan ISR, parameter teknis, dan kewajiban penggunaan perangkat tersertifikasi. Edukasi yang lebih intensif diharapkan dapat menurunkan jumlah pelanggaran berulang;
3. Selain itu, pengawasan dapat diperkuat dengan monitoring yang lebih terjadwal dan berbasis risiko, sehingga objek yang berpotensi melakukan pelanggaran dapat diawasi lebih awal. Kerja sama dengan Ditjen Infrastruktur Digital dan instansi terkait juga perlu terus ditingkatkan untuk memperlancar proses pengenaan sanksi dan validasi pembayaran.

Rekomendasi ini diharapkan mampu meningkatkan ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio sekaligus mendorong penyelesaian sanksi yang lebih cepat, tepat, dan sesuai standar regulasi.

## VIII. Efisiensi

Pelaksanaan kegiatan Penanganan Sanksi Denda Administratif pada periode ini menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Hal ini tercermin dari proses penanganan yang lebih terstruktur, pemanfaatan sumber daya secara optimal, serta percepatan penyelesaian setiap kasus pelanggaran. Efisiensi tersebut terlihat dari penyederhanaan alur kerja mulai dari identifikasi pelanggaran, penyusunan dokumen rekomendasi sanksi, penerbitan surat ketetapan, hingga proses penagihan dan verifikasi pembayaran denda.

Penggunaan sistem administrasi berbasis digital turut berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, sehingga waktu pemrosesan setiap kasus dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas penanganan. Koordinasi yang lebih cepat antara tim pengawasan, penindakan, serta bagian penagihan memungkinkan setiap tahapan berjalan lebih konsisten dan tepat waktu.

Selain itu, tingkat kepatuhan para pemegang ISR yang semakin baik berdampak pada berkurangnya jumlah pelanggaran berulang, sehingga beban penanganan menjadi lebih ringan dan efisien. Seluruh proses yang telah berjalan menunjukkan bahwa kegiatan Penanganan Sanksi Denda Administratif tidak hanya mencapai target kinerja yang ditetapkan, tetapi juga berhasil mengoptimalkan penggunaan waktu, tenaga, dan sumber daya secara efektif.

## IX. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Pelaksanaan Penanganan Sanksi Denda Administratif telah menerapkan nilai BerAKHLAK melalui pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, proses kerja yang akuntabel dan transparan, serta kompeten dalam melakukan verifikasi dan penetapan denda.

Tim bekerja secara harmonis dan menjalin koordinasi yang baik dengan pihak terkait, menunjukkan sikap loyal terhadap tugas, serta tetap menjaga adaptabilitas dalam menggunakan sistem dan prosedur digital. Dengan penerapan nilai-nilai tersebut, proses penanganan sanksi dapat diselesaikan tepat waktu, efisien, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa capaian untuk indikator “Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif” telah tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang ditetapkan. Capaian ini dibuktikan dengan berhasil diselesaikannya seluruh 30 kasus pelanggaran yang telah ditetapkan melalui Surat Pemberitahuan Penetapan Denda, di mana seluruhnya telah terbayar. Dengan terselesaikannya seluruh kasus tersebut, indikator kinerja Penanganan Sanksi Denda Administratif tahun 2025 dinyatakan tercapai secara penuh (100%).

Hasil ini menunjukkan efektivitas proses penanganan, ketepatan langkah tindak lanjut, serta meningkatnya kepatuhan para pengguna spektrum frekuensi radio terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 3.15 Dokumentasi Kegiatan Penanganan Sanksi Denda Administratif

### 7. Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

| Kinerja                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                        | Target | Capaian | Persentase |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| Meningkatnya kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio, perangkat telekomunikasi, dan infrastruktur digital | Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan Infrastruktur Digital | 100%   | 100%    | 100%       |

Tabel 3.27 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan Infrastruktur Digital

Indikator Kinerja Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan Infrastruktur Digital ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2025. Hingga akhir Desember 2025, realisasi telah mencapai 100% sesuai target. Capaian ini menunjukkan komitmen UPT dalam menjamin ketersediaan data pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital secara lengkap, akurat, dan andal bagi masyarakat.

Indikator ini mampu menyerap anggaran sebesar Rp.29.052.600,- (100%) dari pagu anggaran non-blokir sebesar Rp.29.053.000,- Tingkat serapan yang optimal dengan capaian kinerja melampaui target menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan efisien, dengan pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

### I. Latar Belakang, Maksud, dan Tujuan

Kegiatan Pengukuran Kualitas Layanan Infrastruktur Digital dilaksanakan terhadap penyelenggaraan jaringan bergerak seluler di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas I Tangerang. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran Standar Kualitas Layanan Jaringan Bergerak Seluler, melalui dua metode utama, yaitu Static Test dan Drive Test, serta mencakup 80% kabupaten/kota di wilayah kerja UPT. Hasil pengukuran disampaikan kepada Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital untuk dilakukan pengolahan data (post-processing) oleh Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT), kemudian dikembalikan kepada Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang untuk dianalisis. Kegiatan ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Direktorat sekaligus memberikan gambaran kualitas layanan jaringan bergerak seluler di Provinsi Banten sebagai bahan evaluasi peningkatan layanan kepada masyarakat.



Gambar 3.16 Kegiatan Pengukuran Kualitas Layanan

### II. Capaian Target

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan Infrastruktur Digital di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang ditetapkan dengan target pelaksanaan monitoring pada 80% kabupaten/kota di wilayah kerja UPT. Dari 8 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang telah melakukan pengukuran kualitas layanan di seluruh Kabupaten/Kota yang menjadikan perjanjian kinerja untuk kegiatan ini mencapai 100%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyediaan data hasil pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital telah dilaksanakan sesuai target dalam Perjanjian Kinerja (PK) UPT Tahun 2025.

| Kinerja                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                        | 2025   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|                                                                                                                 |                                                                          | Target | Realisasi |
| Meningkatnya kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio, perangkat telekomunikasi dan infrastruktur digital | Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan Infrastruktur Digital | 85%    | 93%       |

Tabel 3.28 Capaian Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan Infrastruktur Digital

Berdasarkan data capaian selama periode 2025 menunjukkan bahwa Indikator Kinerja Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan Infrastruktur Digital telah tercapai secara optimal dengan realisasi 100% yang dimana sesuai target yang sudah ditetapkan. Capaian 100% ini menunjukkan bahwa seluruh tahapan pengukuran, mulai dari persiapan administrasi dan perangkat, penentuan rute dan titik *Point of Interest*, hingga pengiriman *logfile* dan laporan telah diselesaikan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur Pengukuran Standar Kualitas Layanan Jaringan Bergerak Seluler.

| UPT              | Target | Capaian |
|------------------|--------|---------|
| Balmon Tangerang | 100%   | 100%    |
| Balmon Jakarta   | 100%   | 100%    |
| Balmon Mataram   | 100%   | 100%    |

Capaian ini juga merefleksikan kinerja UPT yang sangat efektif dan andal dalam melaksanakan pengukuran kualitas layanan di 80% kabupaten/kota wilayah kerja UPT.

**Tabel 3.29 Benchmarking Capaian Kinerja Dengan UPT Lainnya**

Hasil kinerja ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat, antara lain:

- ### 1. Gambaran Kualitas Layanan Lebih Komprehensif

Cakupan pengukuran yang lebih luas menghasilkan data yang lebih representatif. Masyarakat memperoleh manfaat tidak langsung berupa pengawasan yang lebih menyeluruh, termasuk di wilayah yang sebelumnya belum menjadi prioritas pengukuran.

- ## 2. Percepatan Perbaikan oleh Operator

Semakin banyak data yang tersedia, semakin cepat area dengan kualitas layanan rendah teridentifikasi. Hal ini mendorong operator melakukan optimalisasi jaringan lebih dini, sehingga gangguan atau penurunan kualitas dapat segera ditangani.

- ### 3. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi

Capaian di atas target menunjukkan komitmen pengawasan yang kuat. Masyarakat mendapatkan jaminan bahwa kualitas layanan telekomunikasi tidak hanya dipantau secara administratif, tetapi benar-benar diuji di lapangan.

- #### 4. Peningkatan Kualitas Pengalaman Pengguna (QoE)

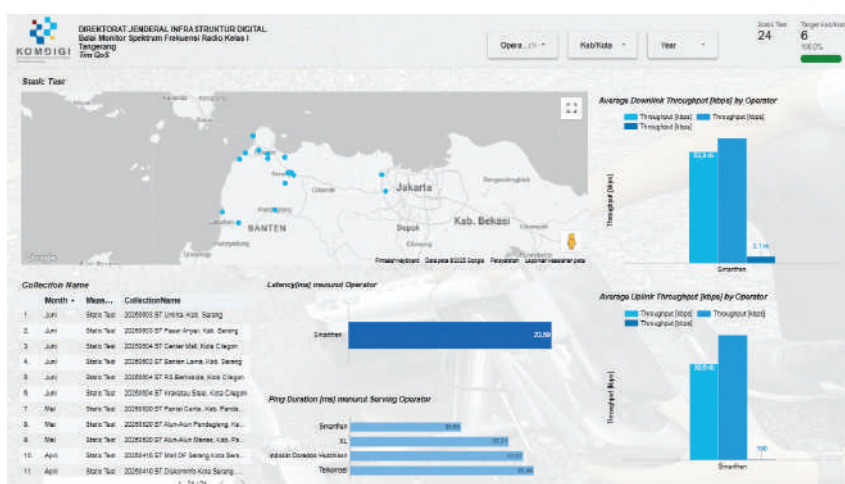
Dengan lebih banyak area terukur dan dievaluasi, potensi peningkatan kecepatan akses data, stabilitas koneksi, kualitas panggilan suara menjadi lebih besar, sehingga pengalaman masyarakat dalam menggunakan layanan digital semakin baik.

- ## 5. Dukungan terhadap Aktivitas Sosial dan Ekonomi Digital

Kualitas layanan yang terpantau dan ditingkatkan berdampak pada kelancaran pembelajaran daring, layanan pemerintahan digital, transaksi ekonomi dan UMKM berbasis online, komunikasi di kawasan strategis dan objek vital.

Adapun Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Kualitas Layanan Infrastruktur Digital sebagai berikut :

### a) Metode Static Test

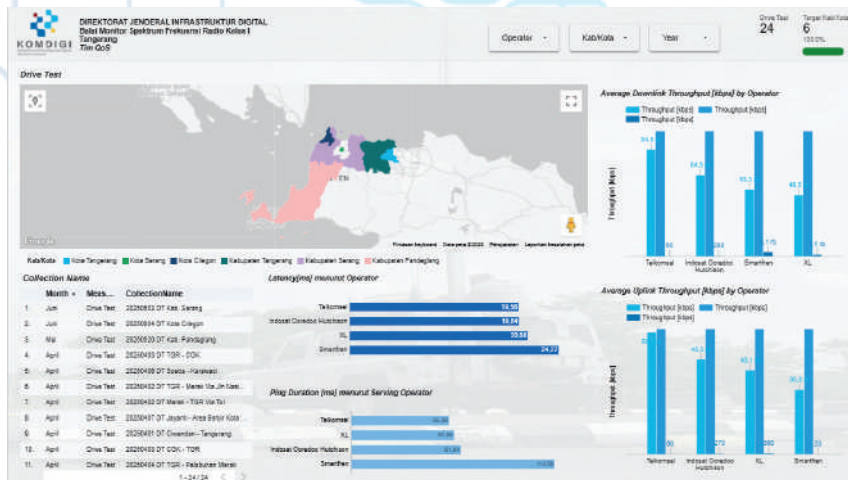


Pelaksanaan pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital dengan metode Static Test telah berjalan sesuai rencana. Berdasarkan data pada dashboard, tercatat sebanyak 24 titik Static Test telah dilaksanakan pada berbagai lokasi di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang. Jumlah tersebut menunjukkan capaian 100% terhadap target pengukuran yang telah ditetapkan untuk periode pelaporan.

Pengukuran dilakukan pada beberapa operator seluler dan meliputi *parameter latency, ping duration, throughput, browsing*, dan lain sebagainya. Hasil pengukuran di berbagai titik lokasi memberikan gambaran komprehensif mengenai performa kualitas layanan operator, yang selanjutnya menjadi dasar analisis untuk peningkatan kualitas layanan telekomunikasi di wilayah Banten dan sekitarnya.

Dengan tercapainya seluruh target titik pengukuran, kegiatan *Static Test* dinyatakan berhasil dan memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam program penyediaan data hasil pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital.

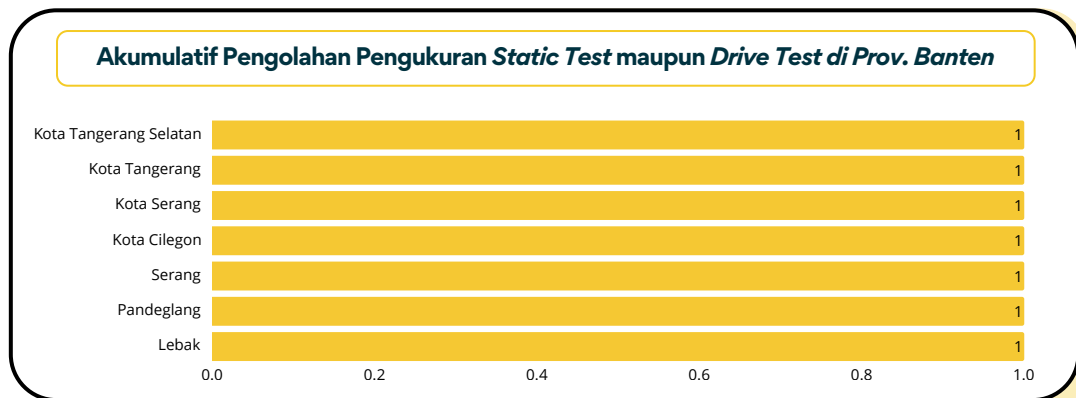
### b) Metode Drive Test



Kegiatan pengukuran kualitas layanan jaringan seluler menggunakan metode Drive Test telah dilaksanakan pada 8 rute/lokasi pengukuran, dengan capaian 80% terhadap target Kabupaten/Kota. Drive test dilaksanakan di wilayah Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Lebak.

Pengukuran dilakukan dengan menjangkau berbagai karakteristik wilayah dengan prioritas di jalan arteri, mencakup jalur perkotaan, kawasan padat penduduk, jalur utama transportasi, kantor pemerintahan, pusat keramaian, hingga area perbatasan kabupaten/kota, sehingga data yang diperoleh mampu merepresentasikan kualitas layanan secara komprehensif.

Capaian 100% pelaksanaan *Drive Test* menegaskan bahwa seluruh target pemantauan kualitas layanan infrastruktur digital melalui metode ini telah terpenuhi secara keseluruhan dan sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan



Grafik Akumulatif Pengolahan di Kabupaten/Kota Provinsi Banten menunjukkan bahwa seluruh wilayah mencapai 100% pengolahan. Capaian ini mencerminkan bahwa kegiatan Static Test maupun Drive Test telah dilaksanakan secara lengkap di seluruh kabupaten/kota, sehingga seluruh data pengukuran berhasil diproses dan memenuhi target pemantauan kualitas layanan infrastruktur digital.

$$\text{Capaian} = (\text{Juml Kab-kota sudah diukur} / 80\% \times 8 \text{ Kab-Kota di Banten}) = (6/8) = 125\%$$

Hal ini menegaskan bahwa seluruh wilayah sasaran telah memenuhi target minimal pengukuran, sehingga kegiatan pemantauan kualitas layanan infrastruktur digital berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil optimal.

### III. Analisa yang terkait Indikator Kinerja Secara Umum dan Holistik

Secara umum menunjukkan bahwa ketersediaan data pengukuran Kualitas Layanan merupakan indikator penting dalam menilai kualitas dan keandalan layanan telekomunikasi di wilayah kerja. Indikator kinerja utama tercermin dari kemampuan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang dalam melaksanakan pengukuran kualitas layanan secara terencana, menghasilkan data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta terdokumentasi sesuai dengan standar yang berlaku.

Secara holistik, kinerja ketersediaan data pengukuran kualitas layanan tidak hanya diukur dari jumlah data yang dihasilkan, tetapi juga dari tingkat pemanfaatannya dalam mendukung pengawasan dan evaluasi kinerja penyelenggara layanan.

Data yang andal berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan telekomunikasi, perlindungan kepentingan pengguna, serta pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Selain itu, integrasi data pengukuran dengan kegiatan monitoring dan pemeriksaan mencerminkan pengelolaan spektrum dan layanan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Berdasarkan pendekatan *benchmarking*, kinerja ketersediaan data hasil pengukuran kualitas layanan di Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang dibandingkan dengan standar ideal dan praktik terbaik unit kerja sejenis. Indikator perbandingan meliputi konsistensi metodologi pengukuran, ketepatan waktu penyajian data, tingkat akurasi, serta kemudahan akses dan pemanfaatan data. Hasil *benchmarking* menunjukkan bahwa unit kerja dengan kinerja unggul mampu menyediakan data pengukuran yang valid, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung penguatan tata kelola pengawasan layanan telekomunikasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

#### IV. Faktor Kendala/Hambatan pada Pencapaian Target

Dalam pelaksanaan Pengukuran Kualitas Layanan Infrastruktur Digital terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Gangguan (*Bug*) pada aplikasi pengukuran dan pembaharuan lisensi, hal ini dapat menyebabkan pengukuran terhenti secara tiba-tiba sehingga pengukuran harus diulang dari awal.
2. Perbedaan skenario pengujian pada pengukuran membuat ketidakkonsistenan pada hasil pengukuran, menyulitkan untuk melakukan perbandingan dan analisis.
3. Perbedaan spesifikasi perangkat (*UE*) Setiap perangkat memiliki kemampuan penerimaan sinyal (*receiver sensitivity*), dukungan pita frekuensi, dan teknologi (4G/5G, CA, MIMO) yang berbeda. Perbedaan ini dapat menyebabkan variasi hasil pengukuran meskipun dilakukan pada lokasi dan waktu yang sama.

Meskipun menghadapi tantangan tersebut, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang berhasil memenuhi target kegiatan Pengukuran Kualitas Layanan Infrastruktur Digital tahun 2025 dengan capaian 100% pelaksanaan dari rencana kegiatan untuk seluruh rute dan titik uji, serta tersusunnya laporan analisis performa dari parameter Kualitas Layanan Infrastruktur Digital secara tepat waktu dan sesuai standar teknis yang ditetapkan.

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pengukuran Kualitas Layanan Infrastruktur Digital di tahun-tahun berikutnya diperlukan sejumlah langkah perbaikan antara lain, optimalisasi perangkat uji secara berkala yang lebih adaptif terhadap kondisi lapangan dan data terbaru, serta memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan tim pengolahan data pada PMT yang bertujuan juga untuk optimalisasi script/campaign jika ditemukan adanya ruang untuk perbaikan maupun error, sehingga meningkatkan keakuratan data kualitas layanan yang dihasilkan. Upaya – upaya perbaikan ini diharapkan mampu mengurangi hambatan teknis di lapangan, memperkaya kualitas data, dan memperkuat efektivitas pengawasan kualitas layanan infrastruktur digital bagi masyarakat.

#### V. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Sebagai bagian dari penguatan pengawasan Kualitas Layanan Infrastruktur Digital, tindak lanjut pada kegiatan Pengukuran Kualitas Layanan Infrastruktur Digital dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang melakukan analisis lanjutan (*post-analysis review*) terhadap seluruh hasil pengukuran untuk memastikan bahwa parameter performa seperti kecepatan unduh dan unggah, *latency*, kualitas panggilan *WhatsApp*, performa *streaming*, serta performa *browsing* telah dipetakan secara komprehensif pada setiap titik uji.

Selain itu dilakukan koordinasi erat dengan Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) untuk menyampaikan temuan saat kegiatan pengukuran, memberikan umpan balik dari data hasil olahan PMT, serta mengoptimalkan mekanisme pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas dari data *output* yang dihasilkan.

#### VI. Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya

Untuk meningkatkan efektivitas Pengukuran Kualitas Layanan Infrastruktur Digital di tahun berikutnya, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang perlu melakukan beberapa perbaikan strategis.

1. Diperlukan optimalisasi sistem alur data pengukuran kualitas layanan yang terintegrasi sehingga pemrosesan data hasil pengukuran menjadi lebih efisien dan meningkatkan kualitas dari analisis data hasil pengukuran.
2. Perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala untuk perangkat agar tidak terjadi error saat pengukuran.
3. Perlu dilakukan peningkatan kompetensi teknis personel secara berkala, terutama mengenai metodologi

pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital, pengetahuan mendalam terkait parameter performa (seperti *throughput*, *latency*, *MOS*, dan *buffering*), serta penggunaan perangkat uji secara efektif. Pelatihan dan pembaruan pengetahuan secara berkala akan meningkatkan kualitas pengukuran dan keandalan analisis.

4. Selain itu, koordinasi dengan Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) perlu diperkuat, baik untuk memperoleh data feedback dari hasil pemrosesan data pengukuran maupun menyelaraskan rencana peningkatan kualitas layanan di area yang teridentifikasi mengalami penurunan performa. Pengawasan juga dapat ditingkatkan melalui perencanaan rute yang lebih terjadwal dan berbasis prioritas wilayah sehingga area potensial dapat diawasi lebih cepat.

Rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan dampak pengawasan kualitas layanan infrastruktur digital, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh layanan yang lebih stabil, cepat, dan konsisten di wilayah kab/kota provinsi Banten.

## VII. Efisiensi

Pelaksanaan kegiatan Pengukuran Kualitas Layanan Infrastruktur Digital pada tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi baik. Efisiensi tersebut tercermin dari pelaksanaan pengukuran yang terstruktur, perencanaan rute pengawasan yang optimal, serta pemanfaatan perangkat dan sumber daya secara tepat guna sehingga seluruh titik pengawasan dapat diselesaikan sesuai target yang sudah ditentukan. Penyederhanaan proses mulai dari perencanaan lokasi pengukuran, pelaksanaan pengambilan data kualitas layanan, hingga tahap validasi serta analisis data, turut mempercepat siklus kerja tanpa mengurangi kualitas dari hasil pengukuran.

Koordinasi yang lebih responsif antara tim lapangan juga memungkinkan proses pengambilan data berlangsung lebih efektif dan meminimalkan potensi kesalahan teknis.

Selain itu, meningkatnya pemahaman terhadap metodologi pengukuran serta meningkatnya keterampilan teknis personel berdampak pada berkurangnya pengulangan pengambilan data dan mempersingkat waktu operasional. Secara keseluruhan, efisiensi ini menunjukkan bahwa kegiatan Pengukuran Kualitas Layanan Infrastruktur Digital tidak hanya mampu memenuhi target kinerja, tetapi juga berhasil mengoptimalkan penggunaan waktu, tenaga, perangkat, dan sumber daya secara efektif.

## VIII. Implementasi budaya BerAKHLAK

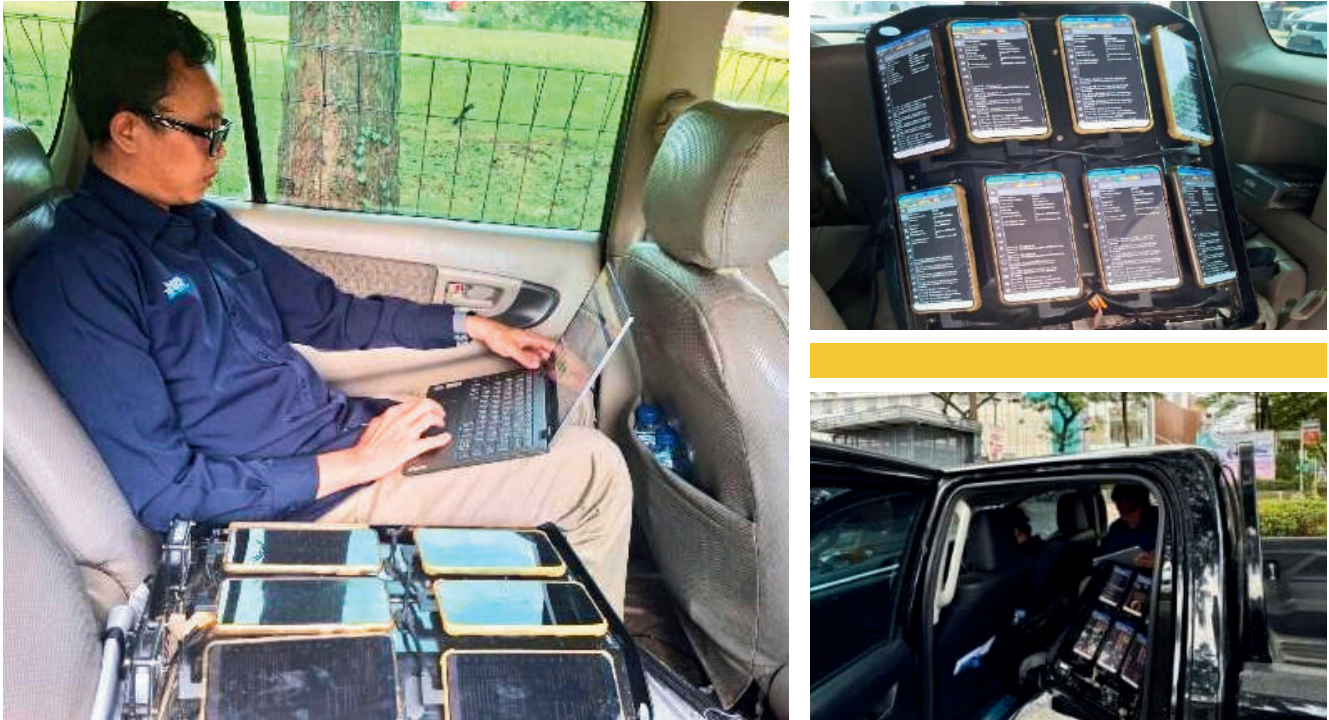
Implementasi budaya nilai **BerAKHLAK** dalam Pengukuran Kualitas Layanan Infrastruktur Digital tampak jelas sejak tahap perencanaan hingga pelaporan. Nilai Berorientasi Pelayanan diwujudkan melalui komitmen tim untuk menghadirkan hasil pengukuran yang objektif, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Setiap rute pengawasan, titik pengambilan sampel, dan setiap parameter performa mulai dari data kualitas browsing hingga streaming dipetakan dengan cermat agar hasil akhirnya benar-benar menggambarkan kualitas layanan digital yang dirasakan pengguna di lapangan. Pendekatan ini memastikan bahwa masyarakat menjadi pusat perhatian dalam setiap langkah pengawasan. Nilai Akuntabel diterapkan melalui tata kelola pengukuran yang terdokumentasi dengan baik, penggunaan perangkat yang resmi, serta proses validasi data yang dilakukan dengan cermat.

Dengan demikian hasil pengukuran menjadi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar rekaman teknis. Kemudian dalam pelaksanaan lapangan, nilai Kompeten hadir melalui kapabilitas tim baik dalam memahami metodologi pengambilan data kualitas layanan, maupun pemahaman data parameter kualitas layanan karena kompetensi yang kuat menjadikan proses pengukuran lebih presisi dan minim dari kesalahan. Nilai Harmonis dan Kolaboratif tercermin dari koordinasi yang erat antara tim lapangan sampai tim Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT), karena pengawasan kualitas layanan infrastruktur digital adalah sebuah ekosistem kerja sama yang memungkinkan data temuan teknis dikonversi menjadi perbaikan nyata oleh jaringan operator seluler. Komunikasi yang terbuka dan saling menghargai membantu mempercepat klarifikasi, meminimalkan miskomunikasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif.

Pada saat yang sama nilai **Loyal dan Adaptif** terlihat dari konsistensi tim dalam menjalankan mandat pengawasan meskipun situasi lapangan sering berubah dan cuaca yang tidak bersahabat, namun Tim tetap menjalankan pengukuran sesuai standar dengan tetap menyesuaikan strategi teknis ketika kondisi di lapangan menuntut pendekatan berbeda. Ketekunan dan kemampuan beradaptasi ini memastikan kegiatan pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital tetap berjalan efektif dan tepat waktu.

Secara keseluruhan, penerapan nilai **BerAKHLAK** membuat kegiatan Pengukuran Kualitas Layanan Infrastruktur Digital bukan hanya sekadar proses teknis, tetapi juga sebuah praktik pelayanan publik yang berintegritas yang

Berdasarkan penjelasan pada halaman sebelumnya, diketahui bahwa capaian untuk indikator “Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan Infrastruktur Digital” telah tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) dan dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah mencapai target secara menyeluruh. Seluruh proses pengukuran, baik melalui Static Test maupun Drive Test, berhasil dilaksanakan 100% sesuai rencana dan memenuhi standar Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa data kualitas layanan yang dihasilkan telah lengkap, valid, dan siap digunakan sebagai dasar analisis serta pengambilan kebijakan peningkatan kualitas layanan infrastruktur digital.



Gambar 3.17 Dokumentasi Kegiatan Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan Infrastruktur Digital

## 8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (SOR) melalui Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) dan *Maritime On The Spot* (MOTS) - Izin Komunikasi Radio Nelayan (IKRAN) oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio secara tertib, efisien, dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai implementasi kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan telekomunikasi, khususnya dalam pemberian legalitas kompetensi operator radio serta peningkatan keselamatan dan keandalan komunikasi radio pada kegiatan amatir radio dan sektor perikanan.

Capaian kinerja penyelenggaraan layanan ini diukur melalui indikator kinerja utama, antara lain persentase pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) telah mencapai target 100%, jumlah dan persentase penerbitan Izin Komunikasi Radio Nelayan (IKRAN) melalui layanan MOTS juga telah mencapai target 100%.



Indikator tersebut menjadi dasar evaluasi kinerja dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola spektrum frekuensi radio yang andal, aman, dan berorientasi pada pelayanan prima.

Indikator ini mampu menyerap anggaran sebesar Rp.55.608.900,- (100%) dari pagu anggaran non-blokir sebesar Rp.55.610.000,- Tingkat serapan yang sangat optimal dengan capaian kinerja melampaui target menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan efisien, dengan pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

## I. Latar Belakang, Maksud, dan Tujuan

Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) merupakan instrumen legalisasi kompetensi bagi pengguna amatir radio sesuai UU 36/1999 dan Permenkominfo 17/2018. UNAR memastikan kecakapan teknis, ketepatan penggunaan spektrum, serta kepatuhan etika komunikasi, sekaligus menjadi mekanisme seleksi penerbitan dan kenaikan tingkat Izin Amatir Radio (IAR).

Di sektor maritim, peningkatan temuan penggunaan perangkat All Band oleh nelayan yang mengganggu frekuensi dinas penerbangan HF mendorong pelaksanaan *Maritime On The Spot* (MOTS). Kegiatan ini mengarahkan nelayan untuk menggunakan perangkat standar maritim, memanfaatkan frekuensi IKRAN, serta memenuhi legalitas melalui Izin Stasiun Radio (ISR). Upaya ini bertujuan menghilangkan interferensi dan meningkatkan keselamatan pelayaran.

Pelayanan perizinan frekuensi radio dilaksanakan sebagai layanan publik strategis untuk memastikan kemudahan akses perizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel, mendukung kebutuhan spektrum yang terus meningkat, khususnya bagi nelayan dan pengguna perangkat komunikasi maritim.

Indikator kinerja pada Sertifikasi Operator Radio (SOR) melalui Bimtek SRC/LRC berfungsi meningkatkan kemampuan operator dalam tata cara komunikasi yang benar, pengenalan kanal keselamatan, dan pemahaman regulasi, sehingga dapat meminimalkan potensi gangguan terhadap frekuensi penerbangan. Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang memastikan seluruh proses sertifikasi, pengawasan, dan evaluasi kinerja berjalan sesuai standar teknis dan regulasi.

Secara keseluruhan, pelaksanaan UNAR, MOTS-IKRAN, layanan perizinan frekuensi, serta sertifikasi SOR merupakan rangkaian kegiatan terpadu untuk meningkatkan legalitas, kompetensi, ketertiban spektrum, dan keselamatan komunikasi di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang.

## II. Capaian Target

### A. Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)

Indikator Kinerja Persentase (%) Ujian Negara Amatir Radio memiliki target realisasi sebesar 100%. Berdasarkan data pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun 2025, diketahui bahwa capaian indikator tersebut mencapai 100%, sehingga persentase realisasi kinerja terpenuhi sepenuhnya sesuai target PK yang telah ditetapkan.

#### 8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

| Kinerja                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                     | Target | Capaian | Persentase |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi, dan Layanan Telekomunikasi | Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) | 100%   | 100%    | 100%       |

**Tabel 3.30 Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)**

Memasuki tahun 2025, kegiatan Ujian Negara Amatir Radio tetap dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pemenuhan indikator kinerja serta peningkatan Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio terhadap ketentuan spektrum frekuensi radio. Pelaksanaan UNAR ini menjadi salah satu langkah penguatan tertib administrasi dan kepatuhan dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio.

Adapun jumlah pelaksanaan penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

| Target                    | Realisasi                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 6x Kegiatan dalam 1 tahun | 9x kegiatan dalam 1 tahun<br>(8x UNAR REG & 1x UNAR Non-REG) |

**Tabel 3.31 Jumlah Pelaksanaan UNAR pada Tahun 2025**

Berikut Rekap data penyelenggaraan UNAR pada Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang pada Tahun 2025 :

| No. | Nama/Jenis UNAR | Tanggal UNAR | Total Peserta | SGA | PGL | PNG | Total Lulus | SGA | PGL | PNG | Total Tidak Lulus | Total Tidak Lulus (Nilai) | SGA | PGL | PNG | Total Tidak Lulus Tidak Hadir | SGA | PGL | PNG |
|-----|-----------------|--------------|---------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| 1   | Reg 1           | 21/Jan/2025  | 4             | 4   | 0   | 0   | 2           | 2   | 0   | 0   | 2                 | 1                         | 1   | 0   | 1   | 1                             | 2   | 0   | 0   |
| 2   | Reg 2           | 04/Feb/2025  | 1             | 1   | 0   | 0   | 0           | 0   | 0   | 0   | 1                 | 0                         | 0   | 0   | 1   | 1                             | 0   | 0   | 0   |
| 3   | Reg 3           | 04/Mar/2025  | 7             | 6   | 0   | 1   | 7           | 6   | 0   | 1   | 0                 | 0                         | 0   | 0   | 0   | 0                             | 6   | 0   | 0   |
| 4   | Reg 4           | 08/Apr/2025  | 3             | 3   | 0   | 0   | 2           | 2   | 0   | 0   | 1                 | 0                         | 0   | 0   | 1   | 1                             | 2   | 0   | 0   |
| 5   | Reg 5           | 06/Mei/2025  | 1             | 1   | 0   | 0   | 0           | 0   | 0   | 0   | 1                 | 0                         | 0   | 0   | 1   | 1                             | 0   | 0   | 0   |
| 6   | Reg 6           | 04/Jun/2025  | 6             | 6   | 0   | 0   | 3           | 3   | 0   | 0   | 3                 | 2                         | 2   | 0   | 1   | 1                             | 3   | 0   | 0   |
| 7   | Reg 7           | 07/Okt/2025  | 10            | 10  | 0   | 0   | 6           | 6   | 0   | 0   | 4                 | 2                         | 2   | 0   | 2   | 2                             | 6   | 0   | 0   |
| 8   | Reg 8           | 02/Des/2025  | 9             | 6   | 2   | 1   | 8           | 5   | 2   | 1   | 1                 | 0                         | 0   | 0   | 1   | 1                             | 5   | 0   | 0   |
| 9   | Non Reg         | 10/Agu/2025  | 50            | 50  | 0   | 0   | 19          | 19  | 0   | 0   | 31                | 7                         | 7   | 0   | 24  | 24                            | 19  | 0   | 0   |

**Tabel 3.32 Rekap Data Penyelenggaraan UNAR pada Tahun 2025**

Pelaksanaan UNAR ini menunjukkan konsistensi capaian yang optimal selama lima tahun terakhir. Pada periode 2021 hingga 2025, target pelaksanaan sebesar 100% setiap tahun dan seluruhnya berhasil direalisasikan sesuai target.

Capaian tersebut mencerminkan bahwa capaian untuk indikator “Persentase pelaksanaan UNAR CAT dari tahun 2020 s.d. 2025” telah tercapai sesuai PK yang ditetapkan, karena dapat dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti UNAR sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai (100%). Hal ini juga menjadi indikasi bahwa mekanisme perencanaan dan pelaksanaan program telah berjalan dengan baik dan konsisten.

| Sasaran Program                                                                                                                 | Indikator Kinerja Sasaran Program                                                    | 2021   |           | 2022   |           | 2023   |           | 2024   |           | 2025   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                                                                                                                                 |                                                                                      | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi, dan Layanan Telekomunikasi | Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      |

**Tabel 3.34 Hasil Pelaksanaan Kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)**

### III. Analisa yang terkait Indikator Kinerja Secara Umum dan Holistik

Kondisi data capaian eksisting sosialisasi menunjukkan kinerja sangat baik dengan realisasi sebesar 100% pada tahun 2025, sehingga mencapai target 100%.

Kondisi capaian pelaksanaan Penyelenggaraan Layanan Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) pada Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang menunjukkan tren realisasi 100% secara konsisten dari tahun 2020–2025. Stabilitas capaian ini menggambarkan bahwa proses perencanaan, koordinasi, dan eksekusi kegiatan berjalan efektif.

Dari sisi kolaborasi, pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan Direktorat Layanan Infrastruktur Digital. Sinergi ini memastikan bahwa Latihan soal *Try Out seenow.postel.go.id* tetap relevan, dan akurat. Strategi internal yang digunakan atas tercapainya target dengan melakukan beberapa inovasi pelayanan antara lain:

- Mengarahkan penggiat Amatir Radio yang belum memiliki Izin Amatir Radio yang terjaring kegiatan penertiban Spektrum Frekuensi Radio.
- Petugas pelayanan didorong memiliki Izin Amatir Radio dan melakukan sosialisasi langsung melalui komunikasi di frekuensi Amatir Radio.
- Mengatur penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio yang membuat peserta ujian merasa nyaman dan terlayani dengan baik. Contoh: pembagian sesi Ujian, melakukan pembekalan/pembelajaran materi ujian.

Pemberian hadiah bagi peserta dengan nilai kelulusan tertinggi untuk meningkatkan motivasi calon peserta amatir untuk belajar sebelum UNAR.

Secara keseluruhan, capaian 100% selama lima tahun berturut-turut menunjukkan bahwa strategi koordinasi, kesiapan, serta inovasi penyampaian informasi yang dilakukan telah efektif dalam mendukung peningkatan kepatuhan dan kualitas layanan UNAR.

Berikut adalah perbandingan capaian kinerja Ujian Negara Amatir Radio:

| Nama UPT         | Jumlah Penyelenggara                  | Jumlah Peserta | Persentase |
|------------------|---------------------------------------|----------------|------------|
| Balmon Tangerang | 9x<br>(8x Reguler dan 1 Non Reguler)  | 90 Peserta     | 100%       |
| Balmon Jakarta   | 14x<br>(12 Reguler dan 2 Non Reguler) | 504 Peserta    | 100%       |

**Tabel 3.35 Benchmarking Capaian Kinerja Dengan UPT Lainnya**

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR), Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta dan Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang sama-sama menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat baik dengan persentase penyelenggaraan mencapai 100%.

Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta menyelenggarakan UNAR sebanyak 14 kali kegiatan (12 reguler dan 2 non reguler) dengan jumlah peserta sebanyak 504 orang. Sementara itu, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang melaksanakan 9 kali kegiatan (8 reguler dan 1 non reguler) dengan jumlah peserta sebanyak 90 orang.

Dari sisi kuantitas layanan, Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta memiliki frekuensi penyelenggaraan dan jumlah peserta yang lebih tinggi. Namun demikian, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang tetap mampu mempertahankan kualitas pelaksanaan yang setara, tercermin dari capaian tingkat kelulusan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kedua satuan kerja telah melaksanakan proses pengujian, dan pelayanan UNAR secara efektif dan sesuai standar yang ditetapkan.

Secara umum, praktik pelaksanaan UNAR pada kedua Balai Monitor dapat dijadikan referensi dalam menjaga konsistensi mutu layanan, optimalisasi sumber daya, serta peningkatan akses pelayanan kepada masyarakat.

#### IV. Faktor Kendala/Hambatan pada Pencapaian Target

Kendala utama dalam pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio ini berkaitan dengan jumlah peserta. Calon peserta amatir radio khususnya di Provinsi Banten semakin menurun dalam dua tahun terakhir karena pergeseran preferensi komunikasi menjadi digital (non-radio). Serta tingkat regenerasi anggota Amatir Radio yang belum optimal dan masih di dominasi oleh anggota usia senior.

Sebagai upaya percepatan, dilakukan kordinasi yang intens dengan ORARI untuk mencari bakal calon anggota amatir radio melalui komunitas dan radio lokal, penyampaian sosial media blasting melalui berbagai kanal komunikasi seperti Instagram dan Facebook Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang, serta penyediaan akses untuk mempermudah proses pendaftaran UNAR. Selain itu, melaksanakan UNAR (Non Reguler) di luar kota yang dilaksanakan pada *weekend* dapat memperluas jangkauan calon peserta amatir radio baru yang selama ini memiliki hambatan biaya dan akses perjalanan ke Kantor Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang.

#### V. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang memanfaatkan hasil laporan kinerja sebagai dasar penyempurnaan pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio, terutama dalam menertibkan proses pendaftaran dan verifikasi peserta yang sebelumnya kerap mengalami keterlambatan. Tindak lanjut dilakukan melalui perbaikan alur pendataan, optimalisasi penyebaran materi melalui kanal digital, serta pemetaan kebutuhan sosialisasi lanjutan berdasarkan evaluasi kegiatan tahun berjalan. Langkah ini memastikan peningkatan efektivitas penyampaian informasi perizinan ISR dan mendukung peningkatan kepatuhan pengguna spektrum frekuensi di wilayah Provinsi Banten.

## VI. Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya

Untuk meningkatkan kinerja UNAR di tahun berikutnya diperlukan implementasi beberapa rekomendasi strategis yaitu telah disediakan sarana pembelajaran dan *TryOut* Ujian Negara Amatir Radio secara *online* melalui *website seenow.postel.go.id* maka sebagai tindak lanjut memberikan rasa nyaman bagi peserta ujian, maka setiap peserta akan dipandu untuk dapat menggunakan sarana pembelajaran tersebut.

Peserta dihimbau agar jangan dahulu mengikuti Ujian Negara Amatir Radio sebelum mereka lulus *TryOut* Ujian Negara Amatir Radio di *website seenow.postel.go.id* tersebut.

## VII. Efisiensi

Efisiensi pelaksanaan dengan sistem Penyelenggaraan UNAR secara reguler di Kantor UPT menjadikan kegiatan ini lebih efektif dan efisien, karena sarana dan prasarana seperti ruang ujian, komputer dan jaringan internet dan fasilitas lainnya tersedia di UPT.

## VIII. Implementasi Budaya BerAKHLAK

Dalam penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio ini, kami menerapkan budaya **BerAKHLAK** sebagai berikut:

### Berorientasi Pelayanan

- Kami berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan peserta, melalui pengaturan atau pembagian waktu ujian (sesi ujian), menyesuaikan dengan jarak tempat tinggal peserta.
- Melayani dengan ramah, memberikan pelayanan dengan cekatan, memberikan solusi atas kendala yang ditemui peserta.
- Mengevaluasi kegiatan sebagai bagian untuk perbaikan kegiatan berikutnya.

### Akuntabel

- Pengawas ujian melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- Menggunakan sarana ujian yang dalam hal ini merupakan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- Tidak menyalahgunakan kewenangan sebagai pengawas untuk kepentingan pribadi.

### Kompeten

- Seiring perkembangan TIK, penyelenggara harus meningkatkan kompetensi diri untuk dapat mengantisipasi tindak kecurangan oleh peserta.
- Tiap pegawai meningkatkan kompetensi diri agar bisa menjawab pertanyaan calon amatir radio ketika mendaftar, mengikuti dan lulus UNAR.

### Harmonis

- Menghargai setiap peserta apapun latar belakangnya, karena peserta Ujian Negara Amatir berasal dari beragam profesi, usia dan pendidikan yang telah ditempuh.

### Loyal

- Sebagai acara formal negara, setiap penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio, maka akan diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

### Adaptif

- Perubahan pelayanan terkait alur perpanjangan Izin Amatir Radio harus cepat dipahami oleh petugas pelayanan.
- Pro aktif dan berinovasi bagaimana menyampaikan perubahan alur perizinan ke masyarakat dengan baik tanpa menimbulkan kebingungan.

### Kolaboratif

- Membuka diskusi dengan ORARI untuk tercipta tertib penggunaan frekuensi radio khususnya pita frekuensi Amatir Radio.



## B. Maritime On The Spot (MOTS) - IKRAN

Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang di tahun 2025 telah menyelenggarakan kegiatan *Maritime On The Spot* (MOTS), Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN) dan Sertifikasi Operator Radio (SRC/LRC) telah melampaui target yang telah ditetapkan.

| No. | Indikator Kinerja             | Target          | Realisasi                 |
|-----|-------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1   | ISR Maritim dan/atau IKRAN    | 25              | 47<br>(13 ISR + 34 IKRAN) |
| 2   | Penerbitan Sertifikat SRC/LRC | 1 kali kegiatan | 2 kali kegiatan           |

**Tabel 3.36 Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)**

Tahun 2025 Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang telah melakukan pembukaan Loker *Maritime On The Spot* (MOTS) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu Kota Serang yang dibuka selama 12 Bulan, mulai dari bulan Januari s.d. bulan Desember 2025.

Berdasarkan hasil penyelenggaraan *Maritime On The Spot* (MOTS) pada Balai Monitor SFR kelas I Tangerang Tahun 2025 yang meliputi Izin Stasiun Radio (ISR) Maritim dan/ atau Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN) Serta Penerbitan Sertifikasi Operator Radio (SRC/LRC) untuk nelayan, maka diperoleh hasil capaian 13 Izin Stasiun Radio (ISR) Maritim dan 34 Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN) serta 2 kali pelaksanaan Bimbingan teknis Sertifikasi SRC/LRC dan IKRAN.

## I. Analisa yang terkait Indikator Kinerja Secara Umum dan Holistik

| Sasaran Program                                                                                                                 | Indikator Kinerja Sasaran Program                                                       | 2021   |           | 2022   |           | 2023   |           | 2024   |           | 2025   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                                                                                                                                 |                                                                                         | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi, dan Layanan Telekomunikasi | Persentase (%)<br>Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      |

**Tabel 3.37 Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)**

Berdasarkan tabel indikator kinerja Penyelenggaraan Layanan *Maritime On The Spot* (MOTS), Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN) dan Sertifikasi Operator Radio (SRC/LRC), target dan realisasi capaian kinerja pada tahun 2021-2025 masing-masing menunjukkan angka 100%. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan layanan *Maritime On The Spot* (MOTS), Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN) dan Sertifikasi Operator Radio (SRC/LRC), konsisten memenuhi target yang telah ditetapkan selama lima tahun berturut-turut.

Capaian kinerja mengalami tingkat konsistensi yang sangat baik, karena seluruh target berhasil direalisasikan secara penuh. Tahun sebelumnya (2021 dan 2024) menunjukkan realisasi 100%, demikian pula capaian tahun berjalan (2025) juga mencapai 100%. Dengan pola pencapaian tersebut, rencana tahun depan diproyeksikan tetap mempertahankan standar layanan pada tingkat 100%, sejalan dengan komitmen peningkatan kualitas layanan sertifikasi operator radio yang cepat, tepat, dan sesuai ketentuan.

## II. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan (2025)

Pada tahun 2025, indikator kinerja Penyelenggaraan Layanan *Maritime On The Spot* (MOTS), Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN), dan Sertifikasi Operator Radio (SRC/LRC) untuk pelaku usaha bidang perikanan (nelayan) memiliki target capaian sebesar 100%. Berdasarkan realisasi yang diperoleh, seluruh target tersebut berhasil dipenuhi dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan telah berjalan optimal sesuai standar operasional dan indikator mutu layanan yang ditetapkan, tanpa adanya deviasi terhadap target tahun berjalan.

Kinerja ini sekaligus mencerminkan efektivitas proses sertifikasi serta responsivitas layanan terhadap kebutuhan masyarakat pengguna frekuensi radio. Capaian tahun 2021 hingga 2025, diketahui bahwa indikator Penyelenggaraan Layanan *Maritime On The Spot* (MOTS), Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN), dan Sertifikasi Operator Radio (SRC/LRC) secara konsisten mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu 100% setiap tahunnya.

Capaian ini menunjukkan bahwa proses pelayanan *Maritime On The Spot* (MOTS) telah berjalan sesuai standar, tepat waktu, dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna layanan, termasuk operator radio, nahkoda kapal, instansi pemerintah bidang perikanan, serta pelaku usaha perikanan (nelayan) yang memerlukan legalitas kompetensi di bidang telekomunikasi. Dengan realisasi capaian yang stabil pada angka 100% selama lima tahun berturut-turut, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja ini tercapai sesuai PK yang telah ditetapkan dan mencerminkan keberhasilan Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang dalam menjaga kualitas dan kepatuhan terhadap target penyelenggaraan layanan.

Indikator Kinerja Persentase (%) Bimbingan Teknis Sertifikasi Operator Radio (SRC/LRC) dan IKRAN memiliki target realisasi sebesar 100%. Berdasarkan data pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun 2025, diketahui bahwa capaian indikator tersebut mencapai 100%, sehingga persentase realisasi kinerja terpenuhi sesuai target PK yang telah ditetapkan.

#### 8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

| Kinerja                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                     | Target | Capaian | Persentase |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi, dan Layanan Telekomunikasi | Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) | 100%   | 100%    | 100%       |

**Tabel 3.38 Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)**

Memasuki tahun berjalan 2025, penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Operator Radio (SRC/LRC) dan IKRAN terus dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai bagian dari pemenuhan indikator kinerja dan upaya peningkatan kompetensi operator radio di berbagai sektor.

Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang pada tahun 2025 telah melaksanakan 2 kali kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Operator Radio (SRC/LRC) dan Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN) Adapun rincian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

#### a) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Sertifikasi Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN)

Pada bulan September 2025 Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang telah menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN) yang dilaksanakan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Kabupaten Pandeglang dan diikuti oleh 34 peserta yang berprofesi sebagai Nahkoda Kapal yang berlabuh di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai wujud dukungan peningkatan pelayanan perizinan bagi pelaku usaha bidang perikanan yang menggunakan radio.



**Gambar 3.19 Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN)**

Perlu disampaikan bahwa pada indikator ini, capaian yang diukur bukan pada jumlah Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN) dan/ Izin Stasiun Radio (ISR) Maritim yang diterbitkan, melainkan pada pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis yang ditargetkan sesuai PK sebanyak 1 (satu) kali dalam satu tahun. Pada Tahun 2025, target perizinan telah terpenuhi. Melalui kegiatan tersebut, diterbitkan sebanyak 34 Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN) dan 13 Izin Stasiun Radio (ISR), sehingga secara keseluruhan capaian kegiatan dinilai telah terpenuhi.

#### b) Bimbingan Teknis Sertifikasi Operator Radio (SRC)

Pada bulan Oktober 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang telah menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Maritim Non-Konvensi SOLAS, *Short Range Certificate* (SRC) / Sertifikat Jarak Jangkauan Dekat (SJJD) yang dilaksanakan di Aula Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu Kota Serang diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari 7 pelaku usaha bidang perikanan dan 33 Nakhoda Kapal yang berlabuh di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu Kota Serang. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai wujud dukungan peningkatan kompetensi nelayan dalam berkomunikasi melalui perangkat radio.



Gambar 3.20 Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Maritim Non-Konvensi SOLAS SRC/SJJD

Perlu disampaikan bahwa pada indikator ini, capaian yang diukur bukan pada jumlah sertifikat yang diterbitkan, melainkan pada pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis yang ditargetkan sesuai PK sebanyak 1 (satu) kali dalam satu tahun. Pada Tahun 2025, target pelaksanaan Bimbingan Teknis Sertifikasi Operator Radio (SRC/LRC) telah terpenuhi. Melalui kegiatan tersebut, diterbitkan sebanyak 33 Sertifikat Operator Radio Jarak Jangkauan Dekat (SRC/SJJD), sehingga secara keseluruhan capaian kegiatan dinilai telah terpenuhi.

| Sasaran Program                                                                                                                 | Indikator Kinerja Sasaran Program                                                  | 2021   |           | 2022   |           | 2023   |           | 2024   |           | 2025   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                                                                                                                                 |                                                                                    | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi, dan Layanan Telekomunikasi | Persentase (%) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Sertifikasi Operator Radio SRC/LRC | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      |

Tabel 3.39 Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

Berdasarkan penjelasan pada tabel di halaman sebelumnya, dapat diketahui bahwa capaian indikator Bimbingan Teknis Sertifikasi Operator Radio SRC/LRC telah memenuhi target sesuai Perjanjian Kinerja. Hal ini terlihat dari jumlah peserta yang hadir, dinyatakan lulus, serta berhak memperoleh Sertifikat SRC. Dengan demikian, indikator ini dinyatakan tercapai sebesar 100%.

### III. *Benchmarking* Capaian Kinerja Dengan UPT Lainnya

#### a) Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN)

Berikut adalah perbandingan capaian kinerja pelayanan perizinan Izin Stasiun Radio (ISR) Maritim dan Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN) pada Program *Maritime on The Spot* (MOTS) :

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi                   | Persentase |
|-------------------|--------|-----------------------------|------------|
| Balmon Tangerang  | 25     | 47<br>(13 ISR + 34 IKRAN)   | 100%       |
| Balmon Jakarta    | 75     | 295<br>(222 ISR + 73 IKRAN) | 100%       |
| Balmon Yogyakarta | 40     | 36<br>(0 ISR + 36 Ikran)    | 100%       |

**Tabel 3.40 Penyelenggaraan Layanan Perizinan ISR dan IKRAN**

Berdasarkan data capaian kinerja, Balmon Tangerang, Balmon Jakarta, dan Balmon Yogyakarta seluruhnya mencapai indikator kinerja sebesar 100%, menunjukkan efektivitas layanan perizinan spektrum frekuensi radio sesuai target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian ini menegaskan kemampuan masing-masing unit dalam mengelola layanan secara optimal sesuai karakteristik wilayah, sekaligus membuka ruang penguatan melalui optimalisasi potensi layanan dan strategi peningkatan perizinan yang lebih terukur.

#### b) *SHORT RANGE CERTIFICATE / LONG RANGE CERTIFICATE* (SRC/LRC)

Sepanjang Tahun 2025 Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang telah menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis SRC/LRC sebanyak 1 kali dalam setahun. Berikut adalah perbandingan capaian kinerja dengan UPT lainnya :

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase |
|-------------------|--------|-----------|------------|
| Balmon Tangerang  | 1      | 40        | 100%       |
| Balmon Jakarta    | 1      | 73        | 100%       |
| Balmon Yogyakarta | 2      | 36        | 100%       |

**Tabel 3.41 Penyelenggaraan Layanan Perizinan ISR dan IKRAN**

Berdasarkan tabel di atas bahwa Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang, Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta, dan Balai Monitor SFR Kelas I Yogyakarta, terlihat masing-masing UPT tersebut memiliki karakteristik dan capaian yang berbeda dalam penyelenggaraan kegiatan.

Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang menyelenggarakan 1 kali kegiatan Bimtek dengan diikuti 40 peserta dan capaian 100%. Dari sisi capaian program, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang menunjukkan kinerja yang optimal dan setara dengan dua UPT lainnya. Jumlah peserta yang cukup besar menunjukkan kemampuan dalam menghimpun peserta secara efektif. Namun, jika dibandingkan Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta yang memiliki peserta lebih banyak, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang masih memiliki ruang untuk memperluas skala kegiatan di masa mendatang.

Dalam konteks pembanding, Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta melaksanakan 1 kali Bimtek dengan jumlah peserta terbanyak, yaitu 73 peserta, semuanya mencapai 100%. Hal ini menunjukkan kapasitas mobilisasi dan cakupan sasaran yang lebih luas. Dibandingkan dengan Jakarta, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang berada pada tingkat menengah dalam hal jumlah peserta.

Sementara itu, Balai Monitor SFR Kelas I Yogyakarta melaksanakan 2 kali kegiatan, dengan total 36 peserta dan capaian 100%. Dilihat dari jumlah kegiatan, Yogyakarta menunjukkan fleksibilitas dan intensitas pelaksanaan lebih tinggi. Namun jumlah pesertanya lebih sedikit dibandingkan Tangerang, sehingga Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang masih unggul dalam jangkauan peserta per kegiatan.

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa kelebihan utama Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang terletak pada stabilitas capaian, kemampuan penyelenggaraan yang efektif, serta jumlah peserta yang lebih besar daripada Yogyakarta. Kekurangannya adalah ruang peningkatan dalam memperluas cakupan peserta seperti yang dilakukan Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta, serta peluang untuk meningkatkan intensitas kegiatan seperti Balai Monitor SFR Kelas I Yogyakarta. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang untuk merumuskan strategi pengembangan kegiatan Bimtek SRC/LRC di tahun berikutnya.

#### IV. Faktor Kendala/Hambatan pada Pencapaian Target

Penyelenggaraan kegiatan Izin Stasiun Radio (ISR) Maritim dan Bimbingan Teknis SRC/LRC dan IKRAN pada Program Maritime One The Spot (MOTS) tahun 2025 yang diselenggarakan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang sebanyak 2 kali kegiatan dan telah mengeluarkan Izin Stasiun Radio (ISR) sebanyak 13 izin. Sehingga program Maritime On The Spot (MOTS) telah terealisasi dan mencapai target yang direncanakan dengan memperbaiki tingkat pelayanan, antara lain:

- Melakukan koordinasi intens dengan pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu terkait pelaksanaan Bimbingan Teknis SRC/LRC dan IKRAN di wilayah pelabuhan binaan PPN Karangantu.
- Melakukan persiapan secara matang sebelum kegiatan Bimbingan Teknis SRC/LRC dilaksanakan.
- Melakukan publikasi informasi kepada para pemilik kapal agar para awak kapalnya dapat mengikuti Bimbingan Teknis SRC/LRC dan IKRAN.
- Melakukan asistensi pendaftaran Sertifikasi Operator Radio (SOR) dan Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN).
- Memberikan layanan asistensi dan konsultasi perizinan secara offline (luring) melalui loket dan online (daring) melalui WhatsApp.
- Melaksanakan koordinasi dengan pihak PPN Karangantu terkait pelaksanaan pelayanan perizinan.
- Melakukan pendekatan dan koordinasi door to door dengan pihak pemilik dan pengurus kapal.

Adapun kendala yang dialami dalam menjalankan program *Maritime On The Spot* (MOTS) antara lain :

- Masih minim nya penggunaan radio standard maritim di wilayah provinsi Banten.
- Masih banyaknya penggunaan perangkat radio *All Band* yang berpayensi mengganggu Dinas Penerbangan.
- Masih minimnya pengetahuan tentang pentingnya radio standard maritim untuk alat keselamatan selama melaut.

Sekalipun nelayan bersedia diarahkan untuk menggunakan perangkat radio komunikasi standard maritim, nelayan tetap membutuhkan sarana komunikasi internal komunitas nelayan.

#### V. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pelaksanaan Maritime On The Spot (MOTS) dan layanan Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN) memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kualitas pelayanan serta efektivitas pengawasan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang.

Layanan ini menjadi dasar evaluasi ketertiban penggunaan frekuensi sektor maritim, sekaligus menunjukkan tingkat kepatuhan nelayan. Penyediaan layanan Maritime On The Spot (MOTS) untuk meningkatkan akses Izin Stasiun Radio (ISR) dan Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN), sehingga penggunaan spektrum menjadi lebih tertib, terdaftar, dan sesuai ketentuan.

Melalui Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN) juga mendukung keselamatan pelayaran, karena pengguna dapat berkomunikasi pada kanal yang tepat tanpa risiko interferensi. Laporan kinerja ini menjadi indikator kualitas pelayanan publik Balai. Secara keseluruhan, laporan kinerja *Maritime On The Spot* (MOTS) dan Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN) mendukung peningkatan efektivitas pengawasan, keselamatan komunikasi maritim, serta penguatan tata kelola penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Banten.

Minimnya pengetahuan masyarakat, khususnya para nelayan dan pelaku usaha perikanan, mengenai pentingnya radio standar maritim sebagai alat keselamatan selama melaut masih menjadi kendala dalam upaya peningkatan keselamatan dan kelancaran komunikasi di perairan. Banyak pengguna yang belum memahami bahwa radio maritim tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai perangkat vital untuk menerima informasi cuaca, kondisi darurat, dan koordinasi pertolongan ketika terjadi insiden di laut.

Sebagai tindak lanjut atas kendala tersebut, diperlukan peningkatan kegiatan sosialisasi dan edukasi yang lebih terarah dan berkelanjutan. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang dapat memperluas penyuluhan langsung di lokasi-lokasi yang menjadi pusat aktivitas nelayan, seperti pelabuhan, TPI, dan kawasan pesisir. Penyuluhan ini harus menekankan pentingnya penggunaan radio sesuai standar internasional, manfaatnya dalam situasi darurat, serta risiko yang muncul apabila tidak menggunakan perangkat komunikasi yang sesuai.

Selain itu, penguatan kerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Syahbandar, serta organisasi nelayan juga menjadi langkah strategis untuk menjangkau lebih banyak pengguna. Materi edukasi dapat dikemas lebih sederhana melalui leaflet, video singkat, dan demonstrasi penggunaan radio maritim sehingga mudah dipahami oleh nelayan.

Dengan tindak lanjut yang terstruktur dan berkesinambungan, diharapkan tingkat pemahaman para pengguna terhadap pentingnya radio standar maritim semakin meningkat, sehingga keselamatan dan keamanan kegiatan melaut dapat terjaga dengan lebih baik.

## VI. Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya

Untuk meningkatkan kinerja Bimbingan Teknis SRC/LRC dan IKRAN kepada para nelayan di tahun berikutnya diperlukan implementasi beberapa rekomendasi strategis yaitu sebagai berikut :

- Merencanakan program kerja baru sebagai inovasi atau peningkatan kualitas pelayanan terkait Bimbingan Teknis SRC/LRC dan IKRAN kepada para nelayan atau awak kapal dengan menjangkau lebih banyak nelayan yang berada di wilayah Provinsi Banten.
- Membuat platform pelatihan daring bagi peserta yang sulit hadir;
- Menyediakan video edukasi pelatihan agar bisa diakses oleh nelayan kapan saja.
- Merencanakan program kerja baru sebagai inovasi atau peningkatan pelayanan terkait perizinan ISR Maritim kepada para nelayan atau pemilik kapal dengan Bus Pelayanan Keliling / Kegiatan Pelayanan Begerak ISR Maritim yang secara terjadwal akan beroperasi di wilayah Provinsi Banten.
- Dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan serta pelayanan di bidang spektrum frekuensi radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang merumuskan sejumlah rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan SRC/LRC dan pelayanan Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN) pada tahun selanjutnya. Rekomendasi ini disusun berdasarkan evaluasi capaian program, tantangan teknis di lapangan, serta kebutuhan penguatan sistem kerja.
- Untuk pelayanan Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN), rekomendasi perbaikan difokuskan pada peningkatan efektivitas sosialisasi kepada pelaku usaha dan nelayan mengenai pentingnya kepatuhan perizinan, digitalisasi proses layanan, serta penyederhanaan alur administrasi diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mempercepat penerbitan izin. Upaya ini juga diikuti dengan peningkatan pengawasan lapangan untuk memastikan bahwa perangkat radio perikanan digunakan sesuai ketentuan teknis dan regulasi yang berlaku.

## VII. Efisiensi

Efisiensi pelaksanaan Bimtek di Kantor Pelayanan Terpadu menjadikan kegiatan ini lebih efektif dan efisien, seperti :

- Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang bekerja sama dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu Kota Serang, dalam penyediaan Loker *Maritime On The Spot* (MOTS) di Kantor Pelayanan Terpadu Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu.
- Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Sertifikasi Operator Radio (SOR) dan Bimbingan Teknis Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN) dilaksanakan di Aula PPN Karangantu dengan biaya yang minim dibandingkan di Ballroom Hotel terdekat dari Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu. Selain itu, pemateri Bimtek SOR berasal dari internal Infradigi, sehingga kegiatan dapat berlangsung tanpa biaya honor narasumber.

## VIII. Implementasi Budaya BerAKHLAK

Pelaksanaan kegiatan Maritime On The Spot (MOTS) – IKRAN oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Budaya BerAKHLAK. Implementasi nilai tersebut tercermin sebagai berikut:

### Berorientasi Pelayanan

- Kegiatan MOTS dilaksanakan dengan memberikan pelayanan langsung kepada nelayan melalui pemberian informasi terkait penggunaan perangkat maritim, konsultasi teknis, serta fasilitasi pengurusan Izin Stasiun Radio (ISR) Maritim. Petugas memastikan layanan diberikan secara cepat, ramah, dan mudah dipahami, sehingga nelayan memperoleh kemudahan dalam memenuhi ketentuan pengurusan Izin Stasiun Radio (ISR) maritim, dan nelayan mengetahui frekuensi yang dialokasikan untuk IKRAN.

### Akuntabel

- Seluruh rangkaian kegiatan *Maritim On The Spot* (MOTS) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses pemeriksaan perangkat, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil kegiatan dilaporkan sebagai bagian dari pengawasan spektrum yang akurat dan kredibel.

### Kompeten

- Petugas menerapkan kompetensi teknis dalam melakukan pemeriksaan perangkat komunikasi, identifikasi potensi interferensi gangguan pada Dinas Penerbangan, serta pemberian edukasi kepada nelayan mengenai standar perangkat maritim dan penggunaan frekuensi khusus untuk Nelayan.

### Harmonis

- Pelaksanaan kegiatan memprioritaskan pendekatan persuasif dan humanis kepada nelayan. Koordinasi dilakukan dengan berbagai pihak di lingkungan pelabuhan, sehingga terjalin hubungan kerja yang baik dan mendukung terciptanya komunikasi maritim yang aman dan tertib.

### Loyal

- Petugas melaksanakan kegiatan sesuai mandat dan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital, dalam menjaga ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, khususnya pada pita Dinas Penerbangan. Kegiatan *Maritime On The Spot* (MOTS) menjadi bagian komitmen Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang dalam mendukung keselamatan pelayaran dan mencegah gangguan terhadap frekuensi Dinas Penerbangan.

### Adaptif

- Kegiatan *Maritime On The Spot* (MOTS) disesuaikan dengan dinamika kondisi lapangan seperti mobilitas kapal, dan aktivitas nelayan. Petugas memanfaatkan kondisi cuaca dimana ketika cuaca sedang ekstrim nelayan tidak melaut dan ketika kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh petugas untuk melakukan sosialisasi terkait perizinan, sehingga kegiatan tetap berjalan optimal meskipun terjadi perubahan situasi di lapangan.

### Kolaboratif

Pelaksanaan *Maritime On The Spot* (MOTS) berkolaborasi dan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), Dinas Perikanan, Syahbandar, serta komunitas nelayan. Kolaborasi ini mendukung kelancaran kegiatan dan memastikan penanganan gangguan frekuensi dapat dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

## 9. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

Indikator Kinerja Pelaksanaan pencegahan dan penanganan piutang BHP frekuensi radio umumnya ditargetkan 100% yaitu jumlah penyampaian tagihan/invoice ke klien atau wajib bayar (100%) dan kegiatan koordinasi penanganan piutang setiap triwulan atau empat kali dalam satu tahun (100%).

### I. Latar Belakang, Maksud, dan Tujuan

Indikator Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio BHP Frekuensi Radio merupakan salah satu penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terbesar di sektor komunikasi. Indikator ini menjadi alat ukur sejauh mana instansi (Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital) berhasil menagih kewajiban BHP Frekuensi Radio dari pengguna.

Semakin tinggi persentase realisasi penanganan piutang, semakin efektif proses penagihan yang dilakukan. Dengan demikian peluang optimalisasi penerimaan negara akan tercapai. Penanganan piutang perlu dipantau untuk mendorong agar pembayaran tepat waktu, memperkecil akumulasi tunggakan, dan mentaati ketentuan kewajiban finansial bagi pengguna frekuensi radio. Artinya ada kepatuhan dari pengguna demi terciptanya tertib administrasi dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio. Persentase penanganan piutang membantu pembuat kebijakan dalam mengidentifikasi hambatan dalam penagihan, menentukan langkah perbaikan, menetapkan strategi penyelesaian tunggakan, menyusun target PNBPN yang realistis, memonitor kinerja unit kerja, menjamin kesinambungan pendanaan untuk program unit kerja (UPT).

Penerima manfaat dari pencapaian indikator ini mencakup pengguna frekuensi radio dalam hal ini adalah pemegang izin untuk mendapatkan hak haknya, kepastian regulasi dan status izin, karena kewajiban finansial terselesaikan. Dampak positif dari tertib pembayaran BHP frekuensi radio oleh pemegang izin adalah menghindari sanksi administratif seperti: pencabutan izin dan atau denda keterlambatan pembayaran. Selain pemegang izin, manfaat dari capaian indikator ini adalah pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital yaitu memperbaiki kinerja khususnya terkait pengelolaan PNBPN, memastikan tertib pengguna frekuensi radio, serta mengurangi risiko piutang tak tertagih yang dapat membebani status keuangan penerimaan PNBPN.

## II. Capaian Target

Target dalam konteks penanganan piutang BHP Frekuensi Radio adalah jumlah dokumen tagihan/tagihan yang terbit sedangkan capaiannya adalah realisasi penyampaian tagihan tersebut kepada masing masing wajib bayar. Penyampaian tagihan bisa menggunakan beberapa metode, baik melalui media online atau datang langsung ke alamat wajib bayar. Komponen lain dalam penanganan piutang adalah Penanganan Pengurusan Piutang BHP Frekuensi Radio yang bisa berupa Koordinasi dengan KPKNL atau Pelaksanaan Pengumpulan Dokumen Syarat Penghapusan Piutang Mutlak (ditambahkan Direktorat Operasi Sumber Daya pada tahun 2024), atau PPNTD (ditambahkan Direktorat Layanan Infradigi di tahun 2025).

Penanganan piutang di tahun 2025 (Januari s.d. November) sudah terealisasi 100% yang artinya sudah mencapai target. Sedangkan komponen Penanganan Pengurusan Piutang BHP Frekuensi Radio berupa kegiatan koordinasi dengan KPKNL sudah diselesaikan sebanyak 3x kegiatan dan PPNTD sebanyak 3x kegiatan (teralisasi 100%).

Tabulasi capaian kinerja tahun 2021 s.d. 2025 sebagai berikut :

| Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Penanganan Piutang |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Target / Capaian                                             | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Target (Invoice Terbit)                                      | 981  | 974  | 963  | 818  | 1073 |
| Capaian (Invoice Terbit)                                     | 981  | 974  | 963  | 1117 | 1073 |
| %                                                            | 100% | 100% | 100% | 137% | 107% |

**Tabel 3.42 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Penanganan Piutang**

| Perbandingan Target dan Realisasi Penanganan Pengurusan Piutang BHP Frekuensi Radio |                         |                         |                         |                                                                      |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Target / Capaian                                                                    | 2021                    | 2022                    | 2023                    | 2024                                                                 | 2025                                                                 |
| Komponen dipilih :                                                                  | Terealisasi 4x          | Terealisasi 4x          | Terealisasi 4x          | Terealisasi 4x                                                       | Terealisasi 4x                                                       |
| 1. Koordinasi dengan KPKNL                                                          | kegiatan                | kegiatan                | kegiatan                | kegiatan                                                             | kegiatan                                                             |
| 2. Pelaksanaan Pengumpulan Dokumen Syarat Penghapusan Piutang Mutlak                | koordinasi dengan KPKNL | koordinasi dengan KPKNL | koordinasi dengan KPKNL | koordinasi dengan KPKNL & 1 kali kegiatan Penghapusan Piutang Mutlak | koordinasi dengan KPKNL & 1 kali kegiatan Penghapusan Piutang Mutlak |
| 3. PPNTD                                                                            |                         |                         |                         |                                                                      |                                                                      |

**Tabel 3.43 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Penanganan Piutang**

Secara keseluruhan dari tahun 2021 s.d. 2025 target dan capaian sudah sesuai yaitu 100%.

Rencana capaian kinerja untuk tahun 2026 diperkirakan sama dengan target dan capaian tahun 2021 s.d. 2025 yaitu 100% berupa capaian (%) total piutang yang dihubungkan dari total target yang diberikan oleh Direktorat Layanan Infradigi, serta jumlah pelaksanaan koordinasi penanganan piutang BHP Frekuensi Radio. Target jumlah penanganan piutang yang dihubungkan adalah total *invoice* BHP frekuensi radio *reminder, annual, dan renewal*.

### III. Analisa Yang Terkait Indikator Kinerja Secara Umum dan Holistik

Kondisi data capaian eksisting penanganan piutang Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio di Indonesia menunjukkan tantangan yang signifikan, terutama terkait jumlah piutang yang masih tinggi, termasuk piutang yang statusnya *'bad debt'*. Secara garis besar penyebab timbulnya piutang adalah faktor finansial wajib bayar, kurangnya pemahaman dan kepatuhan terkait kebijakan/regulasi, dan faktor internal lainnya dari wajib bayar. Strategi penanganan piutang dengan eksternal DJID adalah bekerja sama dengan DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) dalam hal ini adalah KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Strategi yang diterapkan meliputi pengurusan piutang melalui Panitia Urusan Piutang Negara, melakukan rekonsiliasi data piutang untuk mendapatkan solusi optimal serta melaksanakan pengecekan lapangan bersama antara UPT Tangerang dengan KPKNL Tangerang I dan KPKNL Serang.

Strategi internal dari UPT Tangerang adalah melakukan pengecekan data status tagihan secara berkala, penyampaian *invoice* ke waba baik melalui media telepon online, ekspedisi atau langsung ke alamat waba, pengecekan ke alamat waba yang pembayarannya mendekati atau melewati tanggal jatuh tempo sekaligus sosialisasi terkait perizinan, kolaborasi dengan tim kerja terkait.

Agar pencapaian semakin maksimal UPT Tangerang juga berbagi informasi melalui telepon, media sosial sebagai sumber informasi perizinan yang dibutuhkan oleh masyarakat/instansi atau pemegang izin yang sudah eksisting. Media sosial tersebut adalah *Whatsapp, Instagram, Facebook, dan X*. Selain itu inovasi lain adalah [linktr.ee/perizinanisr](http://linktr.ee/perizinanisr) yang berisi sumber informasi perizinan, peraturan peraturannya, panduan/tutorial serta persyaratan perizinan yang sudah dibagikan Direktorat Layanan Infradigi untuk dijadikan panduan juga oleh UPT lain.

Sebagai pembandingan (*benchmarking*) penanganan piutang berdasarkan penyampaian tagihan BHP frekuensi radio antara Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang dengan Balai Monitor SFR Kelas I Yogyakarta. UPT Yogyakarta dipilih menjadi pembandingan karena jumlah wilayah kerjanya yang tidak jauh berbeda dengan Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang. Ilustrasi target BHP frekuensi radio setiap bulannya diilustrasikan sebagai berikut :

| Nama UPT          | Wilayah Kerja         | Target BHP Frekuensi Radio | Capaian |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------|
| Balmon Tangerang  | 8 Kabupaten dan Kota  | 112                        | 104%    |
| Balmon Yogyakarta | 10 Kabupaten dan Kota | 47                         | 100%    |

**Tabel 3.44 Benchmarking Capaian Kinerja Balmon Tangerang dengan Balmon Yogyakarta**

Hasil dari strategi, upaya, dan inovasi yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, sudah banyak dirasakan oleh pengguna frekuensi . Terbukti dengan meningkatnya kunjungan masyarakat ke Kantor Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang, pertanyaan yang diajukan lewat media bahkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban dalam hal ini adalah pembayaran tagihan.

Penanganan piutang Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio memerlukan pendekatan holistik (menyeluruh) karena melibatkan aspek hukum, keuangan, teknologi, dan kepatuhan wajib bayar. Piutang BHP Frekuensi Radio pada Ditjen Infrastruktur dan Digital Kementerian Komdigi seringkali bernilai besar dan memerlukan penanganan sistematis agar tidak mengganggu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

### IV. Faktor Kendala/Hambatan pada Pencapaian Target

Kendala/hambatan dalam penanganan piutang dapat dikategorikan beberapa faktor. Dari faktor data yang tidak akurat karena wajib bayar tidak melakukan pemutakhiran data menyebabkan tidak sampainya informasi yang disampaikan termasuk informasi dokumen tagihan. Data yang dimaksud adalah nama penanggungjawab, alamat, serta data yang ada dalam akun pemegang izin. Faktor finansial dari wajib bayar terhadap nilai dan jatuh tempo pembayaran. Kendala lain dari sisi internal UPT adalah terbatasnya anggaran untuk menunjang seluruh kegiatan yang diamanahkan oleh Dirjen Infrastruktur Digital.

Solusi yang sudah dilakukan adalah optimalisasi proses dengan melakukan pengecekan ke lapangan (alamat) wajib bayar serta koordinasi dengan Direktorat Layanan Infradigi untuk memaksimalkan sinkronisasi data.

Dampak yang dirasakan terutama oleh pengguna frekuensi radio adalah tersedianya data dan informasi yang lebih akurat dan dalam waktu sesingkat mungkin untuk menuju masyarakat pengguna frekuensi radio yang tertib dan patuh dengan aturan.

## V. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang melaksanakan tindak lanjut penanganan piutang. Piutang ini timbul akibat keterlambatan atau ketidakpatuhan pemegang Izin Stasiun Radio (ISR) dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai peraturan yang berlaku. Tindak lanjut diperlukan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya piutang negara serta penyelesaian penanganan piutang negara.

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang sebagai tindak lanjut dari pemanfaatan Laporan Kinerja sebelumnya adalah pemanfaatan data pengguna frekuensi radio di wilayah Banten yang memiliki tunggakan BHP SFR. Memastikan pemegang izin, jumlah piutang, dan status jatuh tempo telah tervalidasi secara akurat, penyampaian surat tagihan yang sudah terbit baik secara offline maupun melalui media online. Kemudian upaya penagihan langsung ke alamat wajib bayar jika surat tagihan tidak memberikan hasil optimal. Kegiatan ini didokumentasikan dalam Berita Acara Pengecekan Lapangan. Koordinasi dengan KPKNL di Wilayah Banten terkait pelimpahan piutang dari Ditjen Infradigi, serta Koordinasi Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) menjadi tugas tambahan untuk Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang di tahun 2025.

## VI. Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya

Untuk meningkatkan kinerja penanganan piutang di tahun berikutnya diperlukan implementasi beberapa rekomendasi strategis: berupa aturan yang tegas berupa sanksi administrasi dan hukum berupa denda, penghentian izin, ditutupnya akses perizinan di semua sektor Rekonsiliasi Data Piutang dengan melaksanakan rekonsiliasi data piutang secara rutin dan terkoordinasi Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang dengan instansi penagih piutang negara (DJKN/KPKNL).

Sistem informasi terintegrasi dan akurat di *web* perizinan dan *billing-isr* untuk mengurangi kesalahan perhitungan dan memastikan pelaporan piutang tidak tertagih yang akurat. Standardisasi mekanisme pembayaran: untuk memastikan semua pembayaran BHP dilakukan melalui mekanisme yang terstandarisasi, seperti sistem host-to-host melalui bank-bank yang ditunjuk, untuk memudahkan pemantauan dan administrasi, serta menghindari pembayaran melalui jalur yang tidak terinformasi ke Ditjen Infradigi. Pendekatan proaktif: petugas lapangan dari Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang dengan pendampingan dan penelitian ke lapangan untuk memastikan efektivitas penagihan.

## VII. Efisiensi

Efisiensi pelaksanaan penanganan piutang Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio, mencakup beberapa aspek. Aspek digitalisasi yang mempengaruhi efisiensi biaya penyampaian tagihan, dimana Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang dapat menyampaikan tagihan melalui media online. Pemegang izin pun dapat mengunduh tagihan secara mandiri melalui *web billing-isr* dengan menggunakan akun masing masing. Aspek digitalisasi juga meningkatkan efisien

waktu menyampaikan menjadi lebih singkat termasuk cara melakukan pembayaran sudah disediakan fitur pembayaran secara online. Penerbitan ISR atau dokumen Bukti Pelunasan Pembayaran BHP Frekuensi Radio juga langsung melalui *web* perizinan.

Untuk mempercepat proses pembayaran, komunikasi yang lebih intensif dengan pengguna frekuensi radio telah dilakukan, melalui pengingat via media online maupun langsung ke alamat waba. Keberhasilan efisiensi ini juga diperoleh dengan menciptakan saluran komunikasi yang lebih terbuka dan responsif, yang memungkinkan pelanggan untuk menyampaikan kendala pembayaran mereka dengan lebih mudah, sehingga mempercepat penyelesaian masalah yang ada.

Otomatisasi Pengelolaan Pembayaran dan Pencatatan Implementasi sistem pembayaran otomatis yang

terintegrasi dengan sistem pencatatan piutang telah mengurangi waktu dan tenaga yang sebelumnya dialokasikan untuk penginputan manual data transaksi. Pengguna dapat melakukan pembayaran secara online, yang secara langsung tercatat dalam sistem. Hal ini tidak hanya mempercepat proses tetapi juga meningkatkan akurasi data serta mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan.

Pelatihan dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam hal penanganan piutang juga menjadi aspek penting dalam menciptakan efisiensi. Dengan meningkatkan kompetensi tim koleksi dan administrasi, baik dalam hal pengetahuan teknologi maupun teknik negosiasi dengan klien, penanganan piutang dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

### VIII. Implementasi Budaya BerAKHLAK

Nilai berorientasi Pelayanan menjadi komitmen pegawai dengan memberikan ruang yang lebih luas dalam komunikasi dan pendekatan yang lebih humanis.

Pelayanan yang prima memastikan wajib bayar memahami kewajiban dan prosedur pembayaran. Targetnya adalah peningkatan tingkat kepatuhan pembayaran wajib bayar dan penurunan jumlah piutang baru.

Penerapan nilai akuntabel dengan melaksanakan penatausahaan, pelaporan, dan penagihan piutang secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi (seperti *e-licensing*) membantu memastikan setiap transaksi tercatat dengan benar.

Target dari nilai ini adalah akurasi data piutang, pelaporan keuangan yang tepat waktu.

Penerapan nilai kompeten dengan meningkatkan kapasitas dan keahlian pegawai dalam pengelolaan piutang, aturan/regulasi, dan penggunaan digitalisasi untuk pemantauan dan penagihan piutang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi proses penagihan, dan mengurangi potensi piutang baru.

Penerapan nilai harmonis dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan saling kerjasama antara unit kerja yang terlibat, seperti Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang, Direktorat Layanan Infradigi, serta instansi di luar Kemkomdigi yaitu KPKNL di wilayah Banten. Targetnya adalah untuk meminimalisir konflik internal, meningkatkan koordinasi, dan produktivitas tim.

Penerapan nilai loyal dengan menjaga nama baik Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang dan lebih luas lagi Kementerian Komdigi dengan memastikan Pelayanan terlaksana dengan baik, serta tidak menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Tujuannya adalah terjaganya integritas institusi dan kepercayaan publik terhadap Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Penerapan nilai adaptif dengan menerapkan sistem dan metode baru dalam penanganan piutang, seperti digitalisasi layanan dan penagihan.

Penerapan nilai kolaboratif dengan menjalin kerja sama yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan, di lingkungan intern Kementerian Komdigi Direktorat Jenderal Infradigi maupun eksternal dengan DJKN (KPKNL Wilayah Banten). Tujuannya untuk menyelesaikan tagihan piutang yang lebih cepat melalui

Dengan menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai **BerAKHLAK**, petugas dapat bekerja lebih profesional dan terkoordinasi, yang secara langsung berdampak positif pada pencapaian target indikator kinerja penanganan piutang BHP frekuensi radio.



Gambar 3.21 Dokumentasi Kegiatan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio



Gambar 3.22 Penghargaan DJID Choice Award (DiGiWave) sebagai Juara I Kategori Balai Monitor SFR dengan Penyelesaian Piutang paling Aktif

## 10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik

Indikator persentase (%) pelaksanaan sosialisasi perizinan frekuensi radio merupakan salah satu upaya untuk menyampaikan informasi sekaligus memberikan himbauan kepada pengguna frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi yang sesuai menurut peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mematuhi mekanisme atau tata cara penggunaan spektrum frekuensi radio yang baik dan benar serta tidak melanggar peraturan. Dengan demikian, tugas pokok dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang untuk menjaga ketertiban dan keteraturan dalam penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan alat perangkat telekomunikasi di wilayah Provinsi Banten akan tercapai.

Kegiatan sosialisasi ini adalah untuk menciptakan tertibnya penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi serta memastikan penggunaan dan pemanfaatan yang efektif, efisien, dan sesuai peruntukannya agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat pengguna frekuensi radio.

Penerima manfaat dari pencapaian indikator ini seluruh pengguna layanan telekomunikasi, instansi pemerintah, sektor keselamatan publik, pelaku usaha, serta masyarakat umum.

## II. Capaian Target

Indikator Kinerja Persentase (%) Sosialisasi Perizinan Frekuensi Radio memiliki target realisasi sebesar 100%. Berdasarkan data pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun 2025, diketahui bahwa capaian indikator tersebut mencapai 100%, sehingga persentase realisasi kinerja terpenuhi sepenuhnya sesuai target PK yang telah ditetapkan.

### 10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik

| Kinerja                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                 | Target | Capaian | Persentase |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| Sosialisasi Perizinan Frekuensi Radio dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan dan ketertiban pemanfaatan spektrum frekuensi sesuai ketentuan teknis dan regulasi. | Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan Frekuensi Radio | 100%   | 100%    | 100%       |

Tabel 3.45 Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan Frekuensi Radio

Memasuki tahun 2025, kegiatan Sosialisasi Perizinan Frekuensi Radio tetap dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pemenuhan indikator kinerja serta peningkatan pemahaman pengguna terhadap ketentuan perizinan spektrum frekuensi radio. Pelaksanaan sosialisasi ini menjadi salah satu langkah penguatan tertib administrasi dan kepatuhan dalam pemanfaatan spektrum.

Adapun pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio telah melaksanakan Sosialisasi Perizinan Frekuensi Radio dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang. Kegiatan ini difokuskan pada penyampaian prosedur permohonan, persyaratan teknis, jenis pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio, hingga penjelasan mengenai klasifikasi pengenaan denda dan atau sanksi terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio. Dengan tingkat kehadiran yang sesuai rencana, kegiatan sosialisasi pada tahun 2025 dinyatakan terlaksana dengan baik dan memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

| Sasaran Program                                                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja Sasaran Program                    | 2021   |           | 2022   |           | 2023   |           | 2024   |           | 2025   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                      | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Meningkatnya Kepatuhan perizinan mendukung peningkatan layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban, dan pelayanan publik spektrum frekuensi dengan memberikan pemahaman dasar terkait perizinan ISR kepada peserta. | Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan ISR | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      |

**Tabel 3.46 Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan Frekuensi Radio**

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatkan kepatuhan perizinan guna mendukung layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban, serta pelayanan publik di bidang spektrum frekuensi radio melalui pemberian pemahaman dasar terkait perizinan ISR serta pengetahuan mengenai pengenaan denda dan atau sanksi terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio.

Pelaksanaan sosialisasi ini menunjukkan konsistensi capaian yang optimal selama lima tahun terakhir. Pada periode 2021 hingga 2025, target pelaksanaan sebesar 100% setiap tahun dan seluruhnya berhasil direalisasikan sesuai target.

Capaian tersebut mencerminkan bahwa kegiatan sosialisasi berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan pemahaman peserta serta kepatuhan perizinan ISR. Hal ini juga menjadi indikasi bahwa mekanisme perencanaan dan pelaksanaan program telah berjalan dengan baik dan konsisten.

### III. Analisa Yang Terkait Indikator Kinerja Secara Umum dan Holistik

Kondisi data capaian eksisting sosialisasi menunjukkan kinerja sangat baik dengan realisasi sebesar 100% pada tahun 2025, sehingga mencapai target 100%.

Kondisi capaian pelaksanaan Sosialisasi Perizinan Frekuensi Radio pada Balai Monitor Kelas I Tangerang menunjukkan tren realisasi 100% secara konsisten dari tahun 2021–2025. Stabilitas capaian ini menggambarkan bahwa proses perencanaan, koordinasi, dan eksekusi kegiatan berjalan efektif. Tantangan utama yang dihadapi selama pelaksanaan umumnya terkait pembaruan regulasi ISR yang dinamis, serta kebutuhan penyesuaian materi agar sesuai dengan karakteristik pemegang izin di wilayah kerja.

Dari sisi kolaborasi, pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan Dit. Layanan Infradigi serta Dit. Pengendalian Infradigi sebagai penyedia pedoman dan materi terbaru. Sinergi ini memastikan bahwa materi sosialisasi tetap relevan, akurat, dan selaras dengan kebijakan nasional.

Strategi internal yang diterapkan meliputi penjadwalan sosialisasi secara terukur, merencanakan kegiatan dengan berdasarkan tema kegiatan dengan konsep penyusunan yang baik, menyiapkan narasumber terkait sesuai dengan tema kegiatan, menentukan target peserta undangan kegiatan sosialisasi sesuai dengan tema kegiatan, menyusun tim

kepanitiaan sesuai dengan kebutuhan tugas dalam kegiatan, menyiapkan sarana dan prasarana pada kegiatan yang akan dilaksanakan, melaksanakan kegiatan sosialisasi sesuai jadwal dan susunan acara yang telah ditentukan serta pemanfaatan saluran informasi dan layanan konsultasi untuk memperluas jangkauan informasi. Inovasi yang mendukung keberhasilan capaian adalah penggunaan pranala terpadu (misalnya linktree informasi ISR), penyediaan materi digital, pendataan konfirmasi kehadiran secara digital dan integrasi dengan layanan konsultasi daring sehingga peserta dapat memperoleh pemahaman perizinan secara cepat dan terstruktur.

Secara keseluruhan, capaian 100% selama lima tahun berturut-turut menunjukkan bahwa strategi koordinasi, kesiapan materi, serta inovasi penyampaian informasi yang dilakukan telah efektif dalam mendukung peningkatan kepatuhan dan kualitas layanan sosialisasi perizinan ISR.

#### **Benchmarking capaian dengan UPT lain**

Tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang menyelenggarakan kegiatan sosialisasi frekuensi radio kepada masyarakat sebanyak 1 kali. Berikut adalah perbandingan capaian kinerja dengan UPT lainnya:

| UPT              | Target | Capaian |
|------------------|--------|---------|
| Balmon Tangerang | 100%   | 100%    |
| Balmon Bandung   | 100%   | 100%    |
| Balmon Jakarta   | 100%   | 100%    |

Berdasarkan data pada tabel di samping dapat dilihat bahwa Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang memiliki jumlah kab/kota yang lebih sedikit dibandingkan dengan Balai Monitor SFR Kelas I Bandung dan Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta.

**Tabel 3.47 Benchmarking Capaian Kinerja Dengan UPT Lainnya**

Namun secara kinerja baik Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang maupun Balai Monitor SFR Kelas I Bandung dan Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta dapat mencapai target kinerja sebesar 100% serta dalam pelaksanaan kegiatan dapat memenuhi kuota peserta sesuai dengan target. Dalam hal ini Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang diharapkan dapat terus mempertahankan hasil capaian kinerja.

#### **IV. Faktor Kendala/Hambatan pada Pencapaian Target**

Kendala utama dalam pelaksanaan Sosialisasi ini berkaitan dengan proses konfirmasi kehadiran yang sering terlambat termasuk peserta yang baru konfirmasi saat kegiatan sudah dimulai. Kondisi ini mengganggu ketertiban administrasi serta penyiapan materi dan kebutuhan kegiatan.

Sebagai upaya percepatan, dilakukan penegasan batas waktu konfirmasi kehadiran, penyampaian pengingat melalui berbagai kanal komunikasi, serta penyediaan formulir digital untuk mempermudah proses konfirmasi kehadiran dan verifikasi. Selain itu, materi sosialisasi disediakan dalam bentuk digital agar peserta dapat mengakses informasi secara mandiri, sehingga efektivitas kegiatan tetap terjaga meskipun terdapat keterlambatan dalam pendataan.

#### **V. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang memanfaatkan hasil laporan kinerja sebagai dasar penyempurnaan pelaksanaan Sosialisasi Perizinan Frekuensi Radio, terutama dalam menertibkan proses konfirmasi dan verifikasi peserta yang sebelumnya kerap mengalami keterlambatan. Tindak lanjut dilakukan melalui penyempurnaan konsep penyelenggaraan kegiatan sosialisasi sesuai kebutuhan sosialisasi lanjutan berdasarkan evaluasi kegiatan tahun berjalan. Langkah ini memastikan peningkatan efektivitas penyampaian informasi perizinan ISR dan mendukung peningkatan kepatuhan pengguna spektrum frekuensi di wilayah Provinsi Banten.

#### **VI. Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya**

Untuk meningkatkan kinerja sosialisasi di tahun berikutnya diperlukan implementasi beberapa rekomendasi strategis yaitu berupa Melakukan evaluasi secara berkala dengan memastikan bahwa perbaikan tidak hanya diarahkan pada kepatuhan peserta, tetapi juga pada peningkatan mutu pengelolaan kegiatan oleh penyelenggara melalui evaluasi teknis, prosedural, dan operasional terkait penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang sudah terlaksana agar dapat terus melakukan inovasi dan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan. Serta melakukan sosialisasi tentang frekuensi radio kepada masyarakat luas lewat media social maupun pertemuan langsung agar dapat terlaksana secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait peraturan penggunaan frekuensi radio dan sanksi denda administratif bagi pelanggar aturan tersebut.

Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pendataan peserta pada kegiatan berikutnya serta meminimalkan hambatan administratif yang dapat mengganggu jalannya sosialisasi.

## VII. Efisiensi

Efisiensi pelaksanaan sosialisasi perizinan frekuensi radio, mencakup beberapa aspek dari sisi efisiensi waktu dimana pendataan konfirmasi kehadiran peserta menjadi lebih cepat dengan adanya konfirmasi secara digital, pengumpulan data lebih cepat dan rekap otomatis. Kemudian penggunaan materi digital untuk sosialisasi memungkinkan pengurangan biaya cetak dan distribusi fisik.

## VIII. Implementasi Budaya BerAKHLAK

Pelaksanaan kegiatan ini mencerminkan nilai-nilai BerAKHLAK dengan :

- Nilai **Ber**orientasi Pelayanan diwujudkan melalui penyediaan informasi yang jelas, sistem pendaftaran digital yang mudah diakses, serta respons cepat terhadap kebutuhan peserta.
- Nilai **Ak**untabel tercermin dalam seluruh proses kegiatan sosialisasi yang dirancang agar dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan terukur. Setiap tahapan, mulai dari pendataan peserta, penyiapan materi, hingga dokumentasi hasil kegiatan, dilakukan dengan mengikuti prosedur yang jelas dan berbasis bukti.
- Nilai **K**ompeten ditunjukkan melalui peningkatan kemampuan tim dalam mengelola sistem digital, menyusun materi sosialisasi yang relevan, dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar. Selain itu, suasana kerja **H**armonis dibangun melalui koordinasi internal yang baik, komunikasi terbuka, dan pembagian tugas yang proporsional antar anggota tim.
- Nilai **L**oyal diwujudkan dengan menjaga komitmen terhadap tujuan organisasi, termasuk memastikan kegiatan sosialisasi terlaksana secara konsisten dan sesuai target yang telah ditetapkan. Tim juga menerapkan nilai **A**daptif dengan cepat menyesuaikan metode kerja melalui digitalisasi proses pendaftaran, penggunaan materi sosialisasi daring, serta optimalisasi berbagai kanal komunikasi untuk mengatasi keterlambatan pendataan peserta.
- Terakhir, nilai **K**olaboratif terlihat dari sinergi antara panitia, pemateri, serta stakeholder lainnya dalam menyiapkan materi, teknis pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Penerapan menyeluruh nilai-nilai BerAKHLAK ini menjadi pondasi penting dalam memastikan kegiatan sosialisasi berjalan efektif, efisien, dan mampu mencapai seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan.



Gambar 3.23 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Perizinan Frekuensi

## 11. Persentase (%) Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

| Indikator                                 | Nilai              | Periode                               | Jumlah Responden |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|
| IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)          | 3,93 – Sangat Baik | Triwulan IV<br>(Oktober s.d Desember) | 119 Responden    |
| IPKP (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan) | 3,95– Sangat Baik  |                                       |                  |

Persentase (%) Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) merupakan indikator yang menunjukkan tingkat realisasi kegiatan survei dibandingkan dengan rencana pelaksanaan dalam periode tertentu.

**Tabel 3.48 Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)**

Pengukuran ini dilakukan untuk memastikan bahwa survei kepuasan masyarakat dan persepsi kualitas pelayanan publik dilaksanakan secara konsisten sebagai bagian dari evaluasi dan peningkatan mutu layanan. Persentase dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah survei yang telah dilaksanakan dengan jumlah survei yang direncanakan, kemudian dikalikan 100%.

Persentase (%) Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) itu dihitung dari perbandingan antara survei yang sudah dilaksanakan dengan yang yang direncanakan.

 Rumusnya:

$$\text{Persentase Pelaksanaan} = \frac{\text{Jumlah survei yang sudah dilaksanakan}}{\text{Jumlah survei yang direncanakan}} \times 100\%$$

### I. Latar Belakang, Maksud, dan Tujuan

Indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)” Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang sebagai Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID), mempunyai tugas dan fungsi terkait pelayanan publik yaitu Asistensi, konsultasi pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio, Penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio, dan Penanganan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Penerima manfaat indikator ini meliputi dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima, berkualitas dan berintegritas, serta dapat memenuhi kepentingan dan harapan pengguna layanan, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang melaksanakan survei kepada pengguna layanan dan stakeholder secara berkala.

### II. Tabulasi Data Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan hingga akhir Tahun 2025, diketahui bahwa indikator kinerja Persentase Indeks Integritas, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) telah mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat direalisasikan secara optimal dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.

| Sasaran Program                                                                                                                               | Indikator Kinerja Sasaran Program            | 2021   |           | 2022   |           | 2023   |           | 2024   |           | 2025   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                                                                                                                                               |                                              | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Survei Kepuasan Pelayanan Publik berkala setiap Triwulan untuk mengukur kinerja instansi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. | Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      |

**Tabel 3.49 Persentase Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik**

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatkan dan/atau dipertahankan dengan upaya antara lain :

- Pelaksanaan pelayanan perizinan frekuensi radio sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Penanganan pengaduan gangguan sesegera mungkin dan secara tuntas;
- Pelaksanaan penertiban terhadap frekuensi ilegal serta proses penindakan hukum untuk pelanggaran penggunaan frekuensi;

Pelaksanaan sosialisasi tentang frekuensi radio kepada masyarakat luas lewat media sosial maupun pertemuan langsung lebih dirutinkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan penggunaan frekuensi radio.

### III. Analisa Yang Terkait Indikator Kinerja Secara Umum dan Holistik

Capaian indikator menunjukkan kinerja sangat baik dengan realisasi sebesar 100% pada tahun 2025.

Survei menggunakan alat bantu berupa kuesioner berbasis elektronik, dimana responden yang memiliki ISR dan SOR dapat mengisi kuesioner melalui formulir *online*, yang dapat diakses melalui tautan <https://s.komdigi.go.id/surveitangerang2025> atau dengan memindai QR Code :



Gambar 2.24 Survey Kepuasan Masyarakat

Jika IKM, dan IPKP mencapai 100%, berarti instansi berada pada tingkat kinerja ideal: bersih, transparan, bebas korupsi, berkualitas, cepat, responsif, dan memuaskan masyarakat.

Ini menggambarkan sinergi sempurna antara integritas, kualitas layanan, dan persepsi masyarakat—sebuah kondisi ideal yang menjadi tujuan utama pelayanan.

Tujuan *Benchmarking* antar unit kerja dilakukan untuk membandingkan capaian indeks pelayanan publik dalam satu instansi guna mengidentifikasi praktik terbaik (*best practice*) yang dapat direplikasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

UPT Semarang :

| Indikator                                 | Nilai              | Periode                               | Jumlah Responden |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|
| IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)          | 3,56 – Sangat Baik | Triwulan IV<br>(Oktober s.d Desember) | 79 Responden     |
| IPKP (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan) | 3,56 – Sangat Baik |                                       |                  |

Berdasarkan hasil penilaian survei tersebut, diperoleh nilai dalam bentuk Skoring.

**Tabel 3.50 Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) UPT Semarang**

Sumber data Instagram : [https://www.instagram.com/p/DLpRTOzzskt/?img\\_index=1](https://www.instagram.com/p/DLpRTOzzskt/?img_index=1)

Angka indeks yang didapatkan merupakan angka persepsi masyarakat terhadap layanan dari pemerintah yang mengukur tingkat kualitas dan integritas pelayanan. Nilai skala dan interval konversi dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

| Nilai Persepsi | Nilai Interval | Nilai Interval Konversi | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|----------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------|
| 1              | 1.00 - 2.59    | 25.00 - 64.99           | D              | Tidak Baik             |
| 2              | 2.60 - 3.06    | 65.00 - 76.60           | C              | Kurang Baik            |
| 3              | 3.06 - 3.53    | 76.61 - 88.30           | B              | Baik                   |
| 4              | 3.53 - 4.00    | 88.31 - 100.00          | A              | Sangat Baik            |

**Tabel 3.51 Nilai Skala dan Interval Konversi Pelayanan Publik**

Sumber Data : Permen 14 Tahun 2017

Balmon Tangerang dan Semarang menunjukkan kinerja yang unggul pada seluruh indikator. Namun, masih memerlukan peningkatan konsistensi pelayanan.

Inovasi dan strategi peningkatan pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)/Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dilaksanakan secara terpadu melalui pemanfaatan teknologi, perbaikan budaya kerja, peningkatan sarana dan prasarana, serta penguatan responsivitas pelayanan.

Peningkatan IKM mencerminkan semakin tingginya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sementara IPKP menunjukkan persepsi positif masyarakat terhadap kualitas proses dan hasil pelayanan. Kedua indikator ini saling melengkapi sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan. Melalui strategi dan inovasi yang komprehensif, Balai Monitor Kelas I Tangerang diharapkan mampu mencapai performa layanan publik yang bersih, profesional, dan berorientasi kepada masyarakat.

#### IV. Faktor Kendala/Hambatan pada Pencapaian Target

Dalam pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), serta Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP), UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang menghadapi sejumlah kendala baik dari sisi teknis, operasional, maupun partisipasi responden. Meskipun capaian kinerja telah terpenuhi sesuai target, proses pengumpulan data dan penguatan kualitas pelayanan tetap memerlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan.

Melalui upaya percepatan yang terstruktur dan berkelanjutan tersebut, UPT Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan berintegritas tinggi, serta mampu memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi seluruh pengguna layanan. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat konsistensi nilai IKM, dan IPKP dalam memenuhi target kinerja setiap tahunnya.

#### V. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)/Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) menjadi instrumen penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di UPT Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang. Pemanfaatan laporan

ini tidak hanya sebatas sebagai pengukuran capaian kinerja tahunan, tetapi juga sebagai dasar penyusunan kebijakan, penguatan tata kelola, serta penyempurnaan layanan secara berkelanjutan.

Tindak lanjut pemanfaatan laporan kinerja IKM/IPKP menjadi pondasi dalam memperkuat sistem pelayanan publik yang berintegritas, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. UPT Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang berkomitmen untuk terus memanfaatkan hasil laporan kinerja sebagai alat evaluasi utama dalam mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan, serta mampu memenuhi harapan pengguna layanan secara berkelanjutan.

## VI. Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya

Berdasarkan hasil analisis capaian indeks dan evaluasi pelaksanaan survei pada tahun berjalan, terdapat sejumlah rekomendasi perbaikan yang dapat dijadikan prioritas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di UPT Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang pada tahun berikutnya. Rekomendasi ini disusun untuk memperkuat integritas, meningkatkan kepuasan masyarakat, memperbaiki persepsi anti korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh.

Rekomendasi perbaikan ini diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan program kerja dan prioritas peningkatan kualitas pelayanan pada tahun berikutnya. Dengan pelaksanaan rekomendasi secara konsisten dan terarah, UPT Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang mampu memperkuat integritas, meningkatkan kepuasan masyarakat, serta menciptakan pelayanan publik yang semakin modern, transparan, dan berdaya saing tinggi.

## VII. Efisiensi

Efisiensi juga terlihat dari pemanfaatan SDM secara optimal. Petugas pelayanan dan tim pengumpulan data tidak memerlukan tambahan tenaga khusus karena sistem survei yang berbasis digital sudah otomatis mengelompokkan dan mengolah data. Dengan demikian, SDM dapat difokuskan pada peningkatan kualitas interaksi pelayanan dan penyelesaian aduan masyarakat, yang secara langsung berdampak pada peningkatan nilai IKM/IPKP.

## VIII. Implementasi Budaya BerAKHLAK

UPT Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang mengimplementasikan nilai-nilai BerAKHLAK secara konsisten sebagai fondasi peningkatan kualitas layanan publik. Nilai Berorientasi Pelayanan diwujudkan melalui penyederhanaan prosedur dan peningkatan responsivitas, yang berdampak pada naiknya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)/Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP). Nilai Akuntabel dan Harmonis diterapkan dalam transparansi layanan serta komunikasi yang aktif.

Nilai Kompeten dan Loyal diperkuat melalui peningkatan kapasitas SDM serta komitmen menjaga kualitas layanan yang konsisten setiap tahun, yang berkontribusi pada capaian indikator kinerja hingga 100%. Sementara itu, nilai Adaptif mendukung inovasi digital dan perbaikan berkelanjutan, serta nilai Kolaboratif mendorong sinergi dengan para pemangku kepentingan, yang mampu meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)/Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP).

Implementasi komprehensif nilai BerAKHLAK ini menjadi pilar utama dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan publik.



Gambar 3.25 Dokumentasi Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat

## 12. Persentase (%) Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

| Indikator                                 | Nilai              | Periode                               | Jumlah Responden |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|
| IIPP (Indeks Integritas Pelayanan Publik) | 3,95– Sangat Baik  | Triwulan IV<br>(Oktober s.d Desember) | 119 Responden    |
| IPAK (Indeks Persepsi Anti Korupsi)       | 3,95 – Sangat Baik |                                       |                  |

Persentase (%) Pelaksanaan Survei Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat realisasi pelaksanaan survei dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan dalam periode tertentu.

**Tabel 3.52 Persentase (%) Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)**

Pengukuran ini bertujuan untuk memastikan bahwa evaluasi terhadap integritas pelayanan serta persepsi masyarakat terkait praktik anti korupsi dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Persentase pelaksanaan dihitung dari perbandingan antara jumlah survei yang telah dilaksanakan dengan jumlah survei yang direncanakan, kemudian dikalikan 100%. Capaian ini mencerminkan komitmen unit kerja dalam memantau kualitas integritas pelayanan publik, memperkuat budaya anti korupsi, serta mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

### I. Latar Belakang, Maksud, dan Tujuan

Indikator “Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP), dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang sebagai Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID), mempunyai tugas dan fungsi terkait pelayanan publik yaitu Asistensi, konsultasi pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio, Penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio, dan Penanganan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Penerima manfaat indikator ini meliputi dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima, berkualitas dan berintegritas, serta dapat memenuhi kepentingan dan harapan pengguna layanan, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang melaksanakan survei kepada pengguna layanan dan stakeholder secara berkala.

### II. Tabulasi Data Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan hingga akhir Tahun 2025, diketahui bahwa indikator kinerja Persentase Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat direalisasikan secara optimal dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.

| Sasaran Program                                                                                                                               | Indikator Kinerja Sasaran Program            | 2021   |           | 2022   |           | 2023   |           | 2024   |           | 2025   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                                                                                                                                               |                                              | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Survei Kepuasan Pelayanan Publik berkala setiap Triwulan untuk mengukur kinerja instansi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. | Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      |

**Tabel 3.53 Persentase Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik**

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatkan dan/atau dipertahankan dengan upaya antara lain :

- Pelaksanaan pelayanan perizinan frekuensi radio sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Penanganan pengaduan gangguan sesegera mungkin dan secara tuntas;
- Pelaksanaan penertiban terhadap frekuensi ilegal serta proses penindakan hukum untuk pelanggaran penggunaan frekuensi;

Pelaksanaan sosialisasi tentang frekuensi radio kepada masyarakat luas lewat media sosial maupun pertemuan langsung lebih dirutinkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan penggunaan frekuensi radio.

### III. Analisa yang Terkait Indikator Kinerja Secara Umum dan Holistik

Capaian indikator menunjukkan kinerja sangat baik dengan realisasi sebesar 100% pada tahun 2025.

Survei menggunakan alat bantu berupa kuesioner berbasis elektronik, dimana responden yang memiliki ISR dan SOR dapat mengisi kuesioner melalui formulir *online*, yang dapat diakses melalui tautan <https://s.komdigi.go.id/surveitangerang2025> atau dengan memindai QR Code :



Jika IIPP, dan IPAK, mencapai 100%, berarti instansi berada pada tingkat kinerja ideal: bersih, transparan, bebas korupsi, berkualitas, cepat, responsif, dan memuaskan masyarakat.

Ini menggambarkan sinergi sempurna antara integritas, kualitas layanan, dan persepsi masyarakat—sebuah kondisi ideal yang menjadi tujuan utama pelayanan.

Tujuan *Benchmarking* antar unit kerja dilakukan untuk membandingkan capaian indeks pelayanan publik dalam satu instansi guna mengidentifikasi praktik terbaik (*best practice*) yang dapat direplikasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

UPT Semarang :

| Indikator                                 | Nilai              | Periode                         | Jumlah Responden |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|
| IIPP (Indeks Integritas Pelayanan Publik) | 3,90 – Sangat Baik | Triwulan II<br>(April s.d Juni) | 48 Responden     |
| IPAK (Indeks Persepsi Anti Korupsi)       | 3,90 – Sangat Baik |                                 |                  |

Berdasarkan hasil penilaian survei tersebut, diperoleh nilai dalam bentuk Skoring.

**Tabel 3.54 Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) UPT Semarang**

Sumber data Instagram : [https://www.instagram.com/p/DLpRTOzskt/?img\\_index=1](https://www.instagram.com/p/DLpRTOzskt/?img_index=1)

Angka indeks yang didapatkan merupakan angka persepsi masyarakat terhadap layanan dari pemerintah yang mengukur tingkat kualitas dan integritas pelayanan. Nilai skala dan interval konversi dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

| Nilai Persepsi | Nilai Interval | Nilai Interval Konversi | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|----------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------|
| 1              | 1.00 - 2.59    | 25.00 - 64.99           | D              | Tidak Baik             |
| 2              | 2.60 - 3.06    | 65.00 - 76.60           | C              | Kurang Baik            |
| 3              | 3.06 - 3.53    | 76.61 - 88.30           | B              | Baik                   |
| 4              | 3.53 - 4.00    | 88.31 - 100.00          | A              | Sangat Baik            |

**Tabel 3.55 Nilai Skala dan Interval Konversi Pelayanan Publik**

Sumber Data : Permen 14 Tahun 2017

Upt Tangerang menunjukkan kinerja unggul pada seluruh indikator dan menjadi rujukan praktik terbaik namun Upt Semarang memiliki kinerja cukup baik namun masih memerlukan peningkatan konsistensi pelayanan. *Benchmarking* antar unit kerja menunjukkan perbedaan capaian indeks pelayanan publik. Hasil benchmarking ini menjadi dasar perumusan strategi peningkatan IIPP, dan IPAK, secara terintegrasi melalui replikasi praktik terbaik dan penguatan tata kelola pelayanan.

Inovasi dan strategi peningkatan pada IIPP, dan IPAK, dilaksanakan secara terpadu dengan pendekatan teknologi, perbaikan budaya kerja, peningkatan sarana prasarana, dan penguatan responsivitas layanan. Kedua indikator ini saling melengkapi integritas memperkuat kepercayaan publik, kepuasan masyarakat meningkatkan legitimasi layanan, persepsi anti-korupsi mengurangi risiko penyimpangan, dan kualitas pelayanan menjadi fondasi yang menumbuhkan kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Melalui strategi dan inovasi yang komprehensif, Balai Monitor Kelas I Tangerang diharapkan mampu mencapai performa layanan publik yang bersih, profesional, dan berorientasi kepada masyarakat.

#### IV. Faktor Kendala/Hambatan pada Pencapaian Target

Dalam pelaksanaan pengukuran Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang menghadapi sejumlah kendala baik dari sisi teknis, operasional, maupun partisipasi responden. Meskipun capaian kinerja telah terpenuhi sesuai target, proses pengumpulan data dan penguatan kualitas pelayanan tetap memerlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan.

Melalui upaya percepatan yang terstruktur dan berkelanjutan tersebut, UPT Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bebas dari korupsi, berintegritas tinggi, serta mampu memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi seluruh pengguna layanan. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat konsistensi nilai IIPP, IPAK, dalam memenuhi target kinerja setiap tahunnya.

#### V. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) menjadi instrumen penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang.

Pemanfaatan laporan ini tidak hanya sebatas sebagai pengukuran capaian kinerja tahunan, tetapi juga sebagai dasar penyusunan kebijakan, penguatan tata kelola, serta penyempurnaan layanan secara berkelanjutan.

Tindak lanjut pemanfaatan laporan kinerja IIPP, IPAK, menjadi pondasi dalam memperkuat sistem pelayanan publik yang berintegritas, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. UPT Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang berkomitmen untuk terus memanfaatkan hasil laporan kinerja sebagai alat evaluasi utama dalam mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan, serta mampu memenuhi harapan pengguna layanan secara berkelanjutan.

## VI. Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya

Berdasarkan hasil analisis capaian indeks dan evaluasi pelaksanaan survei pada tahun berjalan, terdapat sejumlah rekomendasi perbaikan yang dapat dijadikan prioritas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang pada tahun berikutnya. Rekomendasi ini disusun untuk memperkuat integritas, meningkatkan kepuasan masyarakat, memperbaiki persepsi anti korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh.

Rekomendasi perbaikan ini diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan program kerja dan prioritas peningkatan kualitas pelayanan pada tahun berikutnya. Dengan pelaksanaan rekomendasi secara konsisten dan terarah, UPT Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang mampu memperkuat integritas, meningkatkan kepuasan masyarakat, serta menciptakan pelayanan publik yang semakin modern, transparan, dan berdaya saing tinggi.

## VII. Efisiensi

Efisiensi juga terlihat dari pemanfaatan SDM secara optimal. Petugas pelayanan dan tim pengumpulan data tidak memerlukan tambahan tenaga khusus karena sistem survei yang berbasis digital sudah otomatis mengelompokkan dan mengolah data. Dengan demikian, SDM dapat difokuskan pada peningkatan kualitas interaksi pelayanan dan penyelesaian aduan masyarakat, yang secara langsung berdampak pada peningkatan nilai IKM, IPAK, dan IPKP.

## VIII. Implementasi Budaya BerAKHLAK

UPT Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang mengimplementasikan nilai-nilai BerAKHLAK secara konsisten sebagai fondasi peningkatan kualitas layanan publik. Nilai Berorientasi Pelayanan diwujudkan melalui penyederhanaan prosedur dan peningkatan responsivitas, yang berdampak pada naiknya Nilai Akuntabel dan Harmonis diterapkan dalam transparansi layanan serta komunikasi aktif dengan pengguna, sehingga memperkuat Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP).

Nilai Kompeten dan Loyal diperkuat melalui peningkatan kapasitas SDM serta komitmen menjaga kualitas layanan yang konsisten setiap tahun, yang berkontribusi pada capaian indikator kinerja hingga 100%. Sementara itu, nilai Adaptif mendukung inovasi digital dan perbaikan berkelanjutan, serta nilai Kolaboratif mendorong sinergi dengan para pemangku kepentingan, yang mampu meningkatkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Implementasi komprehensif nilai BerAKHLAK ini menjadi pilar utama dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan publik.



Gambar 3.26 Dokumentasi Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat

### 13. Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)

| Kinerja                                             | Indikator Kinerja                                             | Target | Capaian | Persentase |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| Pelayanan Frekuensi untuk Indonesia Maju Terkoneksi | Tindak Lanjut Verifikasi Data Koordinat Site ISR (Prima Aksi) | 100%   | 100%    | 100%       |

**Tabel 3.56 Persentase Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)**

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pelayanan Frekuensi untuk Indonesia Maju Terkoneksi melalui indikator kinerja Tindak Lanjut Verifikasi Data Koordinat Site ISR (Prima Aksi), UPT berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target kinerja sebesar 100%, capaian pelaksanaan menunjukkan angka 100%, yang berarti seluruh hasil verifikasi koordinat site ISR yang tidak sesuai telah ditindaklanjuti secara lengkap oleh pemegang ISR melalui modifikasi data atau penghentian ISR sesuai ketentuan.

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan kegiatan sebagai berikut:

#### I. Latar Belakang, Maksud, dan Tujuan

Kegiatan Tindak Lanjut Verifikasi Data Koordinat Site ISR merupakan bagian dari program Prima Aksi yang dilaksanakan untuk meningkatkan akurasi data perizinan Izin Stasiun Radio (ISR), mengingat hasil verifikasi tahun 2023–2024 menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian data koordinat, potensi interferensi akibat kesalahan lokasi, serta belum tersedianya referensi baku koordinat site. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Direktorat Layanan Infrastruktur Digital menerapkan Master Data Referensi Site (MDRS) sebagai acuan koordinat yang lebih konsisten dan terstandar.

Pelaksanaan Prima Aksi 2025 dimaksudkan untuk memastikan seluruh temuan ketidaksesuaian koordinat dapat ditindaklanjuti oleh pemegang ISR melalui modifikasi data atau penghentian ISR, sehingga data perizinan menjadi lebih akurat.

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan efisiensi proses perizinan, menyediakan referensi koordinat yang baku, memperkuat monitoring dan evaluasi tindak lanjut, serta memastikan setiap site ISR berada pada lokasi yang benar, sah, dan terdokumentasi dengan baik guna mendukung pengelolaan spektrum frekuensi yang tertib dan efektif.

#### II. Tabulasi Data Capaian Kinerja

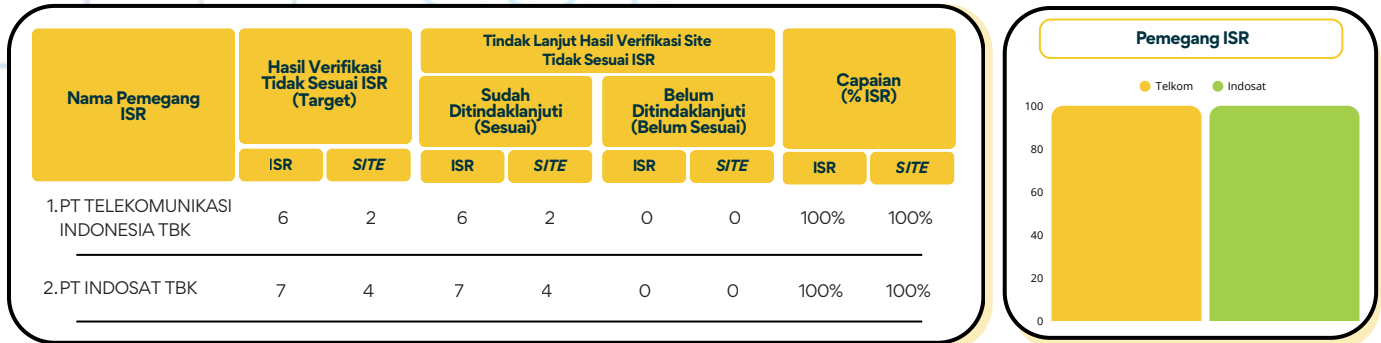
Pada Tahun 2025 Indikator Kinerja Tersedianya Tindak Lanjut Verifikasi Data Koordinat Site ISR (Prima Aksi) di Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang ditetapkan dengan target realisasi sebesar 100%. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan hingga akhir Desember 2025, realisasi indikator ini berhasil mencapai 100%.

| Sasaran Program                                     | Indikator Kinerja Sasaran Program                             | 2023   |           | 2024   |           | 2025   |           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                                                     |                                                               | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Pelayanan Frekuensi untuk Indonesia Maju Terkoneksi | Tindak Lanjut Verifikasi Data Koordinat Site ISR (Prima Aksi) | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      | 100%   | 100%      |

**Tabel 3.57 Persentase Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik**

Berdasarkan data selama periode 2025 Capaian penuh ini menunjukkan bahwa proses verifikasi, monitoring, dan koordinasi berjalan efektif, serta implementasi MDRS dan mekanisme *fast-track* mampu mendukung percepatan penyelesaian tindak lanjut. Dengan demikian, kinerja Prima Aksi tahun berjalan dinyatakan tercapai 100% dan memenuhi seluruh indikator yang ditargetkan.

Pelaksanaan Kegiatan Tindak Lanjut Verifikasi Data Koordinat Site ISR (Prima Aksi) sebagai berikut :



**Tabel 3.58 Pelaksanaan Kegiatan Tindak Lanjut Verifikasi Data Koordinat Site ISR (Prima Aksi)**

Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring tindak lanjut verifikasi data koordinat *site* ISR pada Tahun 2025, UPT telah menetapkan target terhadap seluruh *site* ISR yang teridentifikasi tidak sesuai hasil verifikasi sebelumnya. Kegiatan tindak lanjut dilaksanakan oleh pemegang ISR melalui proses modifikasi data koordinat maupun penyesuaian MDRS sesuai ketentuan.

Adapun rincian capaian tindak lanjut per pemegang ISR adalah sebagai berikut:

#### a) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Jumlah ISR yang tidak sesuai terdapat sebanyak 6 ISR dengan 2 *site*, dan seluruh temuan tersebut telah ditindaklanjuti sepenuhnya oleh pemegang ISR melalui proses penyesuaian data koordinat sehingga seluruh 6 ISR dan 2 *site* dinyatakan valid sesuai ketentuan. Tidak terdapat *site* yang belum ditindaklanjuti, sehingga capaian tindak lanjut verifikasi pada periode ini mencapai 100%.

#### b) PT Indosat Tbk

Jumlah ISR yang tidak sesuai sebanyak 7 ISR dengan 4 *site*, dan seluruh temuan tersebut telah ditindaklanjuti secara penuh melalui modifikasi koordinat maupun penyesuaian MDRS, sehingga seluruh 7 ISR dan 4 *site* telah dinyatakan sesuai. Tidak terdapat *site* yang belum ditindaklanjuti, sehingga capaian tindak lanjut verifikasi mencapai 100%.

Secara keseluruhan, UPT telah berhasil mencapai 100% tindak lanjut terhadap seluruh target hasil verifikasi data koordinat *site* ISR yang tidak sesuai untuk dua pemegang ISR tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa proses komunikasi, verifikasi, dan monitoring yang dilakukan telah berjalan secara efektif sehingga seluruh temuan dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian ini juga menjadi indikator bahwa implementasi MDRS serta mekanisme *fast-track* perizinan telah memberikan dampak positif dalam mempercepat penyelesaian tindak lanjut oleh pemegang ISR. Dengan demikian, UPT berhasil memenuhi target kinerja dalam kegiatan Prima Aksi Tahun 2025 secara optimal.

### III. Analisa yang Terkait Indikator Kinerja Secara Umum dan Holistik

Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) di Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang tercermin dari ketepatan dan kecepatan dalam memverifikasi serta menindaklanjuti ketidaksesuaian data *site* ISR dengan kondisi aktual di lapangan. Kegiatan ini mendukung tertib administrasi dan kepatuhan teknis penggunaan frekuensi radio.

Secara holistik dan *benchmarking*, kinerja dinilai dari dampaknya terhadap peningkatan akurasi data ISR, penurunan ketidaksesuaian *site*, serta efektivitas koordinasi dengan pemegang izin. Dibandingkan dengan praktik terbaik unit kerja sejenis, kegiatan Prima Aksi di Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang berkontribusi signifikan dalam penguatan tata kelola spektrum frekuensi radio yang akuntabel dan berorientasi pada kepatuhan.

### IV. Faktor Kendala/Hambatan pada Pencapaian Target

Pelaksanaan Tindak Lanjut Verifikasi Data Koordinat *Site* ISR menghadapi beberapa kendala seperti ketidaksesuaian koordinat antara data ISR dan kondisi lapangan, akurasi GPS yang bervariasi, serta respons pemegang ISR yang tidak selalu cepat dalam melakukan penyesuaian data. Meskipun demikian, seluruh *site* yang tidak sesuai berhasil ditindaklanjuti sepenuhnya sehingga capaian kegiatan mencapai 100% sesuai target. Upaya perbaikan dilakukan melalui optimalisasi penggunaan MDRS sebagai referensi koordinat baku, peningkatan koordinasi dengan pemegang ISR, pemanfaatan verifikasi *on-site* dan *on-desk*, percepatan proses modifikasi melalui layanan *fast-track*, serta pemanfaatan *tools plus code* untuk memastikan konsistensi dan akurasi data koordinat.

## V. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Tindak lanjut kegiatan dilakukan melalui evaluasi hasil verifikasi koordinat site ISR yang tidak sesuai, penetapan target tindak lanjut, serta koordinasi dengan pemegang ISR untuk melakukan modifikasi data koordinat atau penghentian ISR sesuai ketentuan. UPT melakukan monitoring progres secara berkala dan memastikan seluruh temuan diperbaiki melalui penerapan MDRS atau pembaruan data pada sistem, sehingga seluruh ketidaksesuaian dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

## VI. Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya

Rekomendasi perbaikan pada tahun selanjutnya meliputi peningkatan akurasi dan konsistensi data melalui optimalisasi penggunaan MDRS, penguatan koordinasi dengan pemegang ISR agar proses tindak lanjut lebih cepat, peningkatan kapasitas petugas dalam penggunaan tools koordinat seperti pluscode, serta pengembangan sistem monitoring yang lebih terintegrasi untuk mempercepat validasi dan memastikan tindak lanjut dapat dilakukan secara *real-time*.

## VII. Efisiensi

Kegiatan Tindak Lanjut Verifikasi Data Koordinat Site ISR memberikan efisiensi melalui pemanfaatan MDRS yang menyederhanakan proses validasi koordinat, penggunaan metode verifikasi on-desk untuk menghemat waktu dan biaya operasional, serta percepatan proses modifikasi ISR melalui layanan *fast-track*. Efisiensi ini turut mengurangi penolakan permohonan ISR dan mempercepat penyelesaian tindak lanjut oleh pemegang ISR.

## VIII. Implementasi Budaya BerAKHLAK

Implementasi budaya nilai **BerAKHLAK** tercermin dalam pelayanan yang responsif dan akurat kepada pemegang ISR (Berorientasi Pelayanan), pelaksanaan verifikasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan (Akuntabel), peningkatan kemampuan petugas dalam penggunaan MDRS dan tools koordinat (Kompeten), serta koordinasi harmonis dengan berbagai pihak (Harmonis). Selain itu, kegiatan dilakukan dengan mendukung kebijakan organisasi (Loyal), cepat beradaptasi dengan sistem dan teknologi baru seperti MDRS dan pluscode (Adaptif), serta menjalin kerja sama efektif antara UPT dan Direktorat Layanan Infrastruktur Digital (Kolaboratif).

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa capaian untuk indikator **“Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Data Koordinat Site ISR”** telah berjalan efektif dan mencapai seluruh target yang ditetapkan, ditandai dengan terselesaikannya seluruh temuan ketidaksesuaian koordinat melalui modifikasi data atau penyesuaian MDRS oleh pemegang ISR. Pelaksanaan verifikasi, monitoring, dan koordinasi yang baik mampu meningkatkan akurasi data ISR serta mendukung tertib penggunaan spektrum frekuensi. Dengan capaian **100%**, kegiatan ini berhasil memastikan bahwa data koordinat site ISR valid, akurat, dan siap digunakan sebagai dasar perizinan serta pengawasan di tahun selanjutnya.



Gambar 3.27 Dokumentasi Kegiatan Tindak Lanjut Verifikasi Data Koordinat Site ISR

### 3.2 Sasaran Kinerja II

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien

#### IK.2. I Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai Monitor Kelas I Tangerang Tahun 2025

Pada pembahasan sasaran kinerja berikutnya adalah Capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital Tahun 2025 sebagai berikut :

| Kinerja                                                                                 | Indikator Kinerja                                              | Target | Capaian | Persentase |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien | Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital Tahun 2025 | 86,95% | 84,41%  | 97%        |

**Tabel 3.59 Persentase (%) Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai Monitor Kelas I Tangerang Tahun 2025**

#### I. Latar Belakang, Maksud, dan Tujuan

Sasaran kinerja yang menjadi target perjanjian kinerja Tahun 2025 adalah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien indikatornya adalah Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang Tahun 2025 Presentasi yang ditargetkan tahun 2025 adalah sebesar 86,95%.

Pelaksanaan anggaran merupakan salah satu instrumen utama dalam mencapai tujuan program dan kegiatan pemerintah. Setiap satuan kerja wajib memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat direalisasikan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk mengukur tingkat keberhasilan tersebut, digunakan nilai kinerja anggaran, yang mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Penilaian kinerja anggaran menjadi penting karena menjamin kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, sehingga kegiatan yang direncanakan dapat berjalan sesuai target. Mendorong efisiensi penggunaan sumber daya, dengan memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat optimal. Memberikan dasar evaluasi bagi pimpinan untuk mengambil keputusan perbaikan di periode berikutnya. Meningkatkan akuntabilitas publik, sesuai prinsip *good governance*.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menekankan penguatan manajemen kinerja melalui integrasi perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu, pencapaian nilai kinerja anggaran tidak hanya dipandang sebagai angka penilaian, tetapi sebagai gambaran kemampuan unit kerja dalam mengelola anggaran secara profesional, transparan, dan berorientasi hasil (*outcome*).

Penerima manfaat dari pencapaian indikator ini ujung nya adalah Masyarakat pengguna layanan yang merasakan peningkatan kualitas layanan kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang.



## II. Tabulasi Data Capaian Kinerja

Pada tahun 2025, target capaian Perjanjian Kinerja (PK) untuk Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien dengan indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang Tahun 2025 yaitu 86,95%.

| Kinerja                                                                                 | Indikator Kinerja                                                         | 2025   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|                                                                                         |                                                                           | Target | Capaian |
| Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien | Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang Tahun 2025 | 86,95% | 84,41%  |

**Tabel 3.60 Persentase Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang Tahun 2025**

Capaian target tersebut diperoleh dari nilai Kinerja Anggaran SMART DJA dengan membandingkan perolehan capaian DIPA Satker Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan DIPA Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Capaian yang diperoleh tahun 2025 ini tidak mencapai target yang telah ditentukan, hal tersebut terjadi karena adanya restrukturisasi pada Kementerian Komdigi, ditemukan bahwa DJID tidak memiliki kesempatan memperoleh nilai efisiensi maksimal 25% pada NKA [www.monev.kemenkeu.go.id](http://www.monev.kemenkeu.go.id) dikarenakan DJID tidak dapat melakukan tagging SBKK/SBKU karena isu restrukturisasi. Sebagai informasi lebih rinci, dapat kami jelaskan bahwa SBKK yang dilaksanakan DJID pada tahun 2025, masih ter-tagging pada SOTK Ditjen SDPPI (kode unit kerja: 059.03) sesuai dengan PMK SBK No.92 tahun 2024. Adapun DJID merupakan hasil restrukturisasi dari Ditjen SDPPI dan tetap melanjutkan pelaksanaan kegiatan SBK yang sebelumnya telah dijalankan Ditjen SDPPI. Berdasarkan hasil koordinasi dengan DJA melalui surat Sekjen Komdigi No. B-2786/SJ.3/KU.01.16/09/2025 bulan September 2025, perihal Permohonan Penyesuaian Nilai pada Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital TA 2025, Tim DSP DJA tidak dapat menerbitkan/merevisi PMK SBK pada tahun yang sama (2025), akibatnya SBK Ditjen SDPPI tidak dapat diakui sebagai SBKK DJID (kode unit kerja: 059.09).

Berikut formula Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang Tahun 2025 :

- $NK \text{ Perencanaan DIPA Baru} + NK \text{ pelaksanaan (Rata-rata Baru + Lama)} = 37.5 + (44.89 + 48.94) / 2 = 84.41$

Berikut dilampirkan hasil capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang selama 5 tahun terakhir :

| Sasaran Program                                                                         | Indikator Kinerja Sasaran Program                                         | 2022   |           | 2023   |           | 2024   |           | 2025   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                                                                                         |                                                                           | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien | Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang Tahun 2025 | 87     | 89,71     | 87     | 88,07     | 88     | 92        | 86,95  | 84.41     |

**Tabel 3.61 Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang**

Data capaian nilai kinerja anggaran menunjukkan tingkat efektivitas satuan kerja dalam melaksanakan perencanaan dan pengelolaan anggaran selama periode pelaporan. Secara umum, capaian kinerja anggaran menggambarkan keselarasan antara perencanaan, penyerapan, efisiensi, serta kualitas pelaporan anggaran dibuktikan dengan tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran dari tahun ke tahun. Namun pada tahun pelaporan tidak tercapai dikarenakan adanya restrukturisasi Kementerian yang menyebabkan nilai efisiensi tidak maksimal, seperti yang sudah dijelaskan pada uraian diatas.

## III. Analisa yang Terkait Indikator Kinerja Secara Umum dan Holistik

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan ukuran komprehensif yang menunjukkan tingkat kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran tahun 2025.

Perolehan Nilai Kinerja Anggaran tidak lepas dari Upaya atau strategi pencapaian target dengan memperhatikan hal yang menjadi faktor penting diantaranya

- Meningkatkan akurasi perencanaan melalui review mendalam atas kebutuhan riil kegiatan.
- Mengoptimalkan manajemen waktu pelaksanaan kegiatan
- Memperkuat pengendalian internal, termasuk monitoring realisasi dan evaluasi bulanan.
- Memperbaiki dokumentasi capaian output/outcome untuk meningkatkan nilai efektivitas. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan anggaran dan penggunaan aplikasi monitoring.
- Memastikan ketertiban administrasi untuk menghindari deviasi dan potensi temuan audit.

Upaya-upaya dimaksud telah kami laksanakan, namun nilai kinerja anggaran tetap tidak tercapai di tahun 2025.

Sebagai perbandingan dengan dengan satker lain, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang membandingkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dengan Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta yaitu sebagai berikut :

| UPT              | Target | Capaian |
|------------------|--------|---------|
| Balmon Tangerang | 86,95  | 84.41   |
| Balmon Jakarta   | 86,95  | 84.37   |

**Tabel 3.62 Benchmarking Capaian Kinerja Balmon Tangerang dengan Balmon Jakarta**

Dari data di samping dapat dilihat bahwa, target dari Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang dan Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta mempunyai target nilai yang sama yang telah ditentukan namun terdapat perbedaan capaian, Berdasarkan hasil *benchmarking* Nilai Kinerja Anggaran (NKA) antara Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang dan Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta, meskipun capaian Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang sedikit lebih tinggi, perbedaan nilai yang relatif kecil menunjukkan bahwa keduanya memiliki tingkat kinerja anggaran yang hampir setara.

Oleh karena itu, direkomendasikan agar Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang tetap mempertahankan kinerja pengelolaan anggaran yang telah berjalan dengan baik, sekaligus melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap aspek perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu, praktik baik (best practices) dalam pengendalian dan realisasi anggaran dari Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta dapat dipelajari dan diadaptasi guna meningkatkan capaian NKA agar lebih optimal dan mendekati target yang telah ditetapkan.

#### IV. Faktor Kendala/Hambatan pada Pencapaian Target

Adanya perubahan Nomenklatur Kominfo menjadi Komdigi menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan anggaran. Pergantian ini menandai perluasan mandat tidak hanya komunikasi dan informatika, tetapi juga transformasi digital nasional. Tahun 2025, struktur organisasi Komdigi diatur melalui Permen Komdigi No. 1 Tahun 2025.

Nama "Kamdigi" mencerminkan fokus pada digitalisasi, bukan sekadar informatika namun juga merupakan bentuk transformasi pelayanan publik dengan berupaya mempercepat digitalisasi birokrasi, ekonomi, dan masyarakat.

Selain kendala diatas juga adanya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, menyebabkan terjadi nya pergeseran anggaran pada DIPA Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang.

Akibatnya hal tersebut diatas sempat terjadi ketidakpastian target NKA, terjadi penumpukan realisasi belanja di akhir tahun.

Salah satu dari beberapa upaya solusi untuk mencapai target capaian PK tersebut dilakukan beberapa hal tersebut dibawah ini, diantaranya : Penyesuaian Dokumen Perencanaan dengan melakukan revisi anggaran sesuai dengan nama Kementerian yang baru agar selaras dengan nomenklatur baru serta memastikan indikator kinerja tetap konsisten meskipun terjadi perubahan nama lembaga.

- Sinkronisasi Sistem Anggaran dilakukan dengan Update kode satker, program, dan kegiatan dalam aplikasi seperti Sakernas, SAKTI, dan OM-SPAN agar tidak terjadi mismatch
- Melakukan sosialisasi internal agar seluruh unit memahami perubahan nomenklatur. Memangkas belanja yang bersifat administratif atau seremonial, alihkan ke program prioritas.
- Penguatan Monitoring & Evaluasi pada IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) sebagai alat ukur utama.
- Melakukan evaluasi berkala untuk memastikan efisiensi tidak mengurangi kualitas layanan publik. Memanfaatkan dashboard/ aplikasi kinerja digital agar transparansi dan akuntabilitas meningkat.

Selain Solusi diatas juga diperlukan kolaborasi dan Benchmarking dengan UPT lain sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan. Dari sisi pelayanan, terapkan praktik terbaik dalam efisiensi, misalnya digitalisasi layanan, integrasi sistem, dan pemangkas birokrasi.

## V. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

### a) Analisis Hasil Evaluasi

Sebagai bahan perbandingan di laporan kinerja tahun sebelumnya bahwa Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang tidak mencapai yang ditargetkan, hal tersebut dikarenakan adanya restrukturisasi Kementerian yang menyebabkan nilai efisiensi tidak maksimal. Dengan adanya permasalahan tersebut diharapkan tidak mempengaruhi upaya capaian NKA di tahun berikutnya.

### b) Pemanfaatan untuk perbaikan indikator

Sebagai upaya mencapai target PK Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang juga telah memaksimalkan rekomendasi dengan meningkatkan kualitas SDM Pengelolaan Anggaran dan Pemanfaatan Teknologi.

### c) Integrasi ke perencanaan berikutnya

Mempertahankan apa yang sudah menjadi faktor keberhasilan dalam mencapai target nilai kinerja anggaran diantaranya mempertahankan pola kerja yang efektif dan efisien, senantiasa melaksanakan arahan pimpinan;

### d) Monitoring Keberlanjutan

Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan Menyusun laporan kinerja berikutnya dengan tepat waktu.

## VI. Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya

- Peningkatan kualitas perencanaan anggaran dengan Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL) lebih realistis sesuai kapasitas pelaksanaan dan Mengurangi revisi anggaran yang berulang.
- Percepatan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar tidak menumpuk di akhir tahun dan mendorong satker untuk melakukan early procurement sehingga kegiatan bisa berjalan sejak awal tahun.
- Penguatan monitoring dan evaluasi membuat sistem *dashboard* kinerja anggaran untuk memantau serapan secara berkala dan Melakukan evaluasi triwulanan agar masalah dapat segera diatasi sebelum akhir tahun.

Peningkatan kapasitas SDM Pelatihan teknis pengelolaan anggaran Penguatan pemahaman terkait regulasi capaian kinerja anggaran.

## VII. Efisiensi

Efisiensi yang berhasil dilakukan UPT Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang Tahun 2025 mencakup:

- Perencanaan anggaran lebih tepat sasaran
- Penyerapan dana proporsional
- Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
- Optimalisasi SDM dan teknologi digital

Semua ini berkontribusi pada peningkatan Nilai Kinerja Anggaran (IKPA), yang menjadi indikator utama keberhasilan pengelolaan anggaran di satuan kerja.

## VIII. Implementasi Budaya BerAKHLAK

### a) Berorientasi Pelayanan

Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang berkomitmen memberikan pelayanan yang prima dengan mengutamakan kecepatan, ketepatan, dan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran. Untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif, setiap kegiatan diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

### b) Akuntabel

Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang menegakkan akuntabilitas melalui pencatatan dan pelaporan keuangan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses pelaporan dilakukan secara berjenjang dan disertai bukti pendukung yang lengkap untuk memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran. Selain itu, evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### c) Kompeten

Kompeten Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang terus mendorong pengembangan keahlian pegawai melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang relevan. Pegawai didorong untuk mengikuti pelatihan di bidang keuangan, administrasi, dan teknologi guna mendukung efektivitas pelaksanaan anggaran. Melalui pendekatan ini, diharapkan pegawai mampu mengaplikasikan keterampilan baru yang dapat meningkatkan kinerja organisasi.

**d) Harmonis**

Membangun komunikasi yang terbuka antar pegawai menjadi langkah utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Diskusi rutin, kegiatan kebersamaan, serta pendekatan kerja tim diterapkan untuk memperkuat solidaritas dan rasa kekeluargaan di lingkungan kerja. Dengan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan positif, diharapkan setiap individu mampu bekerja dengan lebih baik dan berkontribusi maksimal.

**e) Loyal**

Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang menanamkan nilai loyalitas dengan menekankan pentingnya komitmen terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi. Pegawai diarahkan untuk selalu mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, sehingga keputusan yang diambil selalu berorientasi pada kemajuan unit kerja.

**f) Adaptif**

Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang berupaya menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan, baik terkait kebijakan anggaran, perkembangan teknologi, maupun metode kerja terkini. Inovasi terus didorong agar proses pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program tetap relevan dan efektif dalam situasi yang penuh tantangan.

**g) Kolaboratif**

Setiap kegiatan di Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang dilaksanakan dengan semangat kerja sama yang kuat. Kolaborasi dilakukan tidak hanya di lingkungan internal tetapi juga dengan mitra kerja. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan dengan lancar, terintegrasi, dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

### IK.2. II Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Pada pembahasan sasaran kinerja berikutnya adalah Capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital Tahun 2025 sebagai berikut :

| Kinerja                                                              | Indikator Kinerja                                                                | Target | Capaian | Persentase |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Efektif Dan Efisien | Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) | 97%    | 100%    | 100%       |

**Tabel 3.63 Persentase (%) Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)**

## I. Latar Belakang, Maksud, dan Tujuan

Pemerintah diwajibkan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran. Menurut standar akuntansi, laporan keuangan harus memenuhi unsur relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Faktor penentu kualitas pelaporan keuangan Adalah Kompetensi SDM, sistem akuntansi yang memadai, serta kedisiplinan pencatatan transaksi menjadi faktor utama.

Maksud dari indikator kinerja ini Adalah Sebagai indikator mutu laporan keuangan satker, Nilai kualitas digunakan untuk menilai apakah laporan UAKPA sudah sesuai standar. Pelaporan keuangan juga dimaksudkan sebagai Alat monitoring yang menjadi sarana pengawasan internal Ditjen Perbendaharaan terhadap kepatuhan satker dalam menyusun laporan. Nilai ini menjadi salah satu ukuran kinerja satker dalam pengelolaan anggaran.

Tujuan dari indikator ini Adalah untuk Meningkatkan akurasi dan keandalan laporan keuangan agar dapat dijadikan dasar pengambilan Keputusan, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan regulasi Kementerian Keuangan, Mendukung opini audit BPK atas laporan keuangan kementerian/lembaga, mengurangi kesalahan dan ketidaksesuaian data melalui rekonsiliasi rutin antara UAKPA dan KPPN.

Sasaran kinerja yang menjadi target perjanjian kinerja Tahun 2025 adalah Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang ditargetkan tahun 2025 adalah sebesar 100%.

## II. Tabulasi Data Capaian Kinerja

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang telah mencapai target sesuai yang di targetkan pada Perjanjian Kinerja Tahun anggaran 2025 yaitu sebesar 100% dengan memenuhi dokumen-dokumen yang menjadi data dukung untuk memenuhi unsur-unsur penilaian yang dilakukan oleh Biro Keuangan Kemenkomdigi.

Berikut tabel capaian indikator kinerja Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Tahun Anggaran 2025.

| Kinerja                                                     | Indikator Kinerja                                                                | 2025   |         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|                                                             |                                                                                  | Target | Capaian |
| Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien | Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) | 97%    | 100%    |

**Tabel 3.64 Persentase Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang Tahun 2025**

Capaian target PK tersebut diperoleh dari nilai perhitungan manual Perjanjian Kinerja pelaporan Keuangan yang disampaikan oleh Biro Keuangan dan SDM Kementerian Komdigi.

## III. Analisis Capaian yang Berkesinambungan

Sebagai bahan analisis capaian yang berkesinambungan untuk tahun sebelumnya, tahun berjalan dan rencana tahun depan dan sebagai bahan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini/tahun berjalan. Berikut dilampirkan hasil capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang selama 5 tahun terakhir :

| Sasaran Program                                             | Indikator Kinerja Sasaran Program                                                | 2022   |           | 2023   |           | 2024   |           | 2025   |           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                                                             |                                                                                  | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien | Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) | -      | -         | 80     | 80        | 88     | 88        | 97     | 100       |

**Tabel 3.67 Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang**

Pada tahun 2022 indikator kinerja Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) belum tersedia, indikator ini baru menjadi target kinerja di tahun 2023. Indikator kualitas pelaporan keuangan UAKPA menekankan pada ketepatan waktu, kelengkapan, akurasi, kepatuhan terhadap SAP, rekonsiliasi, dan tindak lanjut audit. Capaian kinerja Pada tahun 2023 - 2024 Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang telah memenuhi target yaitu 88%, begitu pula dengan tahun 2025 dari target 97% telah tercapai 100%.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut tidak lepas dari peran penting pengelola keuangan yang kompeten di bidangnya, koordinasi dan arahan pimpinan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Untuk itu kami Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang berkomitmen untuk terus menciptakan budaya kerja yang baik dengan menerapkan prinsip2 pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal yang diterapkan untuk capaian kinerja tahun selanjutnya adalah dengan :

- Meningkatkan konsistensi ketepatan waktu, akurasi data.
- Memperhatikan Nilai IKPA, nilai IKPA yang masih sedikit di bawah target, menandakan perlunya penguatan koordinasi pelaksanaan anggaran.
- Patuh terhadap regulasi Kualitas pelaporan keuangan Rekomendasi Tindak Lanjut
- Melakukan Monitoring triwulanan untuk menjaga konsistensi capaian.
- Pelatihan teknis berkelanjutan untuk meningkatkan akurasi dan kepatuhan.
- Optimalisasi aplikasi keuangan (SAKTI/OMSPAN) agar input data lebih cepat dan minim error.
- Penguatan koordinasi antar unit agar realisasi anggaran lebih sesuai target.

#### IV. Analisa yang Terkait Indikator Kinerja Secara Umum dan Holistik

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) merupakan dimensi Kepatuhan Regulasi yang wajib disusun sesuai PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah (SAP) menjadi indikator utama kualitas pelaporan. Rekonsiliasi eksternal dan internal yang harus dilakukan sesuai jadwal, memastikan konsistensi data antar bagian; Indikator Kinerja Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA bukan hanya soal nilai skor, tetapi mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengelola keuangan negara secara efisien, efektif, dan akuntabel. Analisa holistik menunjukkan bahwa keberhasilan indikator ini bergantung pada sinergi antara proses, sistem, SDM, dan budaya akuntabilitas.

- Benchmarking

Berdasarkan hasil benchmarking Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), seluruh UPT memperoleh nilai maksimal sebesar 100. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan antar UPT telah seragam dan berada pada tingkat yang sangat baik. Keseragaman capaian tersebut mencerminkan kepatuhan terhadap standar akuntansi, ketepatan waktu penyampaian laporan, serta efektivitas sistem pengendalian internal yang telah berjalan dengan baik.

Sebagai rekomendasi, capaian ini perlu dipertahankan melalui konsistensi penerapan standar pelaporan keuangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi, serta penguatan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Selain itu, UPT diharapkan dapat menjadikan capaian kualitas pelaporan keuangan ini sebagai fondasi untuk mendorong peningkatan kinerja anggaran dan kinerja organisasi secara keseluruhan.

#### V. Faktor Kendala/Hambatan pada Pencapaian Target

Faktor Kendala/Hambatan Utama dalam mencapai target nilai pelaporan diantaranya Perencanaan Anggaran yang tidak realistis atau kurang detail menyebabkan deviasi antara rencana dan realisasi. Perubahan kebijakan pemerintah (misalnya efisiensi belanja APBN) menuntut penyesuaian cepat yang sering tidak diantisipasi. Keterlambatan proses pengadaan barang/jasa. Realisasi belanja tidak sesuai jadwal, sehingga mempengaruhi indikator ketepatan waktu. Adanya revisi DIPA yang berulang, menimbulkan ketidakstabilan pelaksanaan. Kesalahan pencatatan transaksi keuangan. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan ke KPPN. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi terbaru mengenai pelaporan. Sumber Daya Manusia (SDM) Kompetensi aparatur UAKPA yang belum merata, terutama dalam penggunaan aplikasi keuangan. Rotasi pegawai yang tinggi menyebabkan hilangnya kontinuitas pengetahuan. Minimnya pelatihan teknis terkait IKPA dan pelaporan keuangan. Lemahnya koordinasi antara UAKPA dengan KPPN maupun unit eselon di atasnya. Kurangnya komunikasi lintas bagian (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan) sehingga data tidak sinkron. Gangguan pada aplikasi keuangan (misalnya SAKTI). Keterbatasan infrastruktur IT di daerah, menyebabkan keterlambatan input data. Integrasi sistem antar unit belum optimal.

#### VI. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Mengidentifikasi indikator yang nilainya rendah pada laporan kinerja sebelumnya. Menentukan akar masalah (misalnya keterlambatan pelaporan, ketidaksesuaian data, atau rendahnya kualitas perencanaan). Perbaiki Proses Perencanaan Menyusun rencana kerja yang lebih realistis dan terukur berdasarkan capaian tahun sebelumnya. Mengintegrasikan rekomendasi hasil evaluasi ke dalam RKA/DIPA agar lebih sesuai dengan kebutuhan unit. Penguatan SDM dan Kapasitas Melaksanakan pelatihan teknis terkait aplikasi pelaporan (misalnya SAKTI, OMSPAN). Memberikan pendampingan khusus bagi unit yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam pencatatan dan pelaporan. Peningkatan Koordinasi Memperbaiki komunikasi antar bagian (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan) agar data lebih sinkron. Menjalin koordinasi intensif dengan KPPN untuk memastikan ketepatan waktu dan akurasi pelaporan.

Monitoring dan Evaluasi Berkala Membuat sistem monitoring internal yang lebih ketat, misalnya dashboard capaian indikator. Melakukan evaluasi triwulanan agar perbaikan bisa segera dilakukan sebelum akhir tahun. Pemanfaatan Teknologi Informasi Mengoptimalkan penggunaan aplikasi keuangan agar input data lebih cepat dan akurat. Memanfaatkan hasil audit sistem sebelumnya untuk memperbaiki kelemahan teknis.

Dampak Positif dari Pemanfaatan Laporan Kinerja Kualitas pelaporan meningkat → nilai IKPA lebih baik. Efisiensi anggaran → perencanaan lebih tepat sasaran. Akuntabilitas terjaga → meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap pengelolaan keuangan. Pembelajaran berkelanjutan → laporan kinerja tidak hanya jadi formalitas, tetapi benar-benar menjadi alat perbaikan.

Pada tahun 2025 capaian target PK ini baru diberlakukan yaitu Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), untuk itu Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang akan terus meningkatkan kinerja nya di tahun mendatang sesuai dengan target kinerja yang telah ditentukan.

## VII. Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) juga merupakan bagian dari pentingnya pengelolaan anggaran yang menjadi tanggung jawab Satker. Dengan pemenuhan aspek-aspek utama yang menjadi faktor tercapainya target kinerja ini maka semakin tinggi pula kepercayaan Masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

Adapun beberapa rekomendasi perbaikan Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) harus memperhatikan aspek-aspek diantaranya antara lain :

- Efisiensi Proses yang berfokus pada ketepatan waktu yang berdampak pada kemampuan organisasi dalam mengelola data dan sistem secara efektif;
- Efektivitas Informasi yang berfokus pada akurasi kelengkapan kepatuhan SAP yang berdampak pada penjaminan laporan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan Keputusan yang valid;
- Akuntabilitas & Transparansi yang berfokus pada Tindak lanjut audit, integritas dan berdampak Meningkatkan kepercayaan publik dan opini audit yang lebih baik

Indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA bukan hanya soal angka penilaian, tetapi mencerminkan kesehatan tata kelola keuangan Organisasi. Analisa holistik menunjukkan bahwa kualitas laporan dipengaruhi oleh proses, sistem, SDM, dan budaya akuntabilitas.

## VII. Efisiensi

Efisiensi dalam indikator kinerja Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA berarti menghasilkan laporan yang tepat waktu, akurat, lengkap, dan sesuai regulasi dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Dengan efisiensi yang baik, UAKPA tidak hanya meningkatkan nilai kualitas laporan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

## VIII. Implementasi Budaya BerAKHLAK

Dalam proses pencapaian target Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang telah mengimplementasikan budaya nilai BerAKHLAK sebagaimana berikut ini :

- **Berorientasi** pelayanan terhadap dukungan pemenuhan pelaksanaan kegiatan tupoksi pada Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang;
- **Akuntabel** dalam pelaporan Anggaran dan kegiatan yang diimplementasikan dengan penyusunan laporan keuangan dan BMN setiap periode semester dan tahunan;
- **Kompeten**, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten yang dapat diandalkan dalam menjalankan tugas;
- **Harmonis**, pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar dalam menjalankan tugas;
- **Loyal**, tim kerja dalam upaya mencapai target kinerja adalah tim kerja yang selalu memperhatikan aturan yang berlaku dan patuh terhadap aturan yang berlaku;
- **Adaptif**, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja dapat menyesuaikan diri dengan peraturan dan kebijakan pimpinan juga dapat dengan cepat beradaptasi dengan aplikasi pendukung dalam menjalankan tugas.
- **Kolaboratif**, Tim kerja dapat bekerja sama dengan baik untuk melaksanakan tugas sehari hari.

### 3.3 Akuntabilitas Keuangan

#### a) Realisasi Anggaran 2025

Pengelolaan Anggaran pada tahun 2025 di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang dilaksanakan melalui dua satuan kerja, yakni satuan kerja lama dengan kode 654251 dan satuan kerja baru dengan kode 694726. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari adanya restrukturisasi organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID), yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dan meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan secara berkelanjutan.

#### b) Realisasi Anggaran Satker Lama (654251)

Satker 654251 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 5.425.019.000,-. Hingga akhir Tahun Anggaran 2025, realisasi anggaran mencapai Rp 5.424.536.181,- atau sebesar 99,99%. Adapun sisa anggaran sebesar Rp 482.819,- terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 114.953,- dan belanja barang sebesar Rp 367.866,-

Komponen Realisasi anggaran Satker 654251 terdiri atas:

- Belanja Pegawai sebesar Rp1.805.851.047,- (99,99%);
- Belanja Barang sebesar Rp3.618.685.134,- (99,99%).

Realisasi anggaran yang tercapai secara optimal tersebut mencerminkan bahwa seluruh program, kegiatan, serta kewajiban pembayaran sebelum pelaksanaan restrukturisasi organisasi telah dituntaskan secara tepat waktu dan selaras dengan rencana kerja serta alokasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

| NO          | KODE   NAMA SATKER                                                | KETERANGAN | JENIS BELANJA             |                           |              |              |              |              |              |              |              |                           | TOTAL |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|-------|
|             |                                                                   |            | PEGAWAI                   | BARANG                    | MODAL        | BEBAN BUNGA  | SUBSIDI      | HIBAH        | BANSOS       | LAINLAIN     | TRANSFER     |                           |       |
| ^           | ^                                                                 | ^          | ^                         | ^                         | ^            | ^            | ^            | ^            | ^            | ^            | ^            | ^                         |       |
| 1           | 654251   BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I TANGERANG | PAGU       | 1,805,966,000             | 3,619,053,000             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 5,425,019,000             |       |
|             |                                                                   | REALISASI  | 1,805,851,047<br>(99.99%) | 3,618,685,134<br>(99.99%) | 0<br>(0.00%) | 0<br>(0.00%) | 0<br>(0.00%) | 0<br>(0.00%) | 0<br>(0.00%) | 0<br>(0.00%) | 0<br>(0.00%) | 5,424,536,181<br>(99.99%) |       |
|             |                                                                   | SISA       | 114,953                   | 367,866                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 482,819                   |       |
| GRAND TOTAL |                                                                   | PAGU       | 1,805,966,000             | 3,619,053,000             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 5,425,019,000             |       |
|             |                                                                   | REALISASI  | 1,805,851,047<br>(99.99%) | 3,618,685,134<br>(99.99%) | 0<br>(0.00%) | 0<br>(0.00%) | 0<br>(0.00%) | 0<br>(0.00%) | 0<br>(0.00%) | 0<br>(0.00%) | 0<br>(0.00%) | 5,424,536,181<br>(99.99%) |       |
|             |                                                                   | SISA       | 114,953                   | 367,866                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 482,819                   |       |

Gambar 3.28 Realisasi Belanja Satker 654251 per Jenis Belanja

#### c) Realisasi Anggaran Satker Baru (694726)

Satker 694726 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp10.375.796.000,-. Hingga akhir Tahun Anggaran 2025, realisasi anggaran mencapai Rp 8.041.119.196,- atau sebesar 77,50%. Adapun sisa anggaran sebesar Rp 2.334.676.804,- terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 48.076.765,-, belanja barang sebesar Rp 2.284.536.938,-, dan belanja modal sebesar Rp 2.063.101,-. Sebesar Rp 2.283.106.000,- sisa anggaran merupakan anggaran yang diblokir.

Komponen Realisasi anggaran Satker 694726 terdiri atas:

- Belanja Pegawai sebesar Rp2.102.470.235,- (97,76%);
- Belanja Barang sebesar Rp5.394.114.062,- (70,25%);
- Belanja Modal sebesar Rp544.534.899,- (99,62%).

| NO          | KODE   NAMA SATKER                                                | KETERANGAN | JENIS BELANJA             |                           |                         |              |              |              |              |              |              | TOTAL                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
|             |                                                                   |            | PEGAWAI                   | BARANG                    | MODAL                   | BEBAN BUNGA  | SUBSIDI      | HIBAH        | BANSOS       | LAINLAIN     | TRANSFER     |                           |
| ^           | ^                                                                 | ^          | ^                         | ^                         | ^                       | ^            | ^            | ^            | ^            | ^            | ^            | ^                         |
| 1           | 694726   BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I TANGERANG | PAGU       | 2,150,547,000             | 7,678,651,000             | 546,598,000             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 10,375,796,000            |
|             |                                                                   | REALISASI  | 2,102,470,235<br>(97.76%) | 5,394,114,062<br>(70.25%) | 544,534,899<br>(99.62%) | 0<br>(0.00%) | 0<br>(0.00%) | 0<br>(0.00%) | 0<br>(0.00%) | 0<br>(0.00%) | 0<br>(0.00%) | 8,041,119,196<br>(77.50%) |
|             |                                                                   | SISA       | 48,076,765                | 2,284,536,938             | 2,063,101               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 2,334,676,804             |
| GRAND TOTAL |                                                                   | PAGU       | 2,150,547,000             | 7,678,651,000             | 546,598,000             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 10,375,796,000            |
|             |                                                                   | REALISASI  | 2,102,470,235<br>(97.76%) | 5,394,114,062<br>(70.25%) | 544,534,899<br>(99.62%) | 0<br>(0.00%) | 0<br>(0.00%) | 0<br>(0.00%) | 0<br>(0.00%) | 0<br>(0.00%) | 0<br>(0.00%) | 8,041,119,196<br>(77.50%) |
|             |                                                                   | SISA       | 48,076,765                | 2,284,536,938             | 2,063,101               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 2,334,676,804             |

Gambar 3.29 Realisasi Belanja Satker 654251 per Jenis Belanja

Realisasi anggaran yang tercapai secara optimal tersebut mencerminkan bahwa seluruh program, kegiatan, serta kewajiban pembayaran telah dituntaskan secara tepat waktu dan selaras dengan rencana kerja serta alokasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tingkat realisasi anggaran yang tinggi mencerminkan komitmen dan tanggung jawab Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang dalam mengelola keuangan negara secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

### 3.4 Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang juga melaksanakan berbagai kegiatan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya optimalisasi pengawasan, pengendalian, serta pelayanan di bidang spektrum frekuensi radio, sekaligus mencerminkan komitmen dan dedikasi Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang dalam meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa kegiatan dimaksud antara lain sebagai berikut:

- **Predikat Pelayanan Prima Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Tahun 2025**



Gambar 3.30 Piagam Penghargaan Pelayanan Prima Balmon Tangerang

Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang berhasil meraih Predikat Pelayanan Prima Kategori A berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Tahun 2025 dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi)

- **Penghargaan *Digi Wave* 2025 sebagai Juara I Penyelesaian Piutang Paling Aktif**



Gambar 3.31 Piagam Penghargaan Juara I Penyelesaian Piutang Paling Aktif *Dgi Wave*

Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang berhasil meraih Penghargaan *Digi Wave* 2025 sebagai Juara I Penyelesaian Piutang Paling Aktif dari Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital, dalam kategori *DJID Choice Award* 2025, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang akuntabel, profesional, dan berintegritas

- **Penghargaan sebagai Satuan Kerja Peraih Predikat “Terbaik Pertama” dengan Penyerapan Anggaran Non Belanja Pegawai Tertinggi Tahun 2025**



Gambar 3.32 Piagam Penghargaan KPPN Balmon Tangerang

Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang menerima Penghargaan sebagai Satuan Kerja Peraih Predikat “Terbaik Pertama” dengan Penyerapan Anggaran Non Belanja Pegawai Tertinggi Tahun 2025 (Pagu DIPA 1 Milyar s.d 10 Milyar) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tangerang, Kementerian Keuangan

## Momentum Kegiatan dan *Event* Penting Balmon Tangerang Tahun 2025

Sepanjang Tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang berpartisipasi dalam pengamanan dan pengawasan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) pada berbagai kegiatan dan *event* di wilayah kerja. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam menjaga tertib penggunaan SFR serta memastikan perangkat telekomunikasi dapat beroperasi dengan baik guna mendukung kelancaran komunikasi.

Berikut rincian pelaksanaan pengawasan Spektrum Frekuensi Radio pada berbagai event yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2025:

- **Balmon Tangerang Turut Mendukung Kegiatan Cek Kesehatan Gratis Komdigi di SMPK Penabur Gading Serpong**

Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Dirjen Wayan Toni dan Ibu Menteri Komdigi Menteri Komdigi untuk meninjau langsung Cek Kesehatan Gratis Sekolah.

Kegiatan seperti Cek Kesehatan Gratis Komdigi membutuhkan akses internet yang stabil dan berkualitas, sebagai wujud nyata pelayanan publik berbasis digital, Balmon Tangerang turut hadir dan berperan dalam mendukung kelancaran konektivitas digital selama kegiatan berlangsung.



Gambar 3.33 Dokumentasi Kegiatan Cek Kesehatan Gratis Komdigi di SMPK Penabur Gading Serpong

- **Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang Melaksanakan Penertiban Nasional Tahap II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli s.d. 8 Agustus 2025 di seluruh Indonesia**

Ditjen Infrastruktur Digital bersama Balai Monitoring Kelas I Tangerang telah melaksanakan Penertiban Nasional Tahap II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli s.d. 8 Agustus 2025 di seluruh Indonesia.

Tibnas kali ini fokus terhadap pengguna frekuensi radio *Microwavelink* yang tidak sesuai ketentuan. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen dalam menjaga tata kelola spektrum frekuensi radio yang tertib, aman dan bebas gangguan.



Gambar 3.34 Dokumentasi Kegiatan Penertiban Nasional Tahap II

- **Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang melaksanakan kegiatan Pemusnahan Alat dan Perangkat Telekomunikasi**

Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang melaksanakan kegiatan Pemusnahan Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan pengawasan dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio. Kegiatan ini dilakukan terhadap perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan perizinan atau melanggar regulasi yang berlaku. Melalui kegiatan pemusnahan ini diharapkan dapat menjaga tertib penggunaan spektrum frekuensi radio serta mencegah potensi gangguan terhadap layanan telekomunikasi di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang.



Gambar 3.35 Dokumentasi Kegiatan Pemusnahan Alat dan Perangkat Telekomunikasi

- **Sosialisasi Perizinan Frekuensi dengan tema “Kebijakan Berfrekuensi: Tertib Frekuensi, Hindari Sanksi” di Kota Tangerang**

Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perizinan Spektrum Frekuensi Radio dengan tema “Kebijakan Berfrekuensi: Tertib Frekuensi, Hindari Sanksi” yang diselenggarakan di Kota Tangerang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio, kewajiban perizinan, serta pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan tercipta penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib, legal, dan bebas dari potensi pelanggaran yang dapat menimbulkan sanksi maupun gangguan terhadap layanan telekomunikasi.



Gambar 3.36 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Perizinan Frekuensi

- **Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang melaksanakan kegiatan Posko Nataru 2025**

Dalam rangka mendukung kelancaran perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang melaksanakan Posko Monitoring Nataru. Kegiatan ini meliputi pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio pada layanan penting seperti komunikasi darurat, keamanan, transportasi, dan komunikasi publik.

Hasil monitoring menunjukkan bahwa layanan komunikasi terpantau berjalan dengan baik tanpa gangguan yang signifikan. Selain itu, dilakukan pula pemantauan kualitas jaringan seluler di beberapa titik keramaian masyarakat, dengan hasil kualitas layanan secara umum berada pada kategori cukup hingga baik.



Gambar 3.37 Dokumentasi Kegiatan Posko Nataru 2025



## IV. PENUTUP

# PENUTUP

**L**aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan serta pengawasan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja Balai Monitor. Laporan ini juga merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang memiliki peran strategis dalam mendukung tertibnya penggunaan spektrum frekuensi radio melalui berbagai kegiatan, antara lain monitoring frekuensi radio, penertiban penggunaan frekuensi ilegal, pengukuran dan pengujian teknis perangkat pemancar, penanganan gangguan frekuensi, pengawasan perangkat telekomunikasi, serta pelayanan teknis dan koordinasi terkait penggunaan frekuensi radio dengan berbagai pemangku kepentingan. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan guna memastikan penggunaan spektrum frekuensi radio berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan gangguan terhadap layanan telekomunikasi, penyiaran, maupun layanan komunikasi lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2025, secara umum Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang berhasil mencapai seluruh target indikator kinerja dengan tingkat capaian sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan kontribusi positif dalam mendukung pengawasan serta pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja Balai Monitor.

Namun demikian, terdapat satu indikator yang belum mencapai target, yaitu Nilai Kinerja Anggaran. Hal ini disebabkan oleh adanya restrukturisasi organisasi pada tingkat kementerian dan direktorat yang berdampak pada penyesuaian pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran pada satuan kerja. Kondisi tersebut menyebabkan nilai efisiensi anggaran tidak dapat dimaksimalkan sebagaimana perencanaan awal, sehingga capaian Nilai Kinerja Anggaran belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan anggaran tetap dilaksanakan secara optimal dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ke depan, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang akan terus melakukan upaya peningkatan kualitas perencanaan program, penguatan koordinasi dengan unit kerja terkait, serta optimalisasi pengelolaan anggaran agar capaian kinerja anggaran dapat lebih maksimal pada periode selanjutnya.

Selain itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, seluruh pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang senantiasa menerapkan nilai-nilai dasar BerAKHLAK sebagai core values Aparatur Sipil Negara, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, serta responsif terhadap dinamika perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Penerapan nilai BerAKHLAK diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan, pelaksanaan pengawasan spektrum frekuensi radio secara profesional dan akuntabel, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah, operator telekomunikasi, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan spektrum frekuensi radio dapat berjalan secara tertib, efisien, serta mendukung keberlangsungan layanan komunikasi yang andal.

Sebagai penutup, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan melalui perbaikan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, serta evaluasi kinerja untuk mewujudkan WBK & WBBM. LAKIP ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi dan pembelajaran bagi seluruh jajaran organisasi dalam meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang, sekaligus sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat.



## **BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I TANGERANG**

Jl.Raya Serang KM 32 No. 212 RT 09/06, Kel. Sumur Bandung, Kec. Jayanti,  
Kab. Tangerang, Banten 15610

Telp. 021 - 59591234 | Email [upt\\_banten@postel.go.id](mailto:upt_banten@postel.go.id)

